

KAJIAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA MARITIM



BADAN PUSAT STATISTIK

KAJIAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA MARITIM

www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

KAJIAN DESA MARITIM 2015

No. Publikasi : 07330.1517
Katalog BPS : 3102022
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : ix + 105

Naskah :

Subdirektorat Indikator Statistik

Gambar Kulit :

Subdirektorat Indikator Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Indonesia mempunyai potensi yang besar, mulai dari sumber daya alam hingga letaknya yang strategis. Salah satu misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia. Menyadari betapa pentingnya bidang maritim untuk memperkuat integrasi nasional, pemerintah berusaha untuk mewujudkan kesatuan wilayah secara utuh. Untuk itu pemerintah memprioritaskan pembangunan kemaritiman, dengan membangun infrastruktur daerah yaitu membangun pelabuhan-pelabuhan baru, akan membuat akomodasi tol laut terutama di luar Jawa sebagai fondasi kekuatan maritim Indonesia.

Untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan kemaritiman Badan Pusat Statistik melakukan penyusunan publikasi “Kajian Sosial Ekonomi Desa Maritim”. Publikasi ini ditujukan untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai desa maritim atau desa pesisir di Indonesia. Beberapa aspek yang dikaji mencakup karakteristik desa maritim dan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah desa maritim. Publikasi Kajian Sosial Ekonomi Desa Maritim ini didukung oleh data hasil PODES 2011 dan 2014 dan data sekunder yang berasal dari kementerian/lembaga terkait.

Semoga publikasi Kajian Sosial Ekonomi Desa Maritim ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. DESA MARITIM DAN PERMASALAHANNYA	7
2.1. Konsep Definisi Desa	9
2.2. Konsep Definisi Desa Maritim	10
2.3. Pembangunan Desa Maritim	11
BAB III. KARAKTERISTIK SOSIAL	15
3.1. Keadaan Geografi	17
3.2. Keadaan Perumahan	22
3.3. Fasilitas Pendidikan	33
3.4. Fasilitas Kesehatan	43
BAB IV. KARAKTERISTIK EKONOMI	53
4.1. Lapangan Pekerjaan	55
4.2. Keberadaan TKI dan Agen Pengerahan TKI	68
4.3. Fasilitas dan Kondisi Jalan di Desa Maritim	76
4.4. Sarana dan Prasarana Kegiatan Ekonomi di Desa Maritim	85
BAB V. PENUTUP	97

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir di Indonesia, Tahun 2011 dan 2014	11
Tabel 3.1. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Topografi dan Wilayah/Pulau, Tahun 2014	18
Tabel 3.2. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/Pulau dan Lokasi Wilayah Terhadap Hutan, Tahun 2014	21
Tabel 3.3. Persentase Desa Maritim dan Bukan Desa Maritim Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	24
Tabel 3.4. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	26
Tabel 3.5. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Berdasarkan Keluarga Pengguna Listrik, Tahun 2011 dan 2014	29
Tabel 3.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014.....	31
Tabel 3.7. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014...	38
Tabel 3.8. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	41
Tabel 3.9. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Sarana Kesehatan dan Wilayah/ Pulau, Tahun 2011 dan 2014.....	44
Tabel 3.10. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Tenaga Kesehatan Yang Tinggal di Desa dan Wilayah/Pulau, Tahun 2011 dan 2014	50
Tabel 4.1. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2011 dan 2014.....	56
Tabel 4.2. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/Pulau dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2011 dan 2014.....	58
Tabel 4.3. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Sebagian Besar Penghasilan Penduduknya Bersumber dari Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Subsektor, Tahun 2011 dan 2014.....	61

Tabel 4.4.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Sumber Penghasilan Sebagian Besar Penduduknya Dari Sektor Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Subsektor dan Wilayah/Pulau, Tahun 2011 dan 2014.....	64
Tabel 4.5.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2011 dan 2014.....	68
Tabel 4.6.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2011 dan 2014.....	71
Tabel 4.7.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Agen Pengerahan TKI, Tahun 2014	72
Tabel 4.8.	Persentase TKI di Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011 dan 2014.....	74
Tabel 4.9.	Persentase TKI di Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/Pulau dan Jenis Kalamim, Tahun 2011 dan 2014.....	75
Tabel 4.10.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Penerangan Jalan Utama Desa Menurut Sumber Penerangan Jalan dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014.....	79
Tabel 4.11.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Jenis Lalu Lintas Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas, Tahun 2011 dan 2014.....	81
Tabel 4.12.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Jalan Yang Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih, Tahun 2011 dan 2014	81
Tabel 4.13.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Lalu Lintas Transportasi dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014.....	83
Tabel 4.14.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menurut Bahan Baku Utama dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014	88
Tabel 4.15.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, Toko/Warung Kelontong dan Pulau, Tahun 2014	91
Tabel 4.16.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Koperasi, Tahun 2014.....	93
Tabel 4.17.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kredit Usaha, Tahun 2014	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Topografi Wilayah, Tahun 2014	17
Gambar 3.2. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Lokasi Wilayah Terhadap Hutan, Tahun 2014	20
Gambar 3.3. Persentase Desa Maritim dan Bukan Desa Maritim Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	23
Gambar 3.4. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	25
Gambar 3.5. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik, Tahun 2011 dan 2014	28
Gambar 3.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014	30
Gambar 3.7. Persentase Desa Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014	34
Gambar 3.8. Persentase Desa Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014	35
Gambar 3.9. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Swasta dan Negeri, Tahun 2014	36
Gambar 3.10. Persentase Desa Maritim Menurut Adanya Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur di Bidang Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014	41
Gambar 3.11. Persentase Desa Maritim Menurut Keberadaan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan, Tahun 2014	43
Gambar 3.12. Persentase Desa Maritim Yang Tidak Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat, Tahun 2014	46
Gambar 4.1. Persentase Desa Maritim Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2014	57
Gambar 4.2. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Sebagian Besar Penghasilan Penduduknya Bersumber Dari Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Subsektor, Tahun 2014	62

Gambar 4.3.	Persentase Desa Maritim Menurut Pemanfaatan Laut, Tahun 2011 dan 2014	65
Gambar 4.4.	Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap, Tahun 2011 dan 2014.....	66
Gambar 4.5.	Persentase Desa Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2014.....	69
Gambar 4.6.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Penerangan Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014.....	76
Gambar 4.7.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014	78
Gambar 4.8.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014.....	80
Gambar 4.9.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Angkutan Umum Yang Melewati Desa, Tahun 2014	82
Gambar 4.10.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Transportasi dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014	84
Gambar 4.11.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menurut Jenis Bahan Baku Utama, Tahun 2011 dan 2014.....	86
Gambar 4.12.	Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Tahun 2014.....	89
Gambar 4.13.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Pasar Menurut Jenis Bangunan, Tahun 2014....	90
Gambar 4.14.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Toko/Warung Leontong, Tahun 2014	90
Gambar 4.15.	Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Bank, Tahun 2014	92

Pendahuluan

1



1.1. Latar Belakang

Pembangunan Jangka Menengah tahap tiga (RPJMN 2015-2019) yang baru saja dimulai oleh pemerintahan Jokowi-JK. Program pembangunan difokuskan pada tiga hal, yaitu pembangunan maritim, pangan dan energi. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk lima tahun kedepan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK tertuang dalam program nawacita yang mengusung sembilan agenda kerja. Salah satu misi pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Menurut Mahan ([sejarah-maritim-masyarakat-laut_6029.html](#)), ada enam syarat utama sebuah negara bisa menjadi negara maritim yaitu: letak geografis, karakteristik tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, dan pemerintahan. Syarat sebagai negara maritim yang dikemukakan oleh Mahan sebagian dimiliki oleh Indonesia yaitu letak geografis, karakteristik tanah dan pantai serta karakter penduduk. Dilihat dari letak geografis Indonesia, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Hindia dan Pasifik), selain itu Indonesia, juga merupakan negara kepulauan yang membentang dari Barat hingga Timur dan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan memerhatikan kondisi di atas jelas bahwa sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut, dimana luas wilayah daratan Indonesia lebih kecil dibandingkan luas wilayah perairan. Laut sebagai penghubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Kondisi yang demikian menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah perikanan laut yang sangat luas. Jadi jelas bahwa fokus pembangunan pemerintah Jokowi-JK sudah sesuai dengan kondisi geografis.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah Negara maritime perlu didukung berbagai unsur kemaritiman yang mandiri. Akan tetapi unsur-unsur kekuatan maritim seperti transportasi laut, pemanfaatan sumber hayati dari laut, pertambangan dasar laut, pemanfaatan energi laut, wisata laut, unsur pengamanan laut, dan sebagainya selama ini belum tergarap secara sempurna. Hal ini terjadi karena paradigma pembangunan selama ini lebih memprioritaskan wilayah/daerah perkotaan, industri, politik dan pertanian, sementara perhatian pemerintah terhadap aspek maritim seperti perdagangan, pelayaran, perikanan serta perkapalan termasuk kehidupan masyarakat di daerah pesisir masih sangat kurang.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak desa-desa yang berbatasan dengan laut atau desa yang memiliki pantai atau biasa disebut desa pesisir. Jumlah wilayah desa pesisir di Indonesia ada sebanyak 12.827 desa yang tersebar dari ujung Barat sampai Timur. Dalam APBN tahun 2015 pembangunan untuk desa dianggarkan sebesar Rp 9,07 triliun oleh pemerintahan sebelumnya (SBY), ternyata dianggap kurang. Oleh karena itu pada saat dilakukan APBN perubahan, beberapa pos anggaran untuk pengeluaran dikurangi porsi nya sebaliknya anggaran untuk pembangunan

desa diberi porsi yang lebih banyak. Total anggaran pembangunan desa berdasarkan APBN perubahan menjadi sebesar Rp 20,77 triliun.

Sebenarnya wacana membangun negara maritim sudah mulai muncul pada tahun 1997, untuk membangun Indonesia baru sebagai negara bahari yang memaksimalkan laut sebagai potensi bangsa Indonesia. Pada masa Pemerintahan B.J Habibie, Indonesia mendeklarasikan visi pembangunan kelautan dalam “Deklarasi Bunaken”. Inti deklarasi tersebut adalah pemahaman bahwa laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan bangsa Indonesia. Dilanjutkan pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui komitmen Pembangunan Kelautan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan dikembangkannya Dewan Maritim Indonesia yang kemudian menjadi Dewan Kelautan Indonesia.

Gagasan pemerintahan Jokowi-JK yang akan menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim menargetkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional. Kkonsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dalam upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan program tersebut langkah utama yang dilakukan adalah membenahi terlebih dahulu desa pesisir atau membedah desa pesisir. Melalui anggaran yang telah disediakan pada pos dana desa pembangunan untuk desa dapat segera dilakukan dan dalam pelaksanaannya, tidak hanya mencakup pembangunan wilayah desa pesisir secara fisik, tetapi termasuk juga pembangunan social ekonomi masyarakat nelayan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan publikasi ini adalah secara umum untuk memberikan gambaran tentang kondisi di wilayah desa-desa maritim dan program pembangunan Indonesia untuk desa maritim saat ini. Sejumlah aspek desa maritim yang disajikan dalam publikasi ini mencakup gambaran tentang fasilitas dan sarana yang dimiliki desa maritim, permasalahan yang ada di wilayah desa maritim, serta kondisi dan perkembangan kesejahteraan rumah tangga di wilayah desa maritim. Penyajian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang hal-hal yang berhubungan dengan desa maritim, dan harapannya dapat memberikan masukan dan kontribusi terhadap penentu kebijakan bagi program pembangunan desa maritim kedepannya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini berkisar pada pembahasan tentang desa maritim, dengan pendekatannya adalah melalui desa pesisir atau desa yang berbatasan dengan laut atau desa yang memiliki pantai. Data kuantitatif yang disajikan dalam publikasi ini diolah dari data hasil Sensus Desa (PODES) 2011 dan 2014. Selain itu juga disajikan data dan informasi yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat memberikan gambaran yang

terkait dengan kondisi lingkungan, fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada di desa pesisir dan program-program kementerian yang mendukung pembangunan negara maritim.

1.4. Sistematika Penulisan

Kajian publikasi desa maritim ini terdiri dari lima bab, dimana pada Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dari kajian pengembangan desa maritim, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang Desa Maritim yang menguraikan tentang konsep dan definisi tentang desa, desa maritim, selain itu juga membahas permasalahan dan pembangunan desa maritim.

Bab III menguraikan tentang karakteristik desa pesisir, kondisi sosial desa maritim yang meliputi penduduk, fasilitas dan sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan tenaga kesehatan di daerah pesisir.

Bab IV menguraikan tentang karakteristik Ekonomi dari desa maritim, yang meliputi, lapangan pekerjaan dan desa menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk, keberadaan TKI dan agen pengerahan TKI

Bab V sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



Desa Maritim dan Permasalahannya

2

2.1. Konsep Definisi Desa

Desa, menurut definisi “universal”, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Selanjutnya, Bintarto (1977) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
- 2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
- 3) Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Menurut Paul H. Landis (<http://id.wikipedia.org/wiki/desa>), desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1991), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga dipertegas juga mengenai desa di dalam UU no. 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

2.2. Konsep Definisi Desa Maritim

Pengertian Pesisir Menurut (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001) adalah merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Desa Maritim adalah desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia adalah salah satu negara maritim yang memiliki banyak pulau, dimana 70 persen wilayahnya adalah laut membuat banyak wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut atau desa yang memiliki pantai. Kondisi alam dan letak wilayah tersebut membuat desa pesisir memiliki ciri sebagai daerah pemukiman yang padat, sebagian besar penduduk yang tinggal di desa pesisir menggantungkan hidupnya dari laut atau bermatapencaharian sebagai nelayan.

Hasil sensus desa (PODES), menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah desa di Indonesia ada sebanyak 78.609 desa, dimana desa maritim yang di dekatkan dengan desa pesisir yaitu desa yang memiliki pantai atau berbatasan dengan laut ada sebanyak 11.884 desa (15,12 persen) sedangkan desa yang bukan desa pesisir ada sebanyak 66.725 desa atau sekitar 84,88 persen.

Landasan hukum mengenai otonomi daerah pertama kali disahkan adalah UU No. 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Sejak diberlakukannya UU tersebut pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru daerah di Indonesia atau pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kabupaten/kota dari induknya semakin marak. Pemekaran wilayah tidak hanya di tingkat kabupaten/kota tapi sampai

Tabel 2.1. Jumlah Desa Pesisiri dan Desa Bukan Pesisir di Indonesia, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	2011		2014	
	Desa Pesisir	Desa Bukan Pesisir	Desa Pesisir	Desa Bukan Pesisir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	2 443	21 770	2 618	22 726
Jawa	1 399	23 825	1 446	23 852
Bali dan Nusa Tenggara	1 339	3 367	1 487	3 640
Kalimantan	592	6 368	600	6 591
Sulawesi	3 278	6 702	3 632	6 876
Maluku dan Papua	2 773	4 693	3 044	5 678
Indonesia	11 884	66 725	12 827	69 363

di tingkat kecamatan bahkan tingkat desa, dalam kurun waktu 3 tahun pada pendataan podes berikutnya jumlah desa sudah mencapai 82.190 desa terjadi penambahan 3.581 desa atau meningkat sekitar 81,27 persen. Jumlah desa pesisir dari hasil PODES 2014 tercatat sebanyak 12.827 desa, dalam kurun waktu tiga tahun terjadi pemekaran beberapa desa sehingga terjadi penambahan 943 desa pesisir. Sedangkan desa bukan pesisir jumlahnya mencapai 69,363 desa terjadi penambahan 2.638 desa dalam waktu tiga tahun.

2.3. Pembangunan Desa Maritim

Pemahaman desa saat ini selalu identik dengan daratan pertanian yang jauh dari kawasan pesisir dan laut, desa selalu didefinisikan dengan keadaan dimana terletak dikawasan pegunungan dan perkebunan yang jauh dari aktifitas manusia termasuk modernisasi. Sebenarnya selain desa yang berada di daerah pegunungan juga terdapat desa-desa yang berada di pulau-pulau kecil dan terdapat yang lebih sulit lagi untuk mendapat akses. Desa yang terdapat didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya manusia-manusia yang termarginalkan.

Kembali kepada program yang terdapat di nawacita Jokowi-JK bahwa desa harus dibangun dan diperkuat, bahwa desa harus mandiri menjadi maju dan rakyatnya sejahtera, jika desa bisa mandiri dan mengelolah keuangan dengan baik serta banyak indutsri skala kecil di tataran desa makaarganya dan penduduknya tidak lagi melakukan hijrah kekota-kota besar, jika kekuatan ekonomi desa maju maka masyarakat yang nasibnya didesa tidak menentu tidak lagi kekota menjadi tempat mengadu nasib.

Dalam era Kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo lebih menekankan pada Pembangunan Kemaritiman. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia yang memiliki ±17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 95,181 km². Eksistensi dan potensi lautan, maritim atau bahari Indonesia selalu memunculkan gagasan-gagasan

baru pembangunan masyarakat Indonesia, sebab lautan adalah sisi terpenting dalam kawasan teritorial NKRI.

Program pemerintah dalam membangun desa maritim, agar dapat segera terlaksana dapat menggunakan tenaga konsultan untuk dilibatkan membantu pemda mensosialisasikan dana desa dalam setiap kegiatan ke daerah. Jika pemerintah mencetuskan program harus disertai pendampingan, baik itu dari eksekutif, legislatif maupun pemda dan melibatkan Kementerian terkait.

Permasalahan

Penduduk yang tinggal di daerah pesisir umumnya bekerja atau bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan sangat tergantung pada alam, tidak bisa setiap hari atau sepanjang tahun mereka dapat pergi melaut karena tergantung dengan kondisi alam. Jika musim ombak besar otomatis para nelayan tidak ada yang pergi melaut, dan tidak akan melakukan penangkapan ikan sama sekali mereka hanya berdiam sambil menunggu waktu yang baik untuk dapat melaut kembali. Selain pengaruh alam, sarana dan alat yang dipakai atau yang dimiliki oleh para nelayan sebagian besar masih sangat sederhana.

Permasalahan yang sering muncul di desa terutama desa pesisir pada umumnya adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para tengkulak. Hampir di setiap wilayah pesisir di Indonesia dijumpai adanya tengkulak yang mengambil beberapa fungsi pengembangan di sektor perikanan dan kelautan secara informal. Dalam keadaan tidak melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari banyak nelayan yang mengandalkan pada bantuan tengkulak/rentenir. Tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari saja tetapi juga kebutuhan sekolah anak-anaknya para nelayan menggantungkan pada pinjaman dari tengkulak. Para nelayan jarang yang memanfaatkan fasilitas bank dan lembaga keuangan lainnya menurut nelayan tradisional memerlukan persyaratan yang memberatkan mereka.

Keberadaan para tengkulak sangat berperan sekali. Fungsi-fungsi pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang dimasuki oleh tengkulak tidak saja hanya pada fungsi finansial, tetapi banyak fungsi lainnya yang telah diambilnya. Dalam keadaan tidak melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari banyak nelayan yang mengandalkan pada bantuan tengkulak/rentenir. Tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari saja tetapi juga kebutuhan sekolah anak-anaknya para nelayan menggantungkan pada pinjaman dari tengkulak. Para nelayan jarang yang memanfaatkan fasilitas bank dan lembaga keuangan lainnya menurut nelayan tradisional memerlukan persyaratan yang memberatkan mereka.

Banyak celah yang dimanfaatkan oleh para tengkulak yang berada di daerah pesisir untuk memenuhi kebutuhan nelayan, diantaranya para tengkulak menawarkan bantuan finansial kepada para nelayan tanpa syarat tertentu tidak seperti lembaga keuangan yang harus ada agunan, sehingga penawaran para tengkulak banyak dimanfaatkan oleh nelayan. Selain itu

banyak tengkulak yang menawarkan kepada nelayan sarana penangkapan ikan dari mulai menyediakan biaya bekal melaut dalam operasi penangkapan ikan sampai penyediaan alat tangkap ikan serta kapal penangkap ikan.

Selain kondisi diatas para tengkulak juga memanfaatkan pada lokasi-lokasi desa pesisir yang tidak memiliki fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka tengkulak akan mengambil alih atau akan dimanfaatkan oleh tengkulak dengan membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga murah. Kesejahteraan para nelayan banyak tergadaikan oleh tengkulak untuk lebih meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan nelayan kedepannya perlu dilakukan pembangunan yang menyeluruh diwilayah desa-desa pesisir di Indonesia.

Pembangunan

Menurut Rukin (2015), pembangunan kemaritiman mencakup berbagai macam komponen pembangunan diantaranya adalah pembangunan perekonomian, peningkatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan yang memadai. Pemberdayaan harus dilakukan berdasarkan aspek manfaat, kebutuhan, dan ketersediaan potensi yang ada, sehingga mampu mengubah mindset masyarakat dalam melakukan pola perubahan secara bertahap. Pemberdayaan sejatinya membutuhkan pendampingan hingga kemandirian masyarakat tercapai. Sejak dari pengolahan awal dari ketersediaan potensi yang ada di desa hingga tahap-tahap berikutnya sampai pada tahap pemasaran, masyarakat perlu pendampingan secara serius dan berkualitas. Sehingga tujuan pembanguann terhadap kemandirian masyarakat dan desa/wilayah pesisir tercapai secara baik.

Pembangunan desa maritim merupakan suatu ide baru yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia diwilayah pesisir/ daerah pantai. Dan bila kita inginkan agar Indonesia menjadi pusat kemaritiman di Asia Tenggara, maka pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah bukan hanya berfokus pada area Pesisir/Pantai tapi juga harus berorintasi kepada Pesisir, laut serta daratan karena saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Pembangunan desa Maritim sendiri dapat terlaksana ketika adanya pemenuhan faktor-faktor pendukung terlaksananya pembangunan desa Maritim. Misalnya

- Transportasi yang memadai
- Adanya sumber daya manusia yang berkualitas
- Adanya fokus pembangunan yang dimulai dari desa ke kota, dan bukan kota barulah ke desa

Pemberdayaan dan peningkatan infrastruktur merupakan alat utama dalam pembangunan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang masuk dalam katagori tertinggal perlu penanganan serius dari pemerintah. Dibutuhkan sebuah program pembangunan yang best practice sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Begitu pula pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran menjadi kunci awal yang perlu dilakukan dan dikembangkan sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Desa yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai potensinya, Program pembangunan desa maritim pada dasarnya adalah proses perubahan, pengembangan dan kemajuan pada berbagai aspek yang ada di desa-desa di wilayah pesisir/daerah pantai dan desa yang ada di Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan harus secara menyeluruh yaitu pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang berorientasi pada pesisir, laut dan daratan karena semuanya saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan dilakukan secara berkelanjutan termasuk pembangunan beberapa sektor penting bagi masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Supaya desa maritim bisa mandiri maka otomatis desa yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan pembangunan secara menyeluruh, terutama perekonomian wilayah agar rakyat desa pesisir tidak lagi miskin dan bisa mandiri. Pembangunan yang dilakukan di desa yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai potensi sumber daya alam dan SDM yang ada di desa tersebut.

Pemerintah mampu menyiapkan SDM yang ada di desa pesisir dan pulau-pulau kecil bekal keterampilan dan pelatihan yang membuat mereka mampu mengelola sumber daya alam pesisir dan lautan yang pada akhirnya dapat berjalan secara berkelanjutan buat masyarakat pesisir itu sendiri. Beberapa sektor penting yang harus dibangun pemerintah di desa pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu;

1. Pemerintah perlu menata Dana desa sesuai dengan UU desa saat ini, termasuk perlu dibentuknya koperasi desa sebagai upaya pemerintah mengusir para rentenir atau tengkulak yang selama ini memiskinkan nelayan.
2. Perlu dibangun infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan atau dermaga kecil sebagai akses transportasi perdagangan antar pulau-pulau dan ke kota. Pelabuhan ini juga sebagai akses untuk keperluan logistik lainnya.
3. Pembangunan sarana untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, dua fasilitas ini sangat pokok dan harus menjadi kewajiban pemerintah agar setiap desa memiliki fasilitas tersebut. Fasilitas sarana kesehatan di desa sangat penting sekali, sebab banyaknya angka kematian di pelosok pulau kecil juga disebabkan kurangnya sarana kesehatan seperti puskesmas dan dokter. Sedangkan fasilitas pendidikan menjadi sarana mencetak generasi bangsa yang berpikir lebih maju dan mandiri.

Tiga poin diatas harus menjadi prioritas didalam membangun desa yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, jika itu terwujud maka desa tidak menjadi sepi, dan desa tidak akan ditinggalkan lagi oleh masyarakatnya yang hijrah ke kota. Akan tetapi desa menjadi ramai, maju dan mandiri karena dikelola oleh rakyatnya sendiri. Maka desa pesisir dan desa di pulau-pulau kecil dan terdepan akan menjadi garis utama terwujudnya poros maritim JOKOWI-JK.

Karakteristik Sosial

3



3.1 Keadaan Geografis

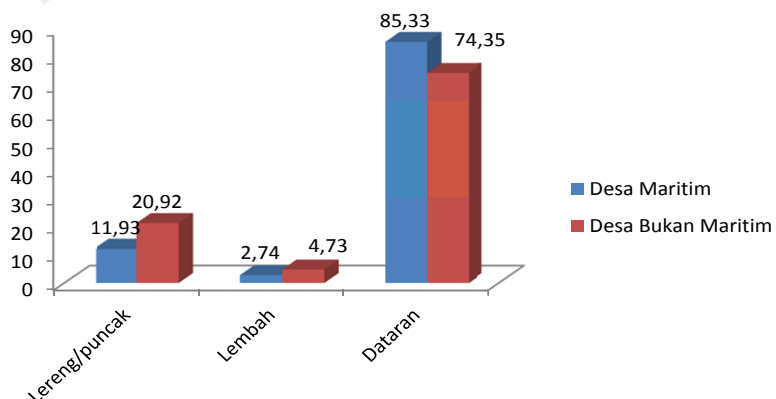
Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan di antara dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Indonesia memiliki potensi maritim yang besar karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di jalur silang perairan laut dunia.

Letak maritim yaitu letak suatu tempat yang ditinjau dari keadaan laut di sekitarnya, apakah dekat atau jauh dari laut, apakah sebagian atau seluruhnya dikelilingi laut, dan sebagainya. Indonesia memiliki letak maritim yang sangat baik karena wilayahnya berbentuk kepulauan yang dikelilingi tiga lautan luas, yaitu bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Letak maritim Indonesia memberi dampak positif bagi Indonesia, seperti adanya kegiatan atau usaha di bidang pelayaran, perikanan serta pelabuhan.

Topografi desa dibedakan menjadi tiga, yaitu lereng/puncak, lembah, dan dataran. Lereng adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah, mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dataran adalah bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.

Gambar 3.1 menggambarkan sebagian besar desa maritim terletak di dataran, dengan persentase 85,33 persen desa di tahun 2014. Persentase desa maritim yang terletak di lereng/puncak sebesar 11,93 persen desa, dan

Gambar 3.1 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Topografi Wilayah, Tahun 2014



Sumber : Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2014

2,74 persen desa terletak di lembah. Seperti halnya desa maritim, sebagian besar desa bukan maritim berada di dataran dengan persentase lebih kecil, yaitu 74,35 persen desa. Sementara itu, desa bukan maritim yang terletak di lereng/puncak dan di lembah persentasenya lebih tinggi, masing-masing sebesar 20,92 persen desa dan 4,73 persen desa.

Tahun 2014, jumlah desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 82.190 desa dan terdapat 12.827 desa atau 15,61 persen desa maritim. Sesuai hasil Potensi Desa 2014, sebagian besar desa-desa di Indonesia terletak di dataran/hamparan dengan persentase 76,06 persen desa. Persentase desa yang terletak di lereng/puncak 19,52 persen desa dan 4,42 persen desa terletak di lembah.

Tabel 3.1 memberikan informasi topografi di wilayah/pulau-pulau besar di Indonesia tahun 2014. Di Pulau Sumatra, sebagian besar desa maritim terletak di dataran dengan persentase 91,71 persen desa, yang terletak di lereng/puncak 6,72 persen desa, dan sisanya terletak di lembah sebesar 1,57 persen desa. Untuk desa bukan maritim di Pulau Sumatera, sebagian besar desa bukan maritim terletak di dataran, namun dengan persentase yang lebih

Tabel 3.1 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Topografi dan Wilayah/Pulau, 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2014]

Wilayah/Pulau	Topografi	Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	Lereng/puncak	6,72	14,56
	Lembah	1,57	4,88
	Dataran	91,71	80,57
Jawa	Lereng/puncak	7,81	19,53
	Lembah	1,24	1,98
	Dataran	90,94	78,49
Bali dan Nusa Tenggara	Lereng/puncak	23,00	36,51
	Lembah	3,43	7,58
	Dataran	73,57	55,91
Kalimantan	Lereng/puncak	4,50	9,47
	Lembah	2,00	4,20
	Dataran	93,50	86,33
Sulawesi	Lereng/puncak	11,78	25,89
	Lembah	4,32	6,79
	Dataran	83,89	67,32
Maluku dan Papua	Lereng/puncak	14,59	49,54
	Lembah	2,40	11,94
	Dataran	83,02	38,52

rendah (80,57 persen). Desa bukan maritim yang terletak di lereng/puncak dan di lembah, persentasenya lebih tinggi, masing-masing sebesar 14,56 persen desa dan 4,88 persen desa. Topografi Pulau Sumatera bagian barat berupa dataran memanjang sepanjang pantai. Bagian tengah merupakan jalur vulkanis berupa Pegunungan Barisan dan dataran rendah terdapat di bagian timur Sumatera.

Di Pulau Jawa, sebagian besar desa maritim terletak di dataran, dengan persentase 90,94 persen desa. Persentase desa maritim yang terletak di lereng/puncak 7,81 persen desa, dan yang terletak di lembah 1,24 persen desa. Persentase desa bukan maritim di Pulau Jawa yang terletak di dataran sebesar 78,49 persen desa, yang terletak di lereng/puncak 19,53 persen, dan yang terletak di lembah 1,98 persen desa. Secara fisiologis, Pulau Jawa dibedakan menjadi tiga zona. Zona selatan berupa Plateau yang miring ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Zona tengah berupa rangkaian pegunungan, Pulau Jawa bagian timur dan sebagian Pulau Jawa bagian barat merupakan depresi yang ditumbuhi gunung-gunung berapi. Zona utara berbentuk bukit-bukit dan pegunungan rendah yang diselingi gunung berapi.

Sementara itu, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, persentase desa maritim yang terletak di lereng/puncak sebesar 23,00 persen desa, di lembah 3,43 persen desa, dan 73,57 persen desa di dataran. Desa bukan maritim di Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki gambaran menarik, dengan persentase desa bukan maritim yang terletak di lereng/puncak cukup tinggi, sebesar 36,51 persen desa, yang terletak di lembah sebesar 7,58 persen desa, dan yang terletak di dataran 55,91 persen desa. Provinsi Bali memiliki bentuk wilayah berbukit dan bergunung, dengan deretan yang memanjang dari barat ke arah timur. Bagian selatan merupakan dataran yang landai sampai datar, dan bagian utara yang sejajar garis pantai terdapat dataran rendah pantai.

Sebagian besar desa maritim di Maluku dan Papua terletak di dataran dengan persentase 83,02 persen desa. Persentase desa maritim di Pulau Maluku dan Papua yang terletak di lereng/puncak sebesar 14,59 persen desa. Persentase ini merupakan yang tertinggi di antara pulau-pulau besar lainnya. Kondisi yang sama juga tergambar di desa bukan maritim di wilayah Maluku dan Papua. Persentase desa bukan maritim yang terletak di lereng/lembah sebesar 49,54 persen desa, lebih tinggi dibandingkan desa bukan maritim yang terletak di lembah (11,94 persen) dan dataran (38,52 persen).

Provinsi Maluku memiliki topografi berbukit-bukit sepanjang garis pantai menuju dataran tinggi. Karakteristik wilayah ini dipengaruhi adanya pertemuan dua lempeng bumi, Sirkum Pasifik dan Mediterania. Hampir 70,00 persen Provinsi Maluku merupakan dataran tinggi. Gugusan gunung terdapat hampir di setiap kabupaten/kota, yang berjumlah empat gunung, yaitu Gunung Binaya, Gunung Salahutu, Gunung Api, dan Gunung Kapala Madan. Wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir. Topografi wilayah Papua Barat

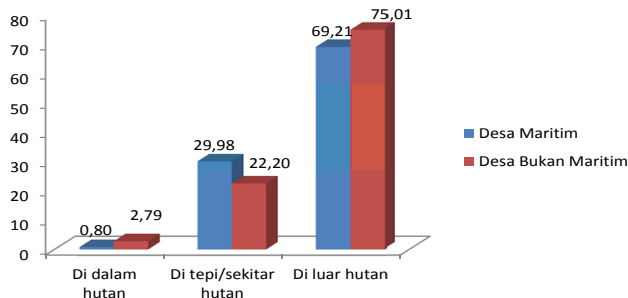
sangat bervariasi, dari dataran hingga pegunungan dengan puncak yang tinggi, dan daerah lembah-lembah yang datar. Lebih dari 50,00 persen lahan di Papua Barat memiliki persentase kemiringan lahan lebih dari 40,00 persen atau dikategorikan sangat curam.

Topografi suatu wilayah turut mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti mata pencaharian. Penduduk akan menyesuaikan pekerjaan yang dijalani dengan kontur wilayah tempat tinggal. Sebagai contoh, sebagian besar penduduk di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau petani sekaligus nelayan.

Sebagian besar desa maritim terletak di luar hutan, dengan persentase 69,21 persen di tahun 2014. Persentase desa maritim yang terletak di tepi/sekitar hutan sebesar 29,98 persen dan hanya sebagian kecil yang terletak di dalam hutan (0,80 persen). Sama seperti desa maritim, sebagian besar desa bukan maritim terletak di luar hutan. Tahun 2014, sekitar 75,01 persen desa bukan maritim terletak di luar hutan, 22,20 persen desa terletak di tepi/sekitar hutan dan 2,79 persen desa terletak di dalam hutan. Jumlah desa yang terletak di tepi/sekitar hutan cukup tinggi, terutama di desa maritim. Daerah pesisir merupakan habitat hutan mangrove. Tumbuhan yang sering tumbuh di hutan mangrove atau sepanjang garis pantai seperti bakau, api-api, pedada, tanjang, nyirih, dan nipah.

Persentase desa maritim di Pulau Jawa yang terletak di luar hutan, tepi/sekitar hutan, dan dalam hutan masing-masing sebesar 87,00 persen desa, 12,79 persen desa, dan 0,21 persen desa pada tahun 2014. Sementara itu, persentase desa bukan maritim di Pulau Jawa yang terletak di luar hutan, tepi/sekitar hutan, dan dalam hutan tahun masing-masing sebesar 81,98 persen desa, 17,40 persen desa, dan 0,62 persen desa. Persentase desa yang terletak di dalam hutan di wilayah Jawa merupakan yang terkecil di antara wilayah/pulau-pulau besar lain, baik di desa maritim maupun desa bukan maritim. Hal ini disebabkan luas hutan di Pulau Jawa lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Persentase luas daratan kawasan hutan dibanding luas wilayah di Pulau Jawa sebesar 25,60 persen.

Gambar 3.2 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Lokasi Wilayah Terhadap Hutan, Tahun 2014



Sumber : Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2014

Tabel 3.2 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/Pulau dan Lokasi Wilayah Terhadap Hutan, 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2014]

Wilayah/Pulau	Lokasi Wilayah Terhadap Hutan	Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	Di dalam hutan	0,50	0,95
	Di tepi/sekitar hutan	24,79	15,36
	Di luar hutan	74,71	83,69
Jawa	Di dalam hutan	0,21	0,62
	Di tepi/sekitar hutan	12,79	17,40
	Di luar hutan	87,00	81,98
Bali dan Nusa Tenggara	Di dalam hutan	0,74	1,15
	Di tepi/sekitar hutan	26,77	25,74
	Di luar hutan	72,49	73,10
Kalimantan	Di dalam hutan	1,50	5,75
	Di tepi/sekitar hutan	27,83	31,09
	Di luar hutan	70,67	63,16
Sulawesi	Di dalam hutan	0,17	1,77
	Di tepi/sekitar hutan	26,24	28,98
	Di luar hutan	73,60	69,24
Maluku dan Papua	Di dalam hutan	2,00	18,09
	Di tepi/sekitar hutan	49,08	48,98
	Di luar hutan	48,92	32,93

Persentase desa maritim di Pulau Kalimantan yang terletak di dalam hutan sebesar 1,50 persen, yang terletak di tepi/sekitar hutan 27,83 persen, dan yang terletak di luar hutan sebesar 70,67 persen. Sementara itu, desa bukan maritim di Pulau Kalimantan yang terletak di dalam hutan, di tepi/sekitar hutan, dan di luar hutan persentasenya masing-masing sebesar 5,75 persen desa, 31,09 persen desa, dan 63,16 persen desa.

Di wilayah Maluku dan Papua, persentase desa maritim yang terletak di tepi/sekitar hutan cukup besar yaitu 49,08 persen tahun pada 2014. Desa maritim yang terletak di dalam hutan sebesar 2,00 persen desa dan di luar hutan 48,92 persen desa pada tahun 2014. Sementara itu, persentase desa bukan maritim di Pulau Maluku dan Papua yang terletak di dalam hutan cukup tinggi yaitu 18,09 persen desa, di tepi/sekitar hutan 48,98 persen desa, dan di luar hutan 32,93 persen desa. Sebagian besar desa di Maluku dan Papua terletak di tepi/sekitar hutan, dengan persentase hampir 50,00 persen baik desa maritim maupun desa bukan maritim. Bahkan jumlah desa bukan maritim yang terletak di dalam hutan hampir seperlima dari jumlah seluruh desa bukan

maritim di Maluku dan Papua. Hal ini disebabkan kawasan hutan di Maluku dan Papua masih sangat luas, dengan persentase luas daratan kawasan hutan dibanding luas wilayah di Maluku dan Papua sebesar 95,24 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar daratan di Maluku dan Papua masih berupa hutan belantara, terutama di Papua.

3.2. Keadaan Perumahan

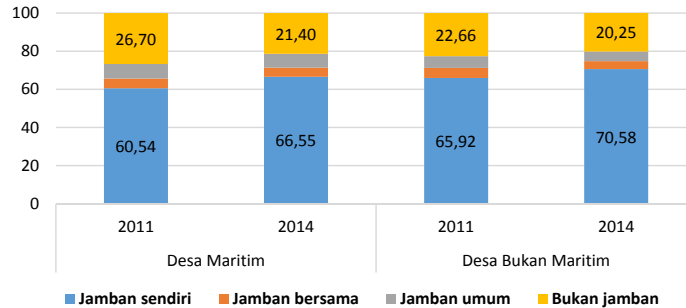
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi sebagai tempat berlindung dari kondisi alam. Pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman dapat meningkatkan mutu lingkungan kehidupan manusia sejalan dengan pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan roda perekonomian dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Setyandito, 2005). Pemukiman sangat berkaitan dengan alam, manusia, masyarakat, ruang kehidupan, dan jaringan bersosialisasi. Perumahan yang merupakan bagian dari permukiman itu sendiri merupakan tempat penduduk tinggal, melakukan kegiatan kerja dan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat, dan memenuhi berbagai kegiatan kehidupan.

Latar belakang pendidikan penduduk yang masih relatif rendah di desa maritim menyebabkan pengetahuan mengenai lingkungan sehat cenderung masih rendah sehingga kesadaran untuk membangun dan menjaga lingkungan yang sehat di perumahan masih sangat kurang. Umumnya, karakteristik perumahan dan permukiman di daerah tepi pantai (permukiman nelayan) adalah cenderung rapat (kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor, dll). Dominasi kawasan perumahan permukiman nelayan, yang umumnya kumuh dan belum tertata. Daerah atas air pada umumnya cenderung memiliki pola cluster, yang tidak teratur dan organik (Amri & Idawarni, 2014).

Karakteristik permukiman berhubungan secara signifikan dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi fisik lingkungan permukiman (Marwasta & Priyono, 2007). Pemukiman desa pesisir yang ditempati oleh nelayan yang umumnya berpendapatan rendah menyebabkan kondisi permukiman terkesan tidak layak huni. Nilai sosial yang umumnya terdapat pada masyarakat berpenghasilan rendah adalah keakraban, tingginya semangat gotong royong, serta sistem kekeluargaan yang kental menyebabkan kedekatan fisik bangunan dan terkesan berjejal atau ramai. Padahal perumahan yang tidak layak huni dapat menurunkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perumahan yang merupakan determinan kesehatan masyarakat harus diperhatikan pengadaannya dengan mengikuti standar layak huni. Perumahan yang layak huni harus memenuhi syarat kesehatan. Perumahan yang sehat erat kaitannya dengan kondisi rumah (atap, dinding, dan lantai), pencahayaan/ventilasi, serta ketersediaannya sarana dan prasarana terkait, seperti air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Keman, 2005).

Gambar 3.3. Persentase Desa maritim dan Bukan Maritim Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Selama tahun 2011-2014, persentase desa yang sebagian besar keluarganya memiliki jamban sendiri meningkat sebesar 6,01 persen untuk desa maritim dan 3,66 persen untuk desa bukan maritim. Di sisi lain, persentase desa yang sebagian besar keluarganya tidak memiliki jamban menurun sebesar 5,3 untuk desa maritim dan 2,41 persen untuk desa bukan maritim. Perkembangan desa maritim dalam hal tempat pembuangan air besar lebih cepat dibandingkan desa bukan maritim.

Jamban merupakan tempat pembuangan tinja yang terkelola dan berdampak baik dan sehat karena merupakan pembuangan yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak. Jamban dapat berfungsi untuk mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara kotoran yang dibuang disebarkan tempat, seperti sungai, danau, dan permukaan tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara serta menimbulkan bau. Selain itu, pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak ada kesehatan dan kualitas air di sekitar. Oleh karena itu, setiap rumah tangga disarankan untuk memiliki jamban. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintah di desa maritim, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban.

Namun demikian, persentase desa maritim yang menggunakan bukan jamban masih lebih tinggi dibandingkan desa bukan maritim. Pada tahun 2014, desa maritim yang sebagian besar keluarganya menggunakan bukan jamban ada sebesar 21,40 persen, sedangkan desa bukan maritim yang sebagian besar keluarganya menggunakan bukan jamban ada sebesar 20,25 persen. Hal tersebut menandakan bahwa desa maritim masih cenderung untuk menggunakan bukan jamban dibandingkan desa bukan maritim. Keadaan tersebut perlu diperhatikan karena pembuangan tinja yang tidak sehat akan menyebabkan penyakit, seperti diare pada balita.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa di keenam pulau besar persentase desa maritim dan bukan maritim yang sebagian besar keluarganya menggunakan

Tabel 3.3. Persentase Desa Maritim dan Bukan Desa Maritim Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/ Pulau	Tempat Buang Air Besar Sebagian Keluarga	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Jamban Sendiri	71,02	73,53	60,33	65,69
	Jamban Bersama	3,56	1,68	3,12	2,82
	Jamban Umum	5,40	4,39	10,11	8,91
	Bukan Jamban	20,02	20,40	26,43	22,58
Jawa	Jamban Sendiri	69,34	75,45	78,11	84,65
	Jamban Bersama	6,58	7,12	4,43	4,46
	Jamban Umum	3,00	2,35	3,08	2,01
	Bukan Jamban	21,09	15,08	14,37	8,88
Bali dan Nusa Tenggara	Jamban Sendiri	69,69	77,00	73,09	81,40
	Jamban Bersama	2,64	2,62	4,78	3,46
	Jamban Umum	1,29	1,48	0,80	0,85
	Bukan Jamban	26,38	18,90	21,32	14,29
Kalimantan	Jamban Sendiri	78,55	81,00	58,12	60,08
	Jamban Bersama	3,72	4,33	15,00	6,19
	Jamban Umum	4,22	2,00	6,86	3,58
	Bukan Jamban	13,51	12,67	20,02	30,15
Sulawesi	Jamban Sendiri	58,02	66,52	71,50	76,50
	Jamban Bersama	4,55	3,66	3,55	3,11
	Jamban Umum	5,74	5,95	3,06	3,34
	Bukan Jamban	31,70	23,87	21,89	17,04
Maluku dan Papua	Jamban Sendiri	41,36	48,39	27,49	29,15
	Jamban Bersama	7,86	8,90	9,21	7,82
	Jamban Umum	18,28	17,44	10,42	8,14
	Bukan Jamban	32,49	25,26	52,89	54,90

jamban sendiri mengalami peningkatan selama tahun 2011-2014. Keadaan pembuangan tinja di desa maritim dan bukan maritim di keenam pulau besar tidak jauh berbeda. Pada tahun 2014, di Pulau Sumatera, sebesar 73,53 persen desa maritim memiliki sebagian besar keluarga yang sudah menggunakan jamban sendiri. Di Pulau Jawa, sebesar 75,45 persen desa maritim memiliki sebagian besar keluarga menggunakan jamban sendiri. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sebesar 77,00 persen desa maritim memiliki sebagian besar keluarga menggunakan jamban sendiri. Di Pulau Kalimantan, sebesar 81,00 persen desa maritim memiliki sebagian besar keluarga menggunakan jamban sendiri. Di Pulau Sulawesi, sebesar 66,52 persen desa maritim memiliki sebagian besar keluarga menggunakan jamban sendiri.

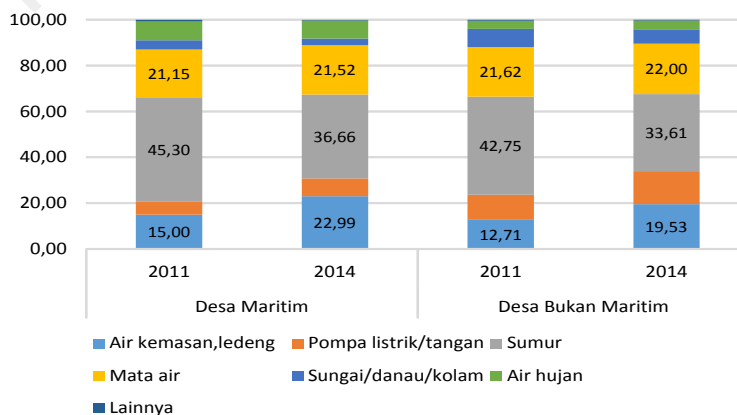
Akan tetapi desa yang ada di Pulau Maluku dan Papua masih banyak yang tidak menggunakan jamban. Pada tahun 2014, desa maritim yang menggunakan jamban sendiri terdapat sebesar 48,39 persen, yang menggunakan jamban bersama terdapat 8,90 persen, yang menggunakan jamban umum terdapat sebesar 17,44 persen, dan yang menggunakan bukan

jamban terdapat sebesar 25,26 persen. Bahkan desa bukan maritim lebih buruk keadaan pembuangan tinjanya dibandingkan desa maritim. Pada tahun 2014, desa bukan maritim yang menggunakan jamban sendiri hanya sebesar 29,15 persen desa, yang menggunakan jamban bersama terdapat 7,82 persen desa, yang menggunakan jamban umum terdapat sebesar 8,14 persen desa, dan yang menggunakan bukan jamban terdapat sebesar 54,90 persen desa.

Banyaknya keluarga di desa maritim di Pulau Maluku dan Papua yang tidak menggunakan jamban harus segera diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan mengenai pengadaan jamban yang dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan mesti diupayakan. Upaya pemerintah Maluku telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Pembangunan Provinsi Maluku (2015-2019) dilakukan dalam bidang sarana dan prasarana dengan arah dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman. Salah satu strategi dalam arah dan kebijakan tersebut adalah strategi peningkatan prasarana sanitasi.

Selain sanitasi, perumahan yang sehat juga dapat diukur dari sumber air minum. Sumber air minum ini juga merupakan indikator yang diukur dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 6 dalam SDGs menyatakan bahwa ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan harus terjamin. Salah satu target dalam tujuan tersebut adalah memastikan akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat. Akses masyarakat menuju layanan dasar terhadap air minum juga harus terjamin. Sumber air minum yang layak adalah sumber atau titik penampungan air dari alam atau terlindung dari kontaminasi. Sumber air minum yang layak meliputi, pipa pasokan air minum lokal, kran umum, tabung penampung, sumur galian, mata air terlindung, air hujan, dan air minum kemasan (Sutopo, Arthati, & Rahmi, 2014).

Gambar 3.4. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Pada tahun 2011, desa maritim di Indonesia paling banyak menggunakan air minum yang bersumber dari sumur, yaitu sebesar 45,30 persen. Kemudian, pada tahun 2014, desa maritim di Indonesia yang menggunakan air minum bersumber dari sumur menurun menjadi 36,66 persen. Peningkatan terjadi pada penggunaan air minum yang bersumber dari air kemasan/ledeng. Pada tahun 2011, desa maritim di Indonesia yang menggunakan air minum bersumber dari air kemasan/ledeng ada sebesar 15,00 persen, kemudian meningkat menjadi 22,99 persen pada tahun 2014. Bagitupun penggunaan sumber air minum di desa bukan maritim, desa bukan maritim yang menggunakan air minum bersumber dari sumur menurun sedangkan desa bukan maritim yang menggunakan air minum bersumber dari air kemasan/ledeng meningkat.

Air kemasan adalah air yang diproduksi oleh suatu perusahaan melalui proses yang higienis dan terdaftar di kementerian kesehatan. Kemudian air ledeng adalah air yang diproduksi melalui penjernihan dan penyehatan. Terjaminnya kebersihan air kemasan dan air dari ledeng membuat banyak masyarakat yang menggunakan sumber air tersebut. Selain itu, tingginya penggunaan air minum dalam kemasan disebabkan juga oleh semakin tercemarnya air dalam tanah. Konsumsi air minum dalam kemasan yang meningkat juga dikarenakan sulitnya penyediaan air layak konsumsi serta modernisasi yang menuntut kepraktisan kebutuhan hidup, sehingga terjadi pergeseran kebiasaan dan perilaku manusia (Deril & H., 2014).

Tabel 3.4. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/Pulau	Sumber Air Untuk Minum Sebagian Keluarga	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Air kemasan, ledeng	14,90	24,97	12,53	20,60
	Pompa listrik/tangan	2,99	4,85	5,01	7,78
	Sumur	56,24	45,11	57,72	48,09
	Mata air	10,68	11,46	13,30	14,21
	Sungai/danau/kolam	2,05	1,03	6,98	4,82
	Air hujan	12,28	12,18	3,97	3,84
	Lainnya	0,86	0,38	0,49	0,65
Jawa	Air kemasan, ledeng	25,02	34,99	13,89	20,69
	Pompa listrik/tangan	19,23	20,26	21,10	26,79
	Sumur	42,46	34,44	43,59	32,42
	Mata air	9,58	8,30	19,32	19,03
	Sungai/danau/kolam	0,93	0,14	0,79	0,32
	Air hujan	2,14	1,52	0,97	0,60
	Lainnya	0,64	0,35	0,33	0,16
Bali dan Nusa Tenggara	Air kemasan, ledeng	17,01	20,37	16,07	20,61
	Pompa listrik/tangan	3,50	7,33	3,45	5,00
	Sumur	39,53	32,08	22,66	19,07
	Mata air	31,09	32,15	49,81	50,22
	Sungai/danau/kolam	2,79	2,62	4,01	2,58
	Air hujan	5,15	5,31	3,50	2,45
	Lainnya	0,93	0,13	0,50	0,08

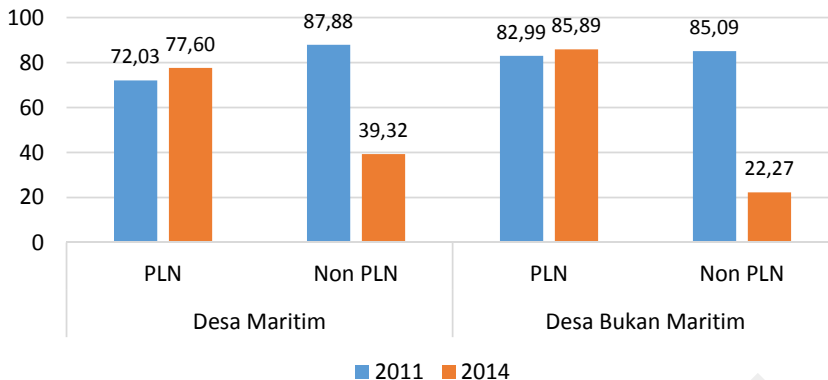
Lanjutan

Wilayah/Pulau	Sumber Air Untuk Minum Sebagian Keluarga	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan	Air kemasan, ledeng	16,05	24,67	13,35	21,64
	Pompa listrik/tangan	3,72	8,50	8,01	11,85
	Sumur	34,97	24,33	21,06	15,55
	Mata air	5,41	5,67	10,33	11,03
	Sungai/danau/kolam	8,95	5,17	36,86	29,83
	Air hujan	30,41	30,17	9,83	9,77
Sulawesi	Lainnya	0,51	1,50	0,57	0,33
	Air kemasan, ledeng	16,99	26,76	13,29	20,95
	Pompa listrik/tangan	5,83	9,42	8,19	11,72
	Sumur	39,78	29,05	42,15	33,46
	Mata air	29,44	27,75	30,21	28,17
	Sungai/danau/kolam	3,14	3,14	5,22	5,00
Maluku dan Papua	Air hujan	3,66	3,63	0,67	0,54
	Lainnya	1,16	0,25	0,25	0,15
	Air kemasan, ledeng	6,46	12,03	3,41	5,57
	Pompa listrik/tangan	2,02	2,37	0,98	1,04
	Sumur	48,72	44,22	13,70	11,06
	Mata air	24,77	26,97	54,66	52,80
Lainnya	Sungai/danau/kolam	8,15	5,29	15,90	14,27
	Air hujan	9,30	8,84	10,61	15,22
	Lainnya	0,58	0,30	0,75	0,05

Selama tahun 2011-2014, desa maritim di keenam pulau besar yang sebagian besar penduduknya menggunakan air kemasan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 10,07 persen untuk Pulau Sumatera, 9,97 persen untuk Pulau Jawa, 3,36 untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 8,62 persen untuk Pulau Kalimantan, 9,77 persen untuk Pulau Sulawesi, dan 5,57 persen untuk Pulau Maluku dan Papua. Peningkatan jumlah desa yang sebagian besar sumber air minumnya menggunakan air kemasan juga terjadi di desa bukan maritim untuk keenam pulau besar.

Pada tahun 2014, di Pulau Sumatera, persentase terbesar adalah desa yang menggunakan sumber air dari sumur, yaitu sebesar 45,11 persen untuk desa maritim dan 48,09 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian, di Pulau Jawa, persentase desa maritim terbesar yang menggunakan sumber air minum dari air kemasan, yaitu sebesar 34,99 persen, sedangkan persentase desa bukan maritim terbesar adalah yang menggunakan sumber air minum air kemasan, yaitu sebesar 34,99 persen. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, persentase desa terbesar sebagian besar keluarganya menggunakan mata air sebagai air minum, yaitu sebesar 32,15 persen untuk desa maritim dan 50,22 persen untuk desa bukan maritim. Di Pulau Kalimantan, persentase desa maritim yang terbesar adalah yang menggunakan sumber air minum dari air hujan, yaitu sebesar 30,17 persen, sedangkan persentase desa bukan maritim terbesar adalah yang menggunakan sumber air minum dari sungai/danau/kolam, yaitu sebesar 29,83 persen. Di Pulau Sulawesi, persentase desa

Gambar 3.5. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik, Tahun 2011 dan 2014



maritim yang terbesar adalah yang menggunakan sumur sebagai air minum, yaitu 29,05 persen untuk desa maritim dan 33,46 persen untuk desa bukan maritim. Di Pulau Maluku dan Papua, persentase desa maritim terbesar adalah yang menggunakan sumber air minum dari sumur, yaitu sebesar 44,22 persen, sedangkan persentase desa bukan maritim terbesar adalah yang menggunakan sumber air minum dari mata air, yaitu sebesar 52,80 persen.

Selain keadaan atau kondisi perumahan tersebut, fasilitas penunjang lainnya yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari, seperti listrik, juga perlu diperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya masyarakat tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik, baik itu untuk Pulau desa maritim maupun desa bukan maritim.

Selama tahun 2011-2014, desa dengan keberadaan keluarga pengguna listrik PLN meningkat sedangkan desa dengan keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN menurun, baik di desa maritim maupun desa bukan maritim. Selama tahun tersebut, desa dengan keberadaan keluarga pengguna listrik PLN meningkat sebesar 5,57 persen untuk desa maritim dan 2,90 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian, desa dengan keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN menurun sebesar 48,56 persen untuk desa maritim dan 62,82 persen untuk desa bukan maritim. Penurunan desa dengan keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN menunjukkan bahwa semakin berkurangnya pemanfaatan diesel/generator untuk tenaga listrik, juga berkurangnya penggunaan listrik yang diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan listrik swadaya masyarakat. Selain itu, data tersebut juga mengindikasikan bahwa desa-desa di Indonesia perlahan sudah mulai tersentuh oleh listrik negara.

Pada tahun 2014, persentase keberadaan keluarga pengguna listrik PLN untuk wilayah desa maritim sebesar 77,60 persen dan desa bukan maritim sebesar 85,89 persen. Di sisi lain, persentase keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN untuk wilayah desa maritim sebesar 39,32 persen dan desa bukan maritim sebesar 22,27 persen. Persentase desa maritim lebih kecil untuk

keberadaan keluarga pengguna listrik PLN tetapi lebih besar untuk keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat desa maritim yang mengandalkan diesel/generator, listrik yang diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan listrik swadaya masyarakat. Selain itu, desa maritim cukup lebih tertinggal dalam ketersediaan listrik PLN dibandingkan desa bukan maritim.

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa keadaan listrik di keenam pulau besar terjadi perkembangan selama tahun 2011-2014. Persentase desa yang memiliki keberadaan keluarga pengguna listrik PLN meningkat sedangkan persentase desa yang memiliki keberadaan keluarga pengguna listrik non PLN menurun. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling maju untuk mengenai keberadaan keluarga pengguna listrik dibandingkan pulau lainnya. Pada tahun 2014, desa di Pulau Jawa yang menggunakan listrik PLN terdapat sebesar 97,03 persen untuk desa maritim dan 99,93 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian desa di Pulau Jawa yang menggunakan listrik non PLN terdapat sebesar 8,37 persen untuk desa maritim dan 2,46 persen untuk desa bukan maritim.

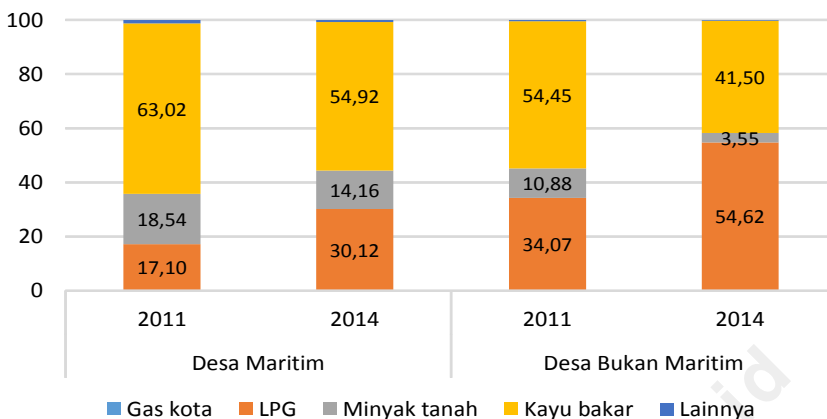
Akan tetapi, Wilayah/Pulau Maluku dan Papua masih memiliki kesenjangan mengenai ketersediaan tenaga listrik dengan wilayah/pulau lainnya. Pada tahun 2014, desa di Pulau Maluku dan Papua yang menggunakan listrik PLN terdapat sebesar 50,72 persen untuk desa maritim dan 20,46 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian desa di Pulau Maluku dan Papua yang menggunakan listrik non PLN terdapat sebesar 56,27 persen untuk desa maritim dan 42,83 untuk desa bukan maritim. Masih banyak masyarakat di

Tabel 3.5. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Berdasarkan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/Pulau	Keluarga Pengguna Listrik	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	PLN	77,65	83,08	87,18	92,24
	Non PLN	82,32	39,15	83,27	24,18
Jawa	PLN	96,43	97,03	99,87	99,93
	Non PLN	91,92	8,37	90,88	2,46
Bali dan Nusa Tenggara	PLN	68,41	87,76	66,56	86,51
	Non PLN	90,49	34,77	90,91	36,24
Kalimantan	PLN	79,22	78,33	65,09	67,94
	Non PLN	91,72	50,33	92,38	52,48
Sulawesi	PLN	80,48	84,17	81,08	87,10
	Non PLN	93,53	37,61	92,45	31,37
Maluku dan Papua	PLN	45,08	50,72	16,60	20,46
	Non PLN	81,93	56,27	39,55	42,83

Gambar 3.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014



Pulau Maluku dan Papua yang hanya dapat mengandalkan keberadaan listrik non PLN. Namun demikian, keadaan tenaga listrik di desa maritim di Pulau Maluku dan Papua lebih maju dibandingkan di desa bukan maritim.

Namun demikian, penggunaan air kemasan di Pulau Maluku dan Papua masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 12,03 persen untuk desa maritim dan 5,57 persen untuk desa bukan maritim pada tahun 2014. Rendahnya penggunaan air kemasan di daerah timur tersebut dapat disebabkan oleh sulitnya memperoleh air dalam kemasan. Di daerah pegunungan Papua, harga air minum kemasan isi 1,5 liter mencapai Rp 25.000,- (PUSAKA, 2012).

Selama tahun 2011-2014, persentase desa maritim dan bukan maritim yang menggunakan kayu bakar dan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak semakin menurun sedangkan persentase desa maritim dan bukan maritim yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak semakin meningkat. Desa yang menggunakan kayu bakar menurun sebesar 8,10 persen untuk desa maritim dan 12,95 persen untuk desa bukan maritim. Desa yang menggunakan minyak tanah menurun sebesar 4,38 persen untuk desa maritim dan 7,33 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian, desa yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar meningkat sebesar 13,02 persen untuk desa maritim, dan 20,55 persen untuk desa bukan maritim. Menurunnya penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar disebabkan oleh pembatasan subsidi minyak tanah akibat dari terbatasnya bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Namun, peningkatan desa maritim yang menggunakan LPG lebih kecil dibandingkan desa bukan maritim. Tidak hanya itu, penurunan desa maritim yang menggunakan kayu bakar dan minyak tanah juga lebih kecil dibandingkan desa bukan maritim. Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk desa maritim

masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Di sisi lain, pada tahun 2014, sebagian besar penduduk desa bukan maritim sudah menggunakan LPG untuk memasak. Tingginya penggunaan kayu bakar di desa maritim disebabkan karena tersedianya sumber daya alam tersebut. Hutan bakau yang tumbuh di kawasan pesisir memiliki banyak kegunaan. Selain berfungsi untuk melindungi kawasan pesisir dari bencana alam, hutan bakau juga menawarkan dan menyediakan kayu bakar (Quaile, 2013). Namun demikian, kelestarian hutan bakau juga perlu diperhatikan mengingat manfaatnya bagi kelangsungan hidup biota laut sekitarnya. Sejak 1999-2005, hutan bakau itu sudah berkurang sebanyak 5,58 juta hektar atau sekitar 64 persennya. Hilangnya mangrove tersebut juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Hutan bakau tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga memiliki fungsi ekonomis yang berpengaruh terhadap tangkapan ikan, kepiting, serta kerang (Samantha, 2012).

Tabel 3.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/Pulau	Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh sebagian besar keluarga	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Gas kota	0,16	0,00	0,20	0,20
	LPG	17,72	48,62	24,75	59,00
	Minyak tanah	34,18	15,89	20,32	3,47
	Kayu bakar	45,48	34,61	53,99	36,99
	Lainnya	2,46	0,88	0,73	0,33
Jawa	Gas kota	0,43	0,14	0,34	0,13
	LPG	66,55	75,17	64,10	76,08
	Minyak tanah	1,29	0,07	0,18	0,08
	Kayu bakar	31,74	24,62	35,32	23,71
	Lainnya	0,00	0,00	0,06	0,00
Bali dan Nusa Tenggara	Gas kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	LPG	7,72	13,85	7,63	20,16
	Minyak tanah	13,37	13,18	13,54	8,08
	Kayu bakar	78,91	72,97	78,76	71,76
	Lainnya	0,00	0,00	0,06	0,00
Kalimantan	Gas kota	0,00	0,33	0,00	0,03
	LPG	31,93	53,00	10,00	39,28
	Minyak tanah	25,84	24,50	16,21	10,29
	Kayu bakar	42,06	22,00	73,73	50,40
	Lainnya	0,17	0,17	0,06	0,00
Sulawesi	Gas kota	0,00	0,00	0,00	0,01
	LPG	11,32	26,98	17,56	43,56
	Minyak tanah	20,65	17,15	15,41	4,39
	Kayu bakar	65,31	53,88	65,65	51,02
	Lainnya	2,72	1,98	1,37	1,02
Maluku dan Papua	Gas kota	0,00	0,07	0,00	0,04
	LPG	0,00	0,00	0,06	0,18
	Minyak tanah	12,01	14,22	5,82	6,71
	Kayu bakar	87,99	85,71	94,03	93,03
	Lainnya	0,00	0,00	0,09	0,05

Keadaan penggunaan bahan bakar untuk memasak berdasarkan wilayah/pulau tidak jauh berbeda dengan keadaan secara nasional. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar memasak mengalami peningkatan selama tahun 2011-2014, di desa maritim dan bukan maritim untuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2014, sebagian besar desa di Pulau Sumatera menggunakan LPG untuk memasak, yaitu sebesar 48,62 persen untuk desa maritim dan 59,00 persen untuk desa bukan maritim. Sebagian besar desa di Pulau Jawa menggunakan LPG untuk memasak, yaitu sebesar 75,17 persen untuk desa maritim dan 76,08 persen untuk desa bukan maritim. Kemudian, sebagian besar desa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, yaitu sebesar 72,97 persen untuk desa maritim dan 71,76 persen untuk desa bukan maritim. Untuk Pulau Kalimantan, sebagian besar desa maritim menggunakan LPG untuk memasak, yaitu sebesar 53,00 persen sedangkan sebagian besar desa bukan maritim menggunakan kayu bakar untuk memasak, yaitu sebesar 50,40 persen. Kemudian, untuk Pulau Sulawesi, sebagian besar desanya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, yaitu sebesar 53,88 persen untuk desa maritim dan 51,02 persen untuk desa bukan maritim.

Akan tetapi, untuk Pulau Maluku dan Papua penggunaan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak masih sangat minim, terutama untuk desa maritim. Pada tahun 2011 dan 2014 tidak ada desa maritim yang sebagian besar keluarganya menggunakan LPG untuk bahan bakar memasak. Di sisi lain, desa bukan maritim yang sebagian besar keluarganya menggunakan LPG ada sebesar 0,06 persen pada tahun 2011 menjadi 0,18 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2014, sebagian besar desa di wilayah tersebut menggunakan kayu bakar untuk memasak, yaitu sebesar 85,71 persen untuk desa maritim dan 93,03 persen untuk desa bukan maritim. Minimnya penggunaan LPG dan tingginya penggunaan kayu bakar di desa maritim Pulau Maluku dan Papua dapat disebabkan oleh kawasan hutan yang menutupi sebagian besar wilayahnya. Dengan demikian, banyak masyarakat desa maritim yang memanfaatkan potensi hutan dengan menggunakan kayunya sebagai bahan bakar. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang masih menganggap bahwa penggunaan kayu bakar lebih praktis dan aman dibandingkan penggunaan LPG sebagai bahan bakar. Terlebih lagi, kondisi perekonomian masyarakat desa maritim yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih kayu bakar yang tidak memerlukan biaya besar dibandingkan LPG yang harus dibeli dan menambah pengeluaran mereka.

Masih banyak desa maritim yang tertinggal dalam sarana dan prasarana perumahan, terutama untuk wilayah/pulau Maluku dan Papua. Keadaan ekonomi masyarakat desa maritim mendukung tertinggalnya sarana dan prasarana perumahan mereka. Sanitasi yang layak dan sehat di desa maritim perlu diperhatikan kembali. Pemerintah dapat membangun jamban umum di beberapa titik desa maritim. Selain itu, akses masyarakat desa maritim untuk mendapatkan air minum yang sehat dan bersih juga perlu ditinjau. Tidak hanya itu, kebutuhan masyarakat desa maritim akan tenaga listrik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari juga masih ada yang belum terpenuhi. Perumahan yang

sehat juga dapat dilihat dari keadaan lingkungan yang dipengaruhi juga oleh penggunaan bahan bakar untuk memasak. Terdapat desa maritim di beberapa wilayah/pulau yang banyak menggunakan kayu bakar. Dengan demikian, pemerintah perlu memperhatikan kembali dan mengadakan penyuluhan ke desa tersebut, terkait kebijakan konversi ke LPG.

3.3. Fasilitas Pendidikan

Permasalahan lingkungan banyak ditemui di daerah pesisir, seperti kelebihan tangkap (*over fishing*), perusakan hutan mangrove dan terumbu karang, serta bencana di daerah pesisir. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Harahap, 2015). Penyiapan SDM yang dapat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia harus diperhatikan terutama terkait dengan pembangunan revolusi mental yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dewasa ini. Pembangunan revolusi mental harus mampu menanamkan orientasi karakteristik maritim. Dengan parameter yang tepat untuk revolusi mental berkarakteristik maritim, pembangunan maritim Indonesia dapat terlaksana secara substansial (Aonullah, 2015).

Untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim adalah dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur. Kebijakan pengembangan infrastruktur sangat penting sebagai landasan bagi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (Kumastanto dan Satria). Pemerataan infrastruktur akan mengurangi ketimpangan terutama dalam hal kemiskinan. Kenyataannya, desa pesisir di Indonesia masih dihadapi dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Pada tahun 2010, kemiskinan di 10.640 desa pesisir mencapai 7,8 juta jiwa (Pelita, 2011).

Minimnya Fasilitas Pendidikan Di Desa Maritim

Infrastruktur untuk fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian khusus dalam program Pengembangan Desa Pesisir Terpadu (PDPT). PDPT merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan, kemandirian, dan ketanggapan masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir. PDPT mencakup lima fokus kegiatan bina, yaitu bina usaha, bina sumber daya, bina lingkungan/infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim (Anggraini, Domai, & Said, 2015).

Infrastruktur yang mendasar, salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang memadai dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting sebagai faktor pendukung terlaksananya pembangunan desa maritim. Meningkatnya kualitas masyarakat maritim akan sangat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam yang ditawarkan oleh wilayah pesisir.

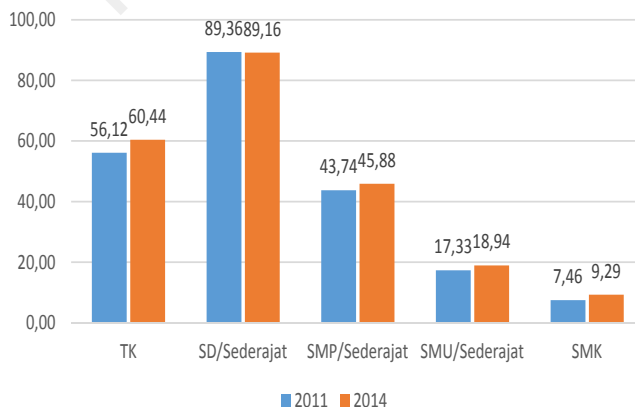
Apalagi berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan *Community Based Management* (CBM), masyarakat lokal pesisir harus memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk

mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat lokal dapat meningkatkan peranannya dalam melakukan perlindungan sumber alam di sekitarnya. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat dari pendidikan yang telah mereka miliki. Dahuri (2003) menyatakan bahwa sosial merupakan salah satu dimensi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya keanekaragaman hayati laut. Tingkat pendidikan merupakan indikator cakupan dalam dimensi sosial tersebut (Harahap, 2015). Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat ini didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan peningkatan pendidikan yang merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat (H. Mardjoeki, 2012).

Namun kenyataannya, masih banyak ditemui masyarakat pesisir yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir dapat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Jauh dan sulitnya mengakses fasilitas pendidikan yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup banyak akan sangat membebani masyarakat pesisir di bidang pendidikan (Wasak, 2012). Kondisi pendidikan masyarakat pesisir yang cukup memprihatinkan menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi penduduk di desa-desa pesisir dan desa di pulau-pulau kecil, dan desa terluar Indonesia (Nainggolan, 2012).

Gambar 3.7 menunjukkan dari tahun 2011-2014 bahwa persentase desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan sebagian besar mengalami peningkatan. Selama tahun 2011-2014, desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) meningkat sebesar 4,32 persen. Akan tetapi, desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat mengalami penurunan yaitu sebesar 0,20 persen desa. Kemudian, desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Gambar 3.7 Persentase Desa Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014



Sumber: Potensi Desa Tahun 2011 dan 2014

(SMP)/sederajat juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,14 persen desa. Begitupun untuk fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan tersebut juga mengalami peningkatan.

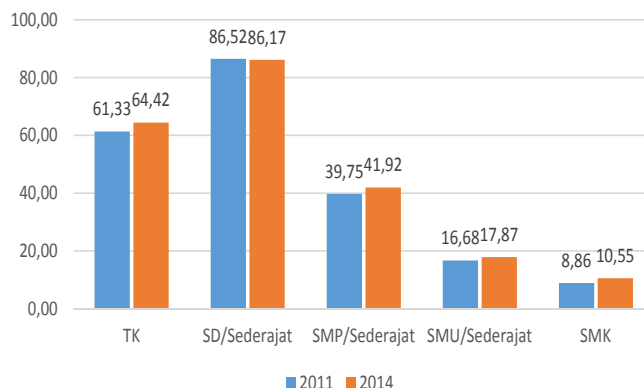
Peningkatan pelayanan dalam infrastruktur fasilitas pendidikan tersebut dapat terjadi karena banyaknya desa yang mengalami pemekaran selama tahun 2011-2014. Pemekaran desa tersebut telah diiringi dengan pembangunan fasilitas pendidikan di desa yang baru. Pemekaran suatu wilayah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah,
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah,
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban,
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pelayanan publik biasanya merupakan alasan utama dilakukannya pemekaran suatu wilayah. Pemekaran dapat mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan tersebut telah terlihat pada pelayanan publik untuk fasilitas pendidikan di tingkat desa maritim.

Peningkatan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan tak hanya terjadi pada desa maritim tetapi juga terjadi pada desa bukan maritim (Gambar 3.8). Selama tahun 2011-2014, desa bukan maritim yang memiliki fasilitas pendidikan TK, SMP/sederajat, SMU/sederajat, dan SMK mengalami

Gambar 3.8 Persentase Desa Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014



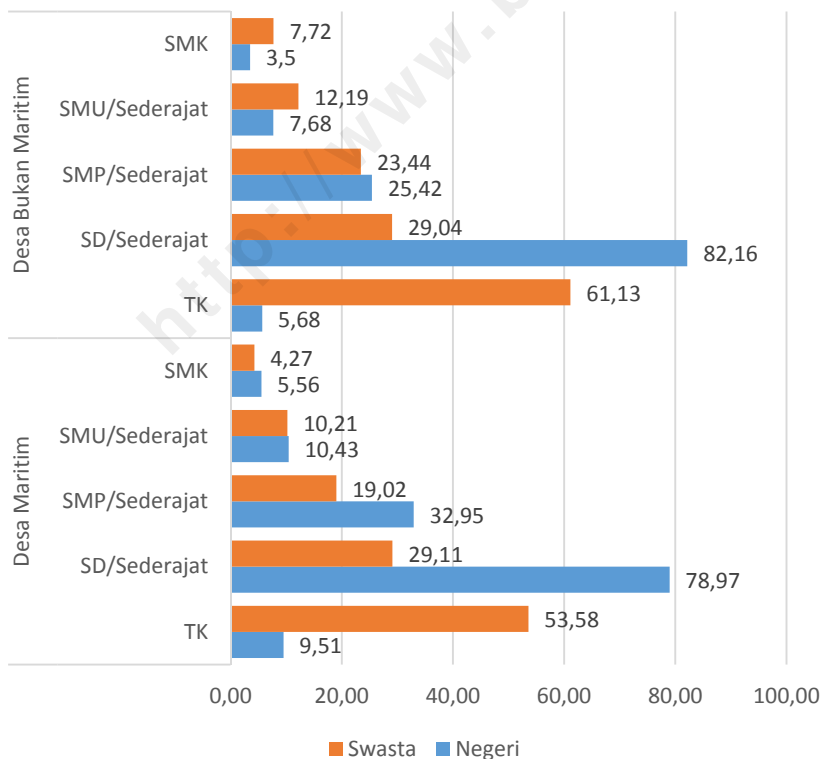
Sumber: Potensi Desa Tahun 2011 dan 2014

peningkatan masing-masing sebesar 3,09 persen, 2,18 persen, 1,19 persen, dan 1,69 persen. Di sisi lain, jumlah desa bukan maritim yang memiliki fasilitas SD/ sederajat menurun sebesar 0,35 persen desa.

Peningkatan terbesar terjadi pada fasilitas TK. Di tahun 2014, fasilitas pendidikan TK sudah mulai ditemui di banyak desa. Desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan TK ada sebanyak 60,44 persen dan desa bukan maritim yang memiliki fasilitas pendidikan TK ada sebanyak 64,42 persen. Pendidikan (TK) cukup penting untuk menyiapkan generasi penerus yang terdidik. Akan tetapi, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah ini masih kurang memadai dan kurang layak untuk pendidikan anak-anak, terutama di wilayah pedesaan. Misalnya untuk wilayah Pesisir di Jawa Tengah, Sekolah TK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menghadapi masalah keterbatasan dana yang berimbas pada kurangnya fasilitas gedung sekolah dan alat pembelajaran untuk anak. Selain itu, tenaga pendidikan di TK kecamatan tersebut juga masih banyak yang memerlukan pembinaan dan bantuan (Muin, 2015).

Fasilitas pendidikan yang biasa tersedia sampai tingkat desa adalah Sekolah Dasar. Akan tetapi, pada tahun 2014, persentase desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan SD/ sederajat negeri lebih kecil dibandingkan

Gambar 3.9 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Swasta dan Negeri, Tahun 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2014

persentase desa bukan maritim. Di tahun 2014, desa maritim yang memiliki fasilitas pendidikan SD/ sederajat negeri ada sebanyak 78,97 persen, sedangkan desa bukan maritim yang memiliki fasilitas pendidikan tersebut ada sebanyak 82,16 persen. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat di desa maritim yang tidak dapat mengenyam pendidikan gratis untuk bersekolah tingkat SD. Masyarakat di desa maritim yang tidak memiliki SD negeri, terpaksa harus bersekolah di SD swasta yang mungkin menuntut pembayaran. Atau bahkan, masyarakat tersebut harus pergi ke desa tetangga yang mungkin memiliki akses yang sulit.

Kemudian, masih banyak desa baik desa maritim maupun desa bukan maritim yang tidak memiliki SMP/ sederajat, SMU/ sederajat, dan SMK. Pada tahun 2014, hanya sebanyak 32,95 persen desa maritim dan 25,42 persen desa bukan maritim yang memiliki fasilitas pendidikan SMP/ sederajat negeri serta sebanyak 19,02 persen desa maritim dan 23,44 persen desa bukan maritim yang memiliki SMP/ sederajat swasta. Kemudian desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMU/ sederajat negeri hanya sebanyak 10,43 persen untuk desa maritim dan 7,68 persen untuk desa bukan maritim serta desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMU/ sederajat swasta ada sebanyak 10,29 persen untuk desa maritim dan 12,19 untuk desa bukan maritim. Ketersediaan fasilitas pendidikan SMK lebih minim dibandingkan fasilitas pendidikan SMU/ sederajat. Desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMK negeri ada sebanyak 5,56 persen untuk desa maritim dan 3,5 persen untuk desa bukan maritim serta desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMK swasta ada sebanyak 4,27 persen untuk desa maritim dan 7,72 untuk desa bukan maritim.

Minimnya fasilitas pendidikan di jenjang SMP, SMU, dan SMK ini mengakibatkan banyak anak Indonesia baik di desa maritim maupun di desa bukan maritim tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Daerah yang terpencil, terpencar, dan terisolir umumnya belum banyak memiliki fasilitas SMP, SMU, dan SMK. Sulitnya menjangkau sarana pendidikan ditambah dengan pola beberapa masyarakat di desa maritim yang masih tradisional, menyebabkan kurangnya motivasi bagi anak-anak di desa pesisir untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak tersedianya fasilitas SMP, SMU, dan SMK di desa dapat disebabkan karena tidak adanya biaya, sarana dan prasarana pembangunan, atau bahkan jumlah lulusan SD di desa tersebut relatif sedikit. Untuk memberikan pelayanan pendidikan SMP di daerah tersebut, pemerintah membentuk kebijakan berupa program SD-SMP Satu Atap. Program tersebut bertujuan untuk mendekatkan SMP ke lokasi terkonsentrasi pada anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu di SD yang sudah ada (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Selain itu, dari persentase keberadaan fasilitas pendidikan berdasarkan jenis lembaga pendidikan (negeri/swasta) menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan SMU/ sederajat dan SMK di desa maritim lebih cenderung sebagai lembaga pendidikan negeri, sedangkan fasilitas pendidikan SMU/ sederajat dan SMK di desa bukan maritim lebih cenderung sebagai lembaga pendidikan

Tabel 3.7. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/Pulau	Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh sebagian besar keluarga	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Taman Kanak-Kanak	45,03	52,10	42,50	48,68
	Sekolah Dasar/Sederajat	82,85	82,85	77,64	78,61
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	39,17	39,95	33,79	35,73
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	17,77	17,61	15,13	16,24
	Sekolah Menengah Kejuruan	7,12	7,91	6,37	7,46
Jawa	Taman Kanak-Kanak	89,35	91,91	89,47	91,86
	Sekolah Dasar/Sederajat	98,78	98,76	99,25	99,27
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	59,90	62,52	50,59	53,44
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	25,09	28,70	21,70	23,70
	Sekolah Menengah Kejuruan	11,37	15,42	14,26	17,68
Bali dan Nusa Tenggara	Taman Kanak-Kanak	63,33	63,48	54,86	54,42
	Sekolah Dasar/Sederajat	96,07	96,70	97,24	96,98
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	46,82	52,66	43,93	48,65
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	17,51	20,24	17,97	20,63
	Sekolah Menengah Kejuruan	9,08	11,90	8,55	9,75
Kalimantan	Taman Kanak-Kanak	56,57	75,17	48,15	59,40
	Sekolah Dasar/Sederajat	94,91	97,17	95,60	92,90
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	43,28	62,00	37,07	41,34
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	14,20	24,00	11,56	14,47
	Sekolah Menengah Kejuruan	6,91	13,00	4,35	6,22
Sulawesi	Taman Kanak-Kanak	68,67	72,94	69,20	73,44
	Sekolah Dasar/Sederajat	90,42	89,48	90,48	90,46
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	43,56	45,46	40,81	44,30
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	15,13	17,21	15,46	16,13
	Sekolah Menengah Kejuruan	6,53	8,37	6,42	7,61
Maluku dan Papua	Taman Kanak-Kanak	27,73	33,34	10,29	13,40
	Sekolah Dasar/Sederajat	84,39	84,40	41,76	41,46
	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	35,20	37,09	10,74	11,82
	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	14,21	15,90	4,09	4,17
	Sekolah Menengah Kejuruan	5,48	6,67	2,19	2,10

swasta. Lebih tingginya persentase desa maritim yang memiliki SMU/ sederajat dan SMK negeri dibandingkan yang memiliki SMU/ sederajat dan SMK swasta menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas pendidikan di daerah tersebut lebih besar dibandingkan perhatian pihak swasta. Apalagi terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun.

Jika dilihat berdasarkan wilayah/pulau di Indonesia, desa maritim yang berada di Pulau Jawa lebih baik dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan dibandingkan desa maritim di pulau lainnya. Sebesar 91,91 persen desa maritim di Pulau Jawa memiliki sekolah TK, sebesar 98,76 persen desa maritim di pulau Jawa memiliki fasilitas SD, sebesar 62,52 persen desa maritim di Pulau Jawa memiliki fasilitas SMP, sebesar 28,70 persen desa maritim di

Pulau Jawa memiliki fasilitas SMU, dan sebesar 15,42 persen desa maritim di Pulau Jawa memiliki fasilitas SMK. Kemudian, wilayah/pulau berikutnya yang lebih maju di bidang fasilitas pendidikan adalah Pulau Kalimantan, dengan desa maritim yang memiliki fasilitas tingkat TK sebesar 75,17 persen, desa maritim yang memiliki fasilitas tingkat SD sebesar 97,17 persen, desa maritim yang memiliki fasilitas tingkat SMP sebesar 62,00 persen, desa maritim yang memiliki fasilitas tingkat SMU ada sebesar 24,00 persen, dan desa maritim yang memiliki fasilitas tingkat SMK ada sebesar 13,00 persen. Selama tahun 2010-2011, perkembangan fasilitas pendidikan di desa maritim terjadi cukup signifikan. Persentase desa maritim di Pulau Kalimantan yang memiliki fasilitas TK meningkat sebesar 18,60 persen dan yang memiliki fasilitas SMP/ sederajat meningkat sebesar 18,72 persen.

Selain itu, fasilitas pendidikan di desa maritim wilayah/Pulau Jawa juga mengalami perkembangan selama tahun 2011-2014. Selama tahun tersebut, desa maritim di wilayah/Pulau Jawa yang memiliki TK meningkat sebesar 2,56 persen, yang memiliki SMP meningkat sebesar 2,62 persen, yang memiliki SMU meningkat sebesar 3,61 persen, dan yang memiliki SMK meningkat sebesar 4,05 persen. Akan tetapi, desa maritim di wilayah/Pulau Jawa yang memiliki SD menurun sebesar 0,03 persen. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan proses pendidikan di wilayah tersebut telah dilakukan dengan cukup baik. Pemerintah daerah telah mengupayakan untuk memajukan daerah maritim dengan meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Akan tetapi, meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup dengan membangun sarananya saja. Prasarana pendukung kegiatan pendidikan lainnya, seperti kualitas tenaga pengajar, buku pelajaran, dan alat bantu mengajar juga perlu diperhatikan. Selain itu, pendidikan juga harus ditunjang dengan akses untuk mencapai sekolah yang memadai.

Di sisi lain, desa maritim yang cukup tertinggal dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah/Pulau Maluku dan Papua. Meskipun selama tahun 2010-2014, persentase desa di Pulau Maluku dan Papua yang memiliki fasilitas pendidikan meningkat, peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014, desa maritim di wilayah/Pulau Maluku dan Papua yang memiliki TK ada sebanyak 33,34 persen, yang memiliki SD sebanyak 84,40 persen, yang memiliki SMP negeri sebanyak 37,09 persen, yang memiliki SMU hanya sebanyak 15,90 persen, dan yang memiliki SMK sebanyak 6,67 persen saja. Hal tersebut menyebabkan kualitas SDM desa maritim di Pulau Maluku dan Papua lebih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Pendidikan anak-anak desa pesisir atau anak-anak nelayan harus diperbaiki agar anak-anak tersebut ahli dalam perikanan dan mampu menjadi profesional dalam bidang profesi yang bervariasi. Dengan demikian, anak-anak desa pesisir dapat menjadikan masyarakat nelayan yang lebih modern. Oleh karena tertinggalnya wilayah timur tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan kegiatan/pembangunan pendidikan yang berdimensi kewilayahan (memfokuskan kepada wilayah timur Indonesia) seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Kemudian desa maritim yang berada pada posisi terbawah kedua berada di wilayah/Pulau Sumatera. Sebagian besar desa maritim di Pulau Sumatera belum memiliki fasilitas pendidikan SMP dan SMA. Minimnya fasilitas pendidikan seperti yang terjadi di Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir, desa tersebut hanya memiliki Sekolah Dasar dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Sementara bagi anak desa tersebut yang ingin melanjutkan ke SMP, mereka harus pergi ke desa Selatpanjang yang jarak tempuhnya cukup jauh. Dengan demikian, banyak anak-anak Desa Beting yang lebih memilih tidak bersekolah (Roy, 2014).

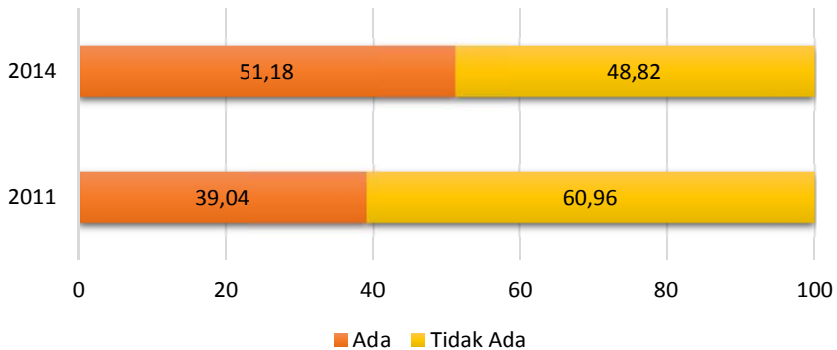
Partisipasi Masyarakat Maritim Untuk Pembangunan Pendidikan

Pendidikan yang rendah sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen tersebut. Pemberdayaan masyarakat tersebut adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Program pemberdayaan masyarakat mengajak seluruh anggota masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan desanya. Program tersebut juga menyediakan dana untuk masyarakat desa. Kemudian, masyarakat desa mengelolanya secara mandiri dan dapat digunakan untuk membangun sarana/prasarana desa, kegiatan ekonomi, dan atau kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini beragam, dapat berupa pembangunan/perbaikan infrastruktur (sarana/prasarana) lingkungan, peningkatan kapasitas perekonomian, dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan (SDM). Sarana pendidikan, seperti gedung sekolah atau sarana pendukung lainnya merupakan salah satu infrastruktur yang dilakukan pembangunan/perbaikan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Selama tahun 2011-2014, desa maritim yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan/perbaikan infratraktur di bidang pendidikan meningkat sebesar 12,14 persen. Partisipasi aktif dari masyarakat akan menciptakan pembangun pendidikan yang lebih tepat sasaran. Masyarakat di desa maritim dapat menyampaikan aspirasi sehingga masyarakat berperan penting dalam pembangunan atau dikenal sebagai subjek pembangunan. Pada tahun 2014, dari seluruh desa maritim baru 51,18 persen desa maritim saja yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur di bidang pendidikan selama tiga tahun terakhir. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan dapat menunjukkan adanya kerjasama antar sesama masyarakat dan kelembagaan di desa maritim yang terintegrasi untuk mengembangkan fasilitas pendidikan di desanya. Dengan begitu, fasillitas pendidikan akan

Gambar 3.10 Persentase Desa Maritim Menurut Adanya Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur di Bidang Pendidikan, Tahun 2011 dan 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

lebih layak atau pemerataan pembangunan sehingga pendidikan dapat lebih terjangkau bagi daerah yang terpencil dan terisolir. Hal tersebut juga dapat mempercepat kemajuan bidang pendidikan di desa-desa maritim yang tertinggal. Namun demikian, masih banyak desa maritim yang tidak memiliki jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Padahal hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat jika terdapat keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program tersebut.

Selanjutnya, dari Tabel 3.8 menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2014, desa yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan/perbaikan infrastruktur di bidang pendidikan di keenam wilayah/pulau mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2014, desa maritim di wilayah/Pulau Maluku dan Papua yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih sangat rendah, yaitu sebesar 39,19 persen desa. Padahal keterlibatan masyarakat adalah cara yang efektif dalam pembangunan pendidikan karena adanya kesesuaian antara

Tabel 3.8. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Pulau	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
	2011	2014	2011	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	30,37	42,55	25,27	37,29
Jawa	49,04	66,39	52,31	68,86
Bali dan Nusa Tenggara	57,11	67,92	53,61	63,08
Kalimantan	45,10	66,00	33,70	51,08
Sulawesi	41,03	52,09	37,29	49,27
Maluku dan Papua	28,89	39,19	20,92	23,12
Indonesia	39,04	51,18	38,06	50,84

yang dibangun dengan yang dibutuhkan. Putnam (1993) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, termasuk dalam membangun infrastruktur perdesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama (Nur, Bulkis, & Naping, 2011). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan akan dapat mencapai pembangunan yang menghilangkan kesenjangan pendidikan di daerah timur Indonesia terutama untuk wilayah maritimnya.

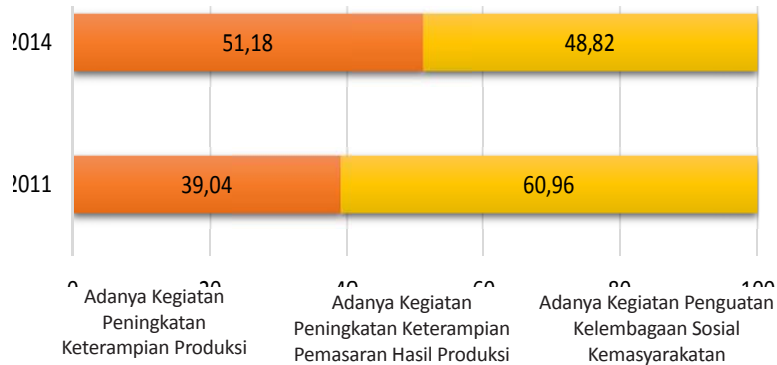
Namun demikian, persentase desa maritim yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih tinggi dibandingkan desa bukan maritim, yaitu 51,18 untuk desa maritim dan 50,84 untuk desa bukan maritim. Begitupun juga untuk di wilayah/pulau Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua, persentase desa maritim yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih besar dibandingkan desa bukan maritim. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat desa maritim lebih partisipatif untuk ikut serta dalam hal pengembangan infrastruktur pendidikan dibandingkan masyarakat di desa bukan maritim.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan (SDM)

Adanya pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan juga dapat membenahi masyarakat desa maritim dalam hal pengelolaan sumber daya pesisir. Akan tetapi, keberadaan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan masih sangat minim di desa maritim. Pada tahun 2014, desa maritim yang memiliki kegiatan peningkatan keterampilan produksi hanya sebesar 14,58 persen. Kemudian desa maritim yang memiliki peningkatan keterampilan pemasaran hasil produksi hanya sebesar 6,00 persen, dan desa maritim yang memiliki penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan ada sebesar 11,00 persen. Meskipun demikian, selama tahun 2011-2014, desa maritim yang memiliki kegiatan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan sudah mulai meningkat, yaitu sebesar 5,19 persen desa yang memiliki kegiatan peningkatan keterampilan produksi, 2,49 persen desa yang memiliki kegiatan peningkatan keterampilan pemasaran hasil produksi, dan 3,68 persen desa yang memiliki kegiatan penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan terutama berkaitan dengan keterampilan produksi di desa maritim masih sangat jarang. Padahal, kegiatan keterampilan produksi di desa maritim dapat mewujudkan peningkatan produksi perikanan dan menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki mutu terjamin, mampu bersaing, dan memiliki nilai tambah. Dengan keadaan tersebut, produksi perikanan di desa maritim mampu memenuhi agenda Nawacita keenam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Selain itu dengan adanya kegiatan peningkatan keterampilan produksi perikanan akan mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)

Gambar 3.11 Persentase Desa Maritim Menurut Keberadaan Peningkatan Kapasitas Sosial Kemasyarakatan, Tahun 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2011 dan 201

di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Keterampilan masyarakat desa maritim juga harus dilatih untuk mengoptimalkan potensi kelautan untuk wisata bahari. Selama ini, masyarakat desa maritim dikalahkan oleh investor asing dalam mengelola potensi kelautan untuk wisata bahari, dimana terdapat lebih dari 50 pulau di Indonesia yang pusat wisata baharinya dikelola oleh investor asing (Koran Jakarta, 2014). Dengan adanya pendidikan kelautan yang mengasah keterampilan masyarakat desa maritim menjadi wirausaha, mereka akan memiliki keterampilan yang lengkap untuk memanfaatkan potensi laut menjadi wisata bahari, bukan menjadi pekerja yang melayani investor asing.

3.4. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat diperhatikan dalam pembangunan sosial. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan suatu daerah difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar publik. Salah satu yang termasuk dalam pelayanan dasar publik adalah kesehatan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dasar publik tersebut.

Sarana Kesehatan Di Desa Maritim Masih Terbatas

Pada tahun 2010, pengelolaan sampah yang buruk dan kebiasaan masyarakat dengan membuang sampah sembarangan menyebabkan sekitar 8 juta metrik ton plastik berakhir di laut (Purnama, 2015). Kondisi ini menghasilkan limbah yang dapat menjadi polutan. Kemudian, polutan tersebut kemungkinan akan sampai ke daerah pesisir. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat di daerah pesisir. Masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki resiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan.

Keberadaan wilayah/desa yang terletak di daerah pesisir berdampak pada minimnya fasilitas, termasuk fasilitas kesehatan. Begitu pun yang terjadi di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur yang belum memiliki layanan kesehatan seperti puskesmas. Penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus menempuh perjalanan menggunakan perahu kecil selama 45 menit. Jika tidak ingin menempuh lamanya perjalanan, penduduk harus menunggu kedatangan dokter dari Puskesmas Keliling yang dijadwalkan berkunjung setiap satu bulan sekali (Nawir & Darwis, 2015). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa daerah pesisir perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

Pembangunan, khususnya upaya pembangunan kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif serta didukung upaya kuratif atau rehabilitatif dan upaya penyehatan lingkungan. Hendrik L Blum menyatakan bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, perilaku,

Tabel 3.9. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Fasilitas Sarana Kesehatan Pendidikan dan Wilayah/Pulau, Tahun 2011 dan 2014

[Diolah dari Pendataan POTENSI DESA 2011 dan 2014]

Wilayah/Pulau	Sarana Kesehatan	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Puskesmas	12,48	12,38	9,42	10,12
	Puskesmas pembantu	35,86	36,75	27,63	29,44
	Poliklinik/balai pengobatan	6,63	7,30	6,98	8,31
	Tempat praktek dokter	13,67	13,29	12,12	12,84
	Tempat praktek bidan	31,64	33,12	42,08	46,04
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	25,42	31,25	38,02	40,84
	Polindes (pondok bersalin desa)	19,44	19,75	13,97	15,49
Jawa	Puskesmas	14,58	15,28	13,54	13,94
	Puskesmas pembantu	27,73	30,08	23,93	25,72
	Poliklinik/balai pengobatan	10,44	13,07	14,73	16,96
	Tempat praktek dokter	26,59	27,32	27,97	29,92
	Tempat praktek bidan	82,13	85,27	84,39	86,22
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	43,10	53,04	47,28	53,04
	Polindes (pondok bersalin desa)	32,59	38,80	23,98	29,56
Bali dan Nusa Tenggara	Puskesmas	15,15	15,53	11,49	11,81
	Puskesmas pembantu	40,53	42,64	37,90	37,50
	Poliklinik/balai pengobatan	3,57	4,30	3,80	4,04
	Tempat praktek dokter	16,15	15,13	16,75	15,49
	Tempat praktek bidan	19,94	18,96	24,41	20,77
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	24,16	28,58	28,81	32,69
	Polindes (pondok bersalin desa)	29,02	26,70	27,53	26,76
Kalimantan	Puskesmas	19,09	21,17	11,51	12,26
	Puskesmas pembantu	45,27	50,17	38,98	43,44
	Poliklinik/balai pengobatan	6,42	7,17	3,49	5,04
	Tempat praktek dokter	16,05	18,00	9,83	10,88
	Tempat praktek bidan	34,63	33,83	24,91	28,99
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	28,55	33,17	29,00	36,61
	Polindes (pondok bersalin desa)	19,76	27,83	17,62	22,18

Lanjutan

Wilayah/Pulau	Sarana Kesehatan	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi	Puskesmas	13,00	13,22	11,10	11,87
	Puskesmas pembantu	29,80	32,24	30,89	33,07
	Poliklinik/balai pengobatan	1,49	2,01	2,19	2,82
	Tempat praktek dokter	8,79	9,17	11,73	11,53
	Tempat praktek bidan	12,84	14,12	16,11	18,66
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	30,23	32,43	32,14	36,08
	Polindes (pondok bersalin desa)	10,13	12,75	8,73	10,44
Maluku dan Papua	Puskesmas	13,23	14,16	6,44	7,34
	Puskesmas pembantu	27,08	33,57	14,49	19,30
	Poliklinik/balai pengobatan	1,59	2,40	1,79	2,75
	Tempat praktek dokter	4,54	4,40	1,53	1,94
	Tempat praktek bidan	3,25	4,11	1,64	2,06
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	9,16	10,51	2,79	4,39
	Polindes (pondok bersalin desa)	11,61	12,81	5,45	5,18
Indonesia	Puskesmas	13,69	14,14	11,15	11,67
	Puskesmas pembantu	32,20	35,28	27,31	29,45
	Poliklinik/balai pengobatan	4,11	4,93	8,41	9,75
	Tempat praktek dokter	12,13	12,03	17,01	17,64
	Tempat praktek bidan	24,55	25,13	49,20	50,59
	Poskesdes (pos kesehatan desa)	25,04	28,90	36,93	40,75
	Polindes (pondok bersalin desa)	17,74	19,45	17,45	20,21

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011 dan 2014

pelayanan kesehatan, dan keturunan (Imbiri, Suhartono, & Nurjazuli, 2012). Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat pesisir. Pelayanan kesehatan harus merata di seluruh wilayah, sehingga masyarakat pesisir dapat dengan mudah menjangkau pelayanan tersebut.

Fasilitas kesehatan yang dibangun pemerintah/negara adalah puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada tahun 2011, desa-desa maritim di Indonesia ada sekitar 32,20 persen desa yang sudah memiliki sarana kesehatan puskesmas pembantu dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 3,08 persen menjadi 35,28 desa. Di sisi lain, sarana kesehatan puskesmas belum semuanya dimiliki oleh desa-desa maritim, baru sekitar 13,69 desa pada tahun 2011 dan meningkat 0,45 persen menjadi 14,14 persen desa maritim yang memiliki sarana puskesmas pada tahun 2014.

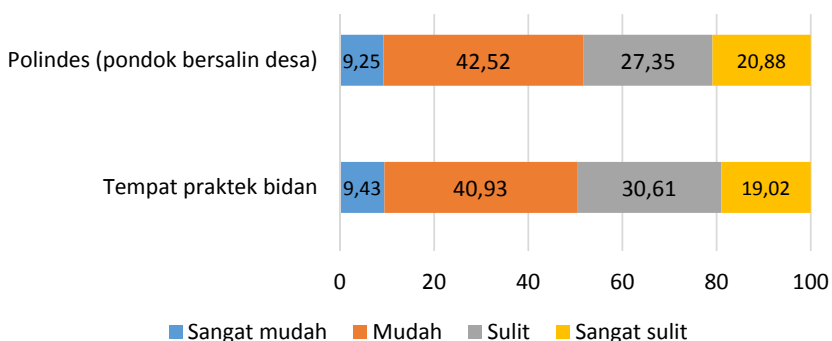
Selain puskesmas dan puskesmas pembantu untuk menjangkau masyarakat desa ke pelayanan kesehatan pemerintah juga difasilitasi dengan poskesdes. Keberadaan poskesdes di desa maritim meningkat paling besar dibandingkan sarana kesesahatan lainnya. Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa merupakan sarana kesehatan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Selain itu, poskesdes juga sangat erat dengan pemberdayaan masyarakat. Poskesdes merupakan wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan taraf kesehatan di lingkungannya. Selain itu, poskesdes dan

polindes juga merupakan dukungan untuk membentuk desa siaga. Desa siaga memiliki penduduk yang mampu dan mau untuk mencegah masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan lainnya secara mandiri. Dengan demikian, desa maritim akan menjadi desa siaga dalam hal kesehatan dengan adanya perkembangan sarana poskesdes.

Pada tahun 2014, di Indonesia, persentase desa maritim yang memiliki puskesmas dan pustu lebih besar dibandingkan persentase desa bukan maritim yang memiliki puskesmas dan pustu. Namun, persentase desa maritim yang memiliki poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, poskesdes, dan polindes lebih kecil dibandingkan desa bukan maritim. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memfokuskan untuk pembangunan puskesmas dan pustu di desa maritim, sedangkan desa bukan maritim lebih memfokuskan pelayanan kesehatan dalam pembangunan poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter dan bidan, poskesdes, serta polindes. Puskesmas dan pustu merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, sedangkan poliklinik, tempat praktek dokter dan bidan, poskesdes, dan polindes merupakan sarana kesehatan yang dibangun swasta atau oleh swadaya masyarakat.

Akan tetapi, pembangunan fasilitas kesehatan di desa maritim perlu diperhatikan. Tahun 2014, hanya sebesar 14,14 persen desa maritim yang memiliki puskesmas, 35,28 persen desa maritim yang memiliki pustu, 4,93 persen desa maritim yang memiliki poliklinik/balai pengobatan, 12,03 persen desa maritim yang memiliki tempat praktek dokter, 25,13 persen desa maritim yang memiliki tempat praktek bidan, 28,90 persen desa maritim yang memiliki poskesdes, dan 19,45 persen desa maritim yang memiliki polindes. Lebih dari setengah desa maritim tidak mempunyai puskesmas/pustu. Padahal puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan. Taher (2014) menyatakan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dapat digambarkan dalam piramid, yaitu pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Peranan terbesar adalah yang berada di posisi bawah yaitu pelayanan primer. Selain itu, puskesmas juga

Gambar 3.12. Persentase Desa Maritim yang Tidak Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat, Tahun 2014



Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah penyakit. Dengan demikian, puskesmas sangat berperan penting baik dalam upaya kuratif dan rehabilitatif maupun preventif dan promotif (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Tidak hanya itu, sarana kesehatan untuk ibu melahirkan juga masih jarang ditemukan di desa maritim. Pada tahun 2014, desa maritim di Indonesia yang memiliki tempat praktek bidan hanya sebanyak 25,13 persen dan yang memiliki polindes hanya sebanyak 19,45 persen. Desa-desa maritim yang tidak memiliki sarana polindes, hanya sekitar 9,25 persen desa yang sangat mudah untuk mencapai sarana polindes terdekat, 45,52 persen desa mudah untuk mencapai sarana polindes terdekat, 27,35 persen desa berpendapat sulit untuk mencapai sarana polindes terdekat, dan 20,88 persen desa berpendapat sangat sulit untuk mencapai polindes terdekat. Kemudian, dari desa maritim yang tidak memiliki tempat praktek bidan, 9,43 persen desa berpendapat sangat mudah, 40,93 persen desa berpendapat mudah, 30,61 persen desa berpendapat sulit, dan 19,02 persen desa berpendapat sangat sulit untuk mencapai tempat praktek bidan terdekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ibu hamil yang akan melahirkan di desa maritim dan menemui kesulitan bahkan sangat sulit untuk mencapai sarana kesehatan. Padahal proses melahirkan dan keterjangkauan sarana kesehatan bagi ibu hamil sangat menentukan bagi keselamatan ibu dan anak.

Secara umum, selama tahun 2011-2014, sarana kesehatan di keenam wilayah/pulau besar mengalami peningkatan. Namun demikian, pada tahun 2014, pelayanan kesehatan untuk tingkat desa di wilayah/pulau Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua masih minim. Desa baik desa maritim maupun desa bukan maritim di wilayah/pulau tersebut yang memiliki sarana kesehatan tidak melebihi dari 60 persen. Namun demikian, sarana kesehatan di wilayah/pulau Jawa sudah baik. Sebagian besar desa maritim di Pulau Jawa memiliki tempat praktek bidan, yaitu sebesar 85,27 persen desa dan desa bukan maritim ada sebanyak 86,22 persen desa. Kemudian desa di wilayah/pulau Jawa yang memiliki poskesdes ada sebesar 53,04 persen untuk desa maritim dan 53,04 persen untuk desa bukan maritim. Berdasarkan Tabel 3.9, sarana kesehatan di desa maritim untuk wilayah/pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi tidak jauh berbeda dengan fasilitas kesehatan di desa bukan maritim.

Namun demikian, akses menuju fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan. Misal, walaupun pada tahun 2014 desa maritim di wilayah/pulau Sumatera yang memiliki puskesmas mencapai 36,75 persen atau sudah diatas persentase secara nasional, masih banyak akses jalan menuju puskesmas yang kurang layak, seperti di Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi jalan sepanjang jalan 3,5 kilometer di pesisir pantai desa tersebut sangat memprihatinkan dan penuh dengan lubang. Kondisi tersebut dapat mengancam pasien seperti ibu yang ingin melahirkan ketika menuju puskesmas terdekat (Fauzi, 2015).

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan juga membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan tersebut akan mempengaruhi kenyamanan pelayanan dari fasilitas kesehatan. Puskesmas di desa maritim juga sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas lainnya, seperti fasilitas rawat inap atau opname. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat di desa maritim daripada harus menjangkau rumah sakit yang berjarak cukup jauh untuk ditempuh (Arif, 2012).

Kemudian, untuk wilayah/pulau Maluku merupakan wilayah dengan sarana kesehatan yang paling tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Sarana kesehatan desa-desa maritim yang ada di wilayah/Pulau Maluku juga cukup tertinggal dibandingkan fasilitas kesehatan desa bukan maritim. Meskipun demikian, selama tahun 2011-2014, sarana kesehatan di desa maritim sudah membaik, terutama untuk pustu yang meningkat sebesar 6,49 persen dibandingkan dengan desa bukan maritim yang hanya meningkat sebesar 4,81 persen. Desa maritim di wilayah/Pulau Maluku masih banyak yang belum memiliki sarana kesehatan. Pada tahun 2014, desa maritim di wilayah/Pulau Maluku yang memiliki puskesmas ada sebesar 14,16 persen desa, yang memiliki pustu ada sebesar 33,57 persen desa, yang memiliki poliklinik/balai pengobatan ada sebesar 2,40 persen desa, yang memiliki tempat praktek doter ada sebesar 4,40 persen desa, yang memiliki tempat praktek bidan ada sebesar 4,11 persen desa, yang memiliki poskesdes ada sebesar 10,51 persen desa, dan yang memiliki polindes ada sebesar 12,81 persen desa.

Keadaan tersebut membuat Kawasan Timur Indonesia (KTI), bahkan wilayah pesisirnya menjadi wilayah prioritas dalam kebijakan pemerintah, di bidang kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019, arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah papua difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. Upaya tersebut didukung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Salah satu prioritas kegiatannya adalah pengadaan sarana kesehatan keliling untuk kepulauan di bagian tengah wilayah Papua. Selain sarana kesehatan keliling, sarana kesehatan dalam bentuk kapal untuk di wilayah pesisir juga telah diupayakan. Kapal Klinik Terapung milik Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro telah disediakan untuk berlayar ke daerah pesisir Timika, Papua. Kapal klinik tersebut melayani kesehatan warga yang tinggal di pesisir Mimika yang hanya bisa dijangkau dengan sara transportasi sungai dan laut. Kapal tersebut juga dapat digunakan untuk mengevakuasi keadaan gawat darurat menuju Timika (Pusat Data dan Informasi PERSI, 2015).

Peran Penting Tenaga Kesehatan dalam Pembangunan Desa Maritim

Pemerintah dapat mengupayakan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas kesehatan terapung di daerah pesisir dapat dilakukan lebih signifikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga sebaiknya menyediakan transportasi laut untuk para dokter. Dengan demikian, setiap hari dokter dapat mengelilingi pulau-

pulau yang terisolir untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk (Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Kesehatan di Pesisir, 2014).

Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan. Kekurangan tenaga kesehatan atau tenaga medis masih banyak terjadi di sarana kesehatan, seperti puskesmas di daerah pesisir. Minimnya tenaga dokter dan tenaga perawat banyak terjadi di daerah pesisir di Lampung Barat (Andry, 2105). Kekurangan tenaga medis juga terjadi di Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Barat. Padahal puskesmas tersebut merupakan sentral pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat (Fisoma, 2015).

Selama tahun 2011-2014, ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia, baik desa maritim maupun desa bukan maritim, mengalami peningkatan. Di Indonesia, selama tahun tersebut, desa yang memiliki dokter wanita meningkat sebesar 0,49 persen untuk desa maritim dan 0,63 persen untuk desa bukan maritim. Desa yang memiliki bidan meningkat sebesar 10,04 persen untuk desa maritim dan 4,04 persen untuk desa bukan maritim. Desa yang memiliki tenaga kesehatan lainnya, seperti tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis terdapat sebesar 2,90 persen untuk desa maritim dan 3,76 persen untuk desa bukan maritim. Akan tetapi, desa yang memiliki dukun bayi mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,37 persen untuk desa maritim dan 3,02 persen untuk desa bukan maritim. Peningkatan desa yang memiliki bidan dan penurunan desa yang memiliki dukun bayi menunjukkan bahwa masyarakat mulai mulai beralih dari tenaga medis menjadi non medis.

Namun demikian, ketersediaan tenaga medis di desa maritim masih lebih tertinggal dibandingkan desa bukan maritim. Hal tersebut mengindikasikan desa maritim masih terbatas untuk tenaga medis, bahkan jumlah desa maritim yang memiliki dukun bayi lebih banyak dibandingkan desa maritim yang memiliki bidan. Pada tahun 2014, desa maritim di Indonesia yang memiliki dokter pria sebesar 11,44 persen desa, yang memiliki dokter wanita sebesar 10,71 persen desa, yang memiliki dokter gigi sebesar 6,51 persen desa, yang memiliki bidan sebesar 73,36 persen desa, yang memiliki tenaga kesehatan lainnya sebesar 54,46 persen desa, dan yang memiliki dukun bayi sebesar 77,89 persen desa. Banyak desa yang memiliki dukun bayi dibandingkan bidan menunjukkan bahwa masih banyak warga di desa-desa maritim lebih cenderung untuk menggunakan dukun bayi dibandingkan bidan. Padahal, untuk desa bukan maritim di Indonesia yang memiliki bidan lebih banyak dibandingkan yang memiliki dukun bayi dalam melakukan proses persalinan.

Bidan sebagai tenaga medis sangat berperan penting bagi kesehatan ibu dan bayi saat persalinan. Selain menolong persalinan, bidan juga dapat memberikan suntikan kepada pasien yang membutuhkan atau dapat segera merujuk ke rumah sakit jika proses persalinan dalam keadaan gawat darurat. Akan tetapi peran dukun bayi tidak dapat dihilangkan begitu saja. Indonesia yang kaya akan adat istiadat membuat banyaknya masyarakat yang masih

Tabel 3.10. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa dan Wilayah/Pulau, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/ Pulau	Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Dokter Pria	13,06	13,45	10,61	11,18
	Dokter Wanita	11,54	11,23	10,24	11,04
	Dokter Gigi	8,02	7,33	6,59	6,25
	Bidan	73,02	78,61	76,32	82,37
	Lainnya	51,58	54,35	42,76	47,57
	Dukun Bayi	64,67	63,98	59,27	56,63
Jawa	Dokter Pria	17,30	19,71	21,50	22,92
	Dokter Wanita	14,15	15,35	17,39	18,46
	Dokter Gigi	8,79	8,23	10,82	11,01
	Bidan	90,35	92,39	90,95	91,89
	Lainnya	66,55	66,46	62,21	65,89
	Dukun Bayi	81,92	76,42	72,58	66,65
Bali dan Nusa Tenggara	Dokter Pria	13,72	12,10	14,11	13,38
	Dokter Wanita	11,65	11,10	11,40	11,46
	Dokter Gigi	7,65	8,07	8,20	8,41
	Bidan	69,84	78,55	68,81	76,32
	Lainnya	55,11	58,78	54,95	57,80
	Dukun Bayi	72,34	72,76	68,70	67,17
Kalimantan	Dokter Pria	9,64	16,83	7,67	9,80
	Dokter Wanita	7,90	15,17	6,87	8,28
	Dokter Gigi	6,07	13,67	4,49	5,63
	Bidan	65,15	87,00	62,09	72,02
	Lainnya	49,81	66,33	47,58	52,78
	Dukun Bayi	80,11	86,00	80,04	79,26
Sulawesi	Dokter Pria	9,37	8,48	11,00	10,98
	Dokter Wanita	9,52	9,86	12,18	12,65
	Dokter Gigi	5,19	6,03	7,12	7,04
	Bidan	57,63	73,05	65,28	77,09
	Lainnya	50,37	56,06	50,88	58,90
	Dukun Bayi	85,23	82,21	77,84	73,92
Maluku dan Papua	Dokter Pria	7,65	7,95	4,26	3,84
	Dokter Wanita	6,78	8,02	3,28	3,87
	Dokter Gigi	3,68	3,38	1,77	1,30
	Bidan	42,66	54,96	23,57	21,20
	Lainnya	41,33	42,48	25,70	26,61
	Dukun Bayi	81,57	86,30	42,21	52,29
Indonesia	Dokter Pria	11,58	11,44	14,12	14,58
	Dokter Wanita	10,22	10,71	12,30	12,93
	Dokter Gigi	6,49	6,51	7,77	7,61
	Bidan	63,32	73,36	74,77	78,81
	Lainnya	51,56	54,46	50,55	54,31
	Dukun Bayi	78,26	77,89	67,16	64,14

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011 dan 2014

mengandalkan tenaga tradisional, seperti dukun bayi. Ternyata peranan dukun bayi tidak hanya sebatas dalam proses persalinan, tetapi juga meliputi berbagai segi lainnya, seperti mencuci baju setelah ibu melahirkan, memandikan bayi selama tali pusar belum puput (lepas), memijit ibu setelah melahirkan, memandikan ibu, mencuci rambut ibu setelah 40 hari melahirkan, melakukan upacara sedekah kepada alam supra-alamiah, dan dapat memberikan ketenangan pada pasiennya karena segala tindakan-tindakannya dihubungkan dengan alam supra-alamiah yang menurut kepercayaan orang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, banyak masyarakat yang percaya bahwa dukun bayi dapat memperlancar proses persalinan. Oleh karena itu, pendidikan dukun bayi akan sangat bermanfaat dan menguntungkan dalam jangka pendek. Selain itu, kemitraan antara bidan dan dukun bayi juga dapat dilakukan, dimana terdapat kerja sama dan pembagian peran antara bidan dan dukun bayi dalam proses persalinan (Anggorodi, 2009).

Kemudian, tidak jauh berbeda dengan sarana kesehatan, tenaga kesehatan desa maritim di wilayah Maluku dan Papua paling tertinggal dibandingkan pulau-pulau lainnya. Bahkan pada tahun 2014, desa maritim di Pulau Maluku dan Papua yang memiliki dokter pria, dokter wanita, dan dokter gigi tidak mencapai 10 persen desa, yaitu hanya sebesar 7,95 persen untuk desa maritim yang memiliki dokter pria, 8,02 persen desa maritim yang memiliki dokter wanita, dan 3,38 persen desa maritim yang memiliki dokter gigi. Kemudian keberadaan dukun bayi di desa maritim Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase terbesar dibandingkan pulau lainnya.

A photograph of a harbor at sunset. The sky is filled with soft, golden light from the setting sun. In the foreground, a concrete pier with a dark bollard is visible. Several fishing boats are docked along the pier. In the background, a large industrial structure, possibly a bridge or a large crane, spans across the water. The overall scene depicts a coastal area where fishing and industry coexist.

Karakteristik Ekonomi 4

4.1. Lapangan Pekerjaan

Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga luas wilayahnya berupa laut yang kaya akan potensi kelautan dan pesisir. Berdasarkan data Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014, jumlah pulau di Indonesia ± 17.504 dengan garis pantai ± 99.093 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada). Potensi sumber daya hayati dan non hayati secara keseluruhan sebesar 1.700 triliun rupiah. Dengan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki wilayah pesisir, sudah seharusnya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa maritim tergerak dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Namun kenyataannya, penduduk di desa pesisir masih dihadapkan dengan empat persoalan pokok, yaitu tingginya tingkat kemiskinan; tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman (KKP, 2011). Hingga saat ini, minat investor untuk berinvestasi di daerah pesisir masih rendah. Hal ini disebabkan masyarakat pesisir identik dengan ketertinggalan kondisi sosial ekonomi. Pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sayangnya, wilayah laut dan pesisir belum menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi sehingga sebagian besar masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan.

Mata pencaharian penduduk desa pesisir cukup beragam, namun sebagian besar penduduk desa pesisir memiliki sumber penghasilan utama dari bidang pertanian dan perikanan sebagai nelayan dan pembudi daya ikan. Menurut Koentjaraningrat (1997), mencari ikan merupakan mata pencaharian atau sumber kehidupan yang sudah ada sejak awal keberadaan manusia di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian menangkap ikan lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, seperti perkembangan alat-alat yang digunakan (kail, tombak, jala, perangkap) dan peralatan navigasi dan pengamanan.

Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 membahas tentang Pengembangan Kawasan Strategis. Upaya yang ditempuh antara lain percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan; menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan; rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa berdasarkan data PODES 2011 dan 2014, persentase desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian sangat dominan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Untuk desa maritim, persentasenya lebih dari 90,00 persen sementara untuk desa bukan maritim sekitar 87,00 persen.

Tabel 4.1. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2011 dan 2014

Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk	Status Desa			
	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
	2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	90,53	90,42	87,94	87,60
Pertambangan dan Penggalian	1,09	0,89	0,55	0,47
Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	1,43	1,39	2,73	3,16
Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	2,50	2,85	3,63	3,98
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,20	0,13	0,09	0,12
Jasa	3,58	3,55	4,37	3,92
Lainnya	0,68	0,78	0,70	0,75

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

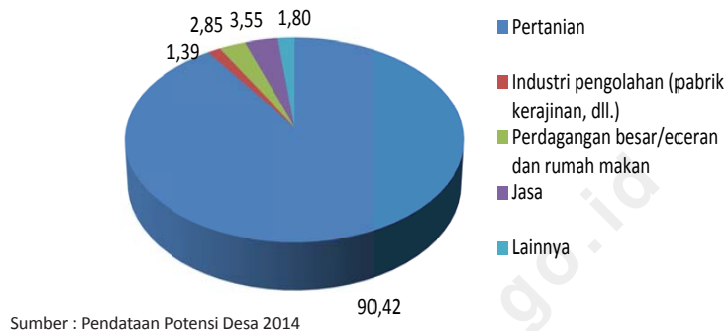
Persentase ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2011, baik untuk desa maritim maupun desa bukan maritim. Secara garis besar, sebagian besar desa di Indonesia memiliki penduduk dengan mata pencaharian utama yaitu pertanian, namun dengan persentase yang lebih tinggi untuk desa maritim. Di peringkat kedua sumber utama penghasilan sebagian besar penduduk yaitu sektor jasa, dengan persentase yang juga menurun di tahun 2014 dibandingkan tahun 2011. Sementara itu, persentase yang mengalami peningkatan yaitu persentase desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor perdagangan dan rumah makan, baik di desa maritim maupun desa bukan maritim.

Dari seluruh desa maritim yang ada di Indonesia tahun 2014, 90,42 persen desa maritim memiliki sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian. Di samping pertanian, penduduk desa maritim juga banyak yang memiliki sumber penghasilan utama dari sektor jasa (3,55 persen) dan perdagangan besar/eceran dan rumah makan (2,85 persen). Sementara untuk desa bukan maritim, persentase jumlah desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian sebesar 87,60 persen; perdagangan besar/eceran dan rumah makan 3,98 persen; dan jasa 3,92 persen.

Pertanian memegang peranan penting bagi pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian tampak dalam pembentukan PDB nasional, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor hasil pertanian khususnya perkebunan. Ditinjau dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tahun 2014 sebesar 38,97 juta jiwa atau 34,00 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja (Sakernas 2014). Meskipun

tenaga kerja yang terserap di sektor ini cukup besar, sektor pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh para petani yang kurang berkeahlian (unskilled farmest) sehingga sektor pertanian dianggap sebagai 'sektor buangan' bagi para pekerja yang gagal masuk ke sektor-sektor lainnya yang umumnya memerlukan tingkat keahlian tertentu (Bappenas, 2013).

Gambar 4.1 Persentase Desa Maritim Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2014



Pertanian sangat melekat dengan masyarakat pesisir, hal ini disebabkan masyarakat pesisir hidup dekat pantai dengan karakteristik mata pencaharian penduduk yang relatif homogen, yaitu bergerak di bidang pertanian. Sektor pertanian identik dengan ketertinggalan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian umumnya memiliki pendidikan dan ketrampilan rendah, belum menggunakan teknologi modern, melibatkan anggota keluarga untuk membantu bekerja pada sektor yang sama, dan produktivitas rendah.

Isu terkait pertanian di daerah pesisir yaitu saat tanam yang tidak serempak karena saling menunggu saat hujan turun dan tanah cukup basah untuk tebar benih. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengaturan air dan pemberantasan hama. Kualitas air yang buruk disebabkan pencemaran membuat petani sering mengalami keterlambatan tanam karena saling menunggu. Sementara untuk usaha perikanan atau tambak terhambat pada kualitas air yang rendah dan sulitnya memberantas penyakit menjadi kendala bagi pembudidaya ikan (Bappeda Lampung, 2001).

Ketergantungan nelayan terhadap wilayah laut menyebabkan keterbatasan akses untuk bermata pencaharian di bidang lain. Ketergantungan penduduk desa maritim terhadap sumber daya laut dan pesisir disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain pendidikan yang masih rendah, ketrampilan yang masih minim, dan keterbatasan alat tangkap ikan. Sementara faktor eksternal yaitu teknologi yang digunakan masih terbatas. Dari laut, sebenarnya masyarakat dapat menggunakan untuk perikanan komersial, perikanan rekreasi, wisata bahari, jasa transportasi, pengendalian atmosfer bumi dan iklim, serta sebagai sumber pertambangan dan energi (Nasution, 2014).

Strategi pengembangan yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam proses pembangunan wilayah pesisir, pengembangan sektor-sektor terkait seperti pertanian, perikanan laut dan tambak, pariwisata, dan industri yang mendukung sektor pertanian/perikanan. Pembangunan desa pesisir pada dasarnya merupakan proses transformasi dan modernisasi perdesaan, yang melibatkan seluruh aspek dan masyarakat perdesaan. Industrialisasi menjadi salah satu pilihan untuk mendorong pembangunan desa pesisir. Teknologi modern erat kaitannya dengan industrialisasi. Namun sebaiknya, teknologi yang diadopsi merupakan teknologi yang dapat diterima dan digunakan masyarakat pesisir (Safei dan Mhd Dian, 2011).

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh gambaran bahwa selama tahun 2011-2014, hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia mengalami penurunan persentase jumlah desa yang sumber penghasilan utama penduduknya berasal dari sektor pertanian, kecuali Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sektor

Tabel 4.2 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/Pulau dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/ Pulau	Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Pertanian	86,98	88,31	90,33	90,58
	Pertambangan dan Penggalian	2,58	1,95	0,53	0,46
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	1,64	1,45	0,91	0,91
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	2,82	3,02	3,36	3,65
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,29	0,15	0,09	0,13
	Jasa	4,58	3,90	4,07	3,31
	Lainnya	1,11	1,22	0,71	0,95
Jawa	Pertanian	86,06	85,27	82,03	80,57
	Pertambangan dan Penggalian	0,79	1,18	0,20	0,11
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	6,36	6,50	6,34	7,80
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	2,79	3,53	5,22	5,82
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,14	0,21	0,11	0,10
	Jasa	2,79	2,90	5,23	4,88
	Lainnya	1,07	0,41	0,87	0,71
Bali dan Nusa Tenggara	Pertanian	91,49	91,32	91,42	91,10
	Pertambangan dan Penggalian	0,36	0,07	0,33	0,03
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	0,21	0,47	1,07	1,32
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	2,86	3,23	2,73	3,10
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,07	0,00	0,03	0,05
	Jasa	4,79	4,57	3,77	3,87
Lainnya	0,21	0,34	0,65	0,52	

Lanjutan

Wilayah/ Pulau	Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan	Pertanian	85,47	86,00	91,28	90,74
	Pertambangan dan Penggalian	2,87	3,17	1,87	1,76
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	2,53	2,00	0,57	0,56
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	3,21	2,67	2,20	2,97
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,00	0,00	0,05	0,06
	Jasa	4,05	4,50	3,34	3,22
	Lainnya	1,86	1,67	0,69	0,68
Sulawesi	Pertanian	92,59	91,46	89,93	89,86
	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,47	0,76	0,65
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	0,52	0,55	0,57	0,54
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	2,72	3,11	2,67	2,98
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,37	0,11	0,13	0,19
	Jasa	2,81	3,41	5,51	5,15
	Lainnya	0,40	0,88	0,43	0,63
Maluku dan Papua	Pertanian	94,05	93,86	96,95	96,58
	Pertambangan dan Penggalian	0,47	0,30	0,43	0,55
	Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.)	0,22	0,23	0,06	0,00
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	1,48	1,91	0,70	0,51
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0,07	0,20	0,02	0,12
	Jasa	3,28	3,02	1,64	1,73
	Lainnya	0,43	0,49	0,19	0,51

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

pertanian masih dominan sebagai sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk untuk seluruh pulau besar di Indonesia dengan persentase di atas 80,00 persen.

Di Pulau Sumatera, persentase jumlah desa maritim yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian meningkat pada tahun 2014 (88,31 persen) dibandingkan tahun 2011 (86,98 persen), demikian juga untuk persentase desa bukan maritim. Di peringkat kedua, persentase desa maritim dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor jasa juga mengalami penurunan di tahun 2014 (3,90 persen) dibandingkan tahun 2011 (4,58 persen), demikian juga untuk persentase desa bukan maritim. Saat sektor lain menurun, persentase desa maritim dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor perdagangan dan rumah makan meningkat di tahun 2014 (3,02 persen) dibandingkan tahun 2011 (2,82 persen), demikian juga untuk persentase desa bukan maritim.

Di Pulau Jawa, persentase tertinggi desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya berasal dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Persentase desa maritim dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor pertanian tahun 2014 sebesar 85,27 persen, menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 86,06 persen, demikian juga dengan persentase desa bukan maritim yang mengalami penurunan. Dibandingkan dengan wilayah/pulau lain di Indonesia, persentase ini merupakan yang terendah, dimana untuk wilayah/pulau lain persentasenya sekitar 90 persen. Sementara itu, sektor industri tumbuh pesat di Pulau Jawa. Persentase desa maritim dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor industri tahun 2014 sebesar 6,50 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,36 persen, demikian juga dengan persentase desa bukan maritim yang mengalami peningkatan. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan, baik untuk desa maritim maupun desa bukan maritim.

Untuk pulau-pulau lain di Indonesia, persentase desa maritim dan bukan maritim dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor pertanian masih dominan, dilanjutkan dengan sektor jasa dan perdagangan. Wilayah Timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua merupakan pulau besar yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil. Bagi penduduk desa maritim yang umumnya tersebar di pulau-pulau kecil, mereka tidak memiliki alternatif selain sebagai nelayan karena terbatasnya akses ke daratan.

Sebagian besar lahan di Pulau Sumatera dan Jawa merupakan lahan subur yang kaya unsur hara dengan sistem irigasi yang cukup, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Lahan pertanian yang masih luas di Pulau Sumatera dan belum berkembangnya aktivitas perekonomian di luar sektor pertanian membuat sebagian penduduk masih memilih bekerja di sektor pertanian. Demikian halnya dengan Pulau Jawa yang masih memiliki cukup banyak lahan untuk diolah di sektor pertanian, meskipun lebih kecil dibandingkan Pulau Sumatera.

Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Tabel 4.3 menunjukkan gambaran bahwa persentase desa maritim yang sebagian besar penghasilan penduduknya bersumber dari pertanian mengandalkan hasil tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan tangkap sebagai komoditi utama. Persentase desa maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi tanaman pangan tahun 2011 sebesar 46,87 persen, meningkat di tahun 2014 menjadi 42,05 persen. Sementara itu, persentase desa maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi perkebunan tahun 2011 sebesar 28,96 persen, menurun di tahun 2014 menjadi 33,50 persen. Persentase desa maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi perikanan tangkap tahun 2011 sebesar 19,79 persen dan meningkat di tahun 2014 sebesar 20,12 persen.

Tabel 4.3 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Sebagian Besar Penghasilan Penduduknya Bersumber dari Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Subsektor, Tahun 2011 dan 2014

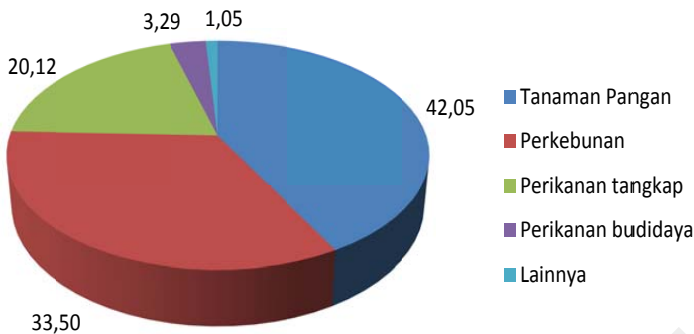
Jenis Komoditi/Sub Sektor	Status Desa			
	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
	2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanaman Pangan	46,87	42,05	73,15	69,82
Perkebunan	28,96	33,50	24,71	27,62
Peternakan	0,40	0,51	0,40	0,50
Perikanan Tangkap	19,79	20,12	0,83	0,89
Perikanan Budidaya	3,35	3,29	0,40	0,38
Kehutanan	0,44	0,43	0,45	0,72
Jasa Pertanian	0,20	0,11	0,06	0,07
Kehutanan	0,44	0,43	0,45	0,72
Jasa pertanian	0,20	0,11	0,06	0,07

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Persentase desa bukan maritim yang sebagian besar penghasilan penduduknya bersumber dari pertanian mengandalkan hasil tanaman pangan dan perkebunan sebagai komoditi utama. Tahun 2011, persentase desa bukan maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi tanaman pangan mencapai 73,15 persen, dan tahun 2014 menurun menjadi 69,82 persen. Persentase desa bukan maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi perkebunan meningkat dari 24,71 persen pada tahun 2011 menjadi 27,62 persen pada tahun 2014, sedangkan komoditi lain nilainya di bawah satu persen.

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa komoditi unggulan pertanian di desa maritim dan desa bukan maritim adalah tanaman pangan, dengan persentase yang lebih rendah di desa maritim. Di desa maritim, terjadi peningkatan persentase hasil perkebunan dan perikanan tangkap selama periode 2011-2014. Perikanan tangkap menjadi komoditi unggulan di hampir seperlima jumlah seluruh desa maritim di Indonesia. Sumber daya laut yang dekat dan mudah dijangkau seharusnya menjadi potensi ekonomi dan sumber kehidupan utama penduduk desa maritim. Namun kenyataannya, komoditi tanaman pangan dan perkebunan lebih diunggulkan dibanding perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Bahkan persentase desa maritim yang sebagian besar penghasilan penduduk pertanian bersumber dari komoditi perikanan budidaya hanya 3,29 persen di tahun 2014, sementara desa bukan maritim sebesar 0,38 persen. Hal ini mungkin disebabkan komoditi tanaman pangan dan perkebunan dianggap memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan resiko yang kecil dibandingkan perikanan tangkap. Disamping itu, modal dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak saat melaut cukup besar. Biaya tersebut antara lain untuk sewa kapal/perahu,

Gambar 4.2 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Sebagian Besar Penghasilan Penduduknya Bersumber dari Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Subsektor, Tahun 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2014

membeli bahan bakar kapal/perahu, dan ketergantungan terhadap faktor cuaca atau musim. Perubahan iklim berdampak terhadap pola mencari ikan, dimana nelayan menjadi lebih sulit memprediksi waktu dan lokasi mencari ikan yang sering berubah.

Hambatan lain dalam usaha perikanan tangkap yaitu masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit dan kompleks dengan biaya (resmi dan tidak resmi) yang relatif tinggi. Nelayan berharap agar pengurusan izin dapat lebih disederhanakan dengan biaya wajar. Jika tidak, maka beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh nelayan akan semakin besar dan mengurangi pendapatan nelayan. Masalah perizinan ini sudah menjadi masalah klasik di subsektor perikanan tangkap. Dengan berbagai kendala yang dihadapi seorang nelayan, penduduk lebih memilih mengelola lahan yang terdapat di wilayah tepi laut atau pesisir untuk menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun demikian, peningkatan komoditi perikanan tangkap yang meningkat selama periode 2011-2014 merupakan suatu langkah awal yang menggembirakan. Hal ini berarti ada upaya dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperbaiki kondisi kemaritiman di Indonesia.

Bagi masyarakat pesisir yang tinggal dekat dengan jalur transportasi dan pelabuhan, usaha perikanan budidaya menjadi pilihan utama. Beragam pekerjaan terkait usaha budidaya seperti menjadi pedagang pengumpul hasil tambak, penyedia sarana produksi perikanan, dan pengelolaan hasil budidaya ikan juga semakin berkembang.

Hidup di wilayah pesisir dengan akses ke darat maupun laut membuat satu rumahtangga bisa saja memiliki lebih dari satu aktivitas pertanian, perikanan, dan aktivitas hutan yang subsisten. Sebagai masyarakat pesisir, ekonomi lokal didominasi sektor pertanian dan perikanan. Di sektor pertanian, tanaman pangan yang ditanam seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, jagung, sayur-sayuran, dan padi ladang. Sebagian besar rumahtangga mengusahakan

kebun, baik kebun umur pendek maupun umur panjang, seperti di Provinsi Maluku (Soselisa et al, 2011).

Bagi sebagian besar penduduk desa bukan maritim, tanaman pangan menjadi komoditi utama yang dikelola oleh para petani, terutama padi. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Seiring peningkatan jumlah penduduk, permintaan untuk komoditi padi juga semakin meningkat. Tanaman padi menghasilkan beras, menir, dedak, sekam, dan jerami. Masing-masing hasil tersebut dapat diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah. Sebagai contoh, beras tidak hanya digunakan untuk pangan pokok, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk berupa pangan fungsional, panganan, dan bahan baku industri. Meskipun tanaman pangan masih menjadi unggulan, terjadi penurunan minat petani untuk menanam komoditi ini.

Pertanian menurut bidangnya dapat dibagi menjadi pertanian tanaman perkebunan (keras) dan pertanian tanaman pangan. Lahan tidur yang berada di wilayah pesisir dapat dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian atau perkebunan. Tanaman perkebunan yang dapat ditanam antara lain cengkeh, kelapa sawit, kakao, dan lainnya. Pembukaan hutan menjadi perkebunan marak dilakukan karena nilai ekonomis yang diperoleh dari hasil perkebunan lebih tinggi. Sebagai contoh, konversi hutan mangrove digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Pesisir Selatan terkenal sebagai penghasil kelapa pesisir. Tanaman kelapa tumbuh subur di sepanjang pesisir pantai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan perluasan areal perkebunan tanaman kelapa pesisir sebagai bagian dari upaya pelestarian komoditi khas daerah tersebut. Perluasan difokuskan di lima kecamatan yang memiliki potensi besar sebagai kecamatan penghasil komoditi kelapa pesisir (Antaraneews Sumbar, 2015). Di samping pertanian, kawasan pesisir kaya akan barang tambang dan mineral seperti pasir besi. Usaha pertambangan pun dapat tumbuh di wilayah pesisir (Setyorini, 2014).

Untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir, upaya yang ditempuh pemerintah salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Sesuai amanat pembangunan nasional, sebagai negara maritim Indonesia harus mampu mensejahterakan seluruh rakyat, termasuk masyarakat yang tinggal di desa maritim. Potensi kekayaan laut Indonesia sangat luar biasa jika dapat dikelola secara bijak. Sudah saatnya masyarakat desa maritim bangkit dari kemiskinan dan menjadikan laut sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan (Deputi Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas IPTEK Kemenristek, 2014).

Tabel 4.4 memberikan gambaran jenis komoditi sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan sebagian besar penduduk di pulau-pulau besar di Indonesia. Tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan tangkap menjadi komoditi unggulan sebagian besar penduduk desa maritim di Pulau Sumatera.

Tabel 4.4 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Sumber Penghasilan Sebagian Besar Penduduknya dari Sektor Pertanian Menurut Jenis Komoditi/Sub Sektor dan Wilayah/Pulau, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	Jenis Komoditi / Sub Sektor	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Tanaman Pangan	37,69	32,74	53,59	48,77
	Perkebunan	31,91	36,25	45,01	49,58
	Perikanan Tangkap	27,53	27,85	0,71	0,83
	Perikanan Budidaya	2,45	2,34	0,26	0,29
	Lainnya	0,42	0,82	0,43	0,54
Jawa	Tanaman Pangan	74,17	72,67	95,01	94,20
	Perkebunan	2,08	2,60	3,47	4,20
	Perikanan Tangkap	19,10	19,38	0,14	0,20
	Perikanan Budidaya	4,40	4,79	0,70	0,60
	Lainnya	0,25	0,57	0,68	0,80
Bali dan Nusa Tenggara	Tanaman Pangan	81,48	76,14	84,63	79,61
	Perkebunan	8,13	12,37	14,81	19,42
	Perikanan Tangkap	7,19	7,73	0,03	0,09
	Perikanan Budidaya	2,11	2,21	0,00	0,03
	Lainnya	1,09	1,55	0,52	0,84
Kalimantan	Tanaman Pangan	48,81	44,77	51,68	49,51
	Perkebunan	18,18	21,32	34,83	46,05
	Perikanan Tangkap	30,43	30,81	2,95	2,74
	Perikanan Budidaya	1,98	2,33	0,17	0,35
	Lainnya	0,59	0,78	1,65	1,35
Sulawesi	Tanaman Pangan	36,51	32,45	68,18	66,76
	Perkebunan	38,48	42,81	30,23	31,43
	Perikanan Tangkap	19,31	18,78	0,58	0,50
	Perikanan Budidaya	5,14	5,42	0,50	0,45
	Lainnya	0,56	0,54	0,51	0,86
Maluku dan Papua	Tanaman Pangan	36,43	30,84	83,71	83,08
	Perkebunan	40,22	46,03	10,42	7,82
	Perikanan Tangkap	18,48	19,67	2,07	2,39
	Perikanan Budidaya	2,38	1,61	0,15	0,13
	Lainnya	2,49	1,86	3,65	6,58

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Persentase desa maritim di Pulau Sumatera yang sumber penghasilan sebagian besar penduduknya dari pertanian dan menghasilkan komoditi perkebunan tahun 2011 sebesar 31,91 persen, meningkat di tahun 2014 menjadi 36,25 persen. Untuk desa bukan maritim dengan komoditi perkebunan di Pulau Sumatera persentasenya lebih tinggi, yaitu 45,01 persen tahun 2011 dan meningkat menjadi 49,58 persen di tahun 2014. Persentase desa maritim di Pulau Sumatera yang sumber penghasilan sebagian besar penduduknya dari perikanan tangkap sebesar 27,85 persen pada tahun 2014. Persentase ini cenderung lebih tinggi jika dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia.

Di Pulau Jawa, komoditi tanaman pangan menjadi sumber penghasilan sebagian besar penduduk desa maritim, disusul dengan komoditi perikanan tangkap. Tahun 2011, persentase desa maritim yang sumber penghasilan sebagian besar penduduk dari komoditi tanaman pangan sebesar 74,17persen, dan menurun di tahun 2014 sebesar 72,67 persen. Untuk desa bukan maritim yang didominasi tanaman pangan sebagai komoditi utama, persentasenya

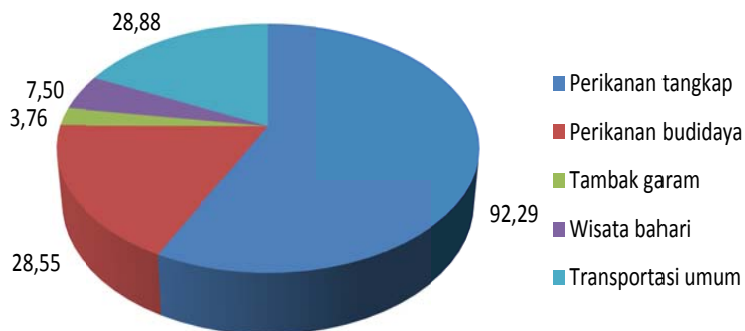
jauh lebih tinggi yaitu sebesar 95,01 persen tahun 2011 dan sedikit menurun tahun 2014 menjadi 94,20 persen. Perikanan tangkap menjadi komoditi kedua tertinggi sebagai sumber penghasilan penduduk desa maritim di Pulau Jawa, dengan persentase berkisar 19,00 persen.

Tanaman pangan menjadi komoditi utama bagi sebagian besar penduduk desa maritim di Pulau Kalimantan, disusul dengan komoditi perikanan tangkap. Persentase desa maritim yang sumber penghasilan sebagian besar penduduknya dari komoditi perikanan tangkap tahun 2011 sebesar 30,43 persen dan meningkat menjadi 30,81 persen tahun 2014. Persentase desa maritim dengan komoditi perikanan tangkap di Pulau Kalimantan merupakan yang tertinggi dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Persentase desa maritim tahun 2014 dengan komoditi utama hasil perkebunan di Pulau Sulawesi (42,81 persen) dan Maluku dan Papua (46,03 persen), lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Sementara itu, persentase tertinggi desa bukan maritim dengan komoditi utama hasil perkebunan yaitu di Pulau Sumatera, mencapai 49,58 persen. Hal ini diduga karena penduduk dan pemerintah di Pulau Sumatera masih terfokus pada pengembangan tanaman tahunan (perkebunan) dibandingkan dengan kawasan lainnya (Nurhemi, 2014).

Pulau Jawa dikenal sebagai lumbung padi nasional. Produksi padi yang dihasilkan Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih dari setengah total produksi padi nasional. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi dengan produksi padi tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tingkat adopsi teknologi tertinggi untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura ada di Pulau Jawa, sehingga tidak mengherankan jika Pulau Jawa menjadi sentra produksi tanaman pangan nasional.

Kawasan Timur Indonesia, seperti Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua merupakan wilayah dengan potensi perkebunan yang tinggi. Sebagai contoh, beberapa sentra produksi kakao saat ini terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejumlah sentra

Gambar 4.3 Persentase Desa Maritim Menurut Pemanfaatan Laut, 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2014

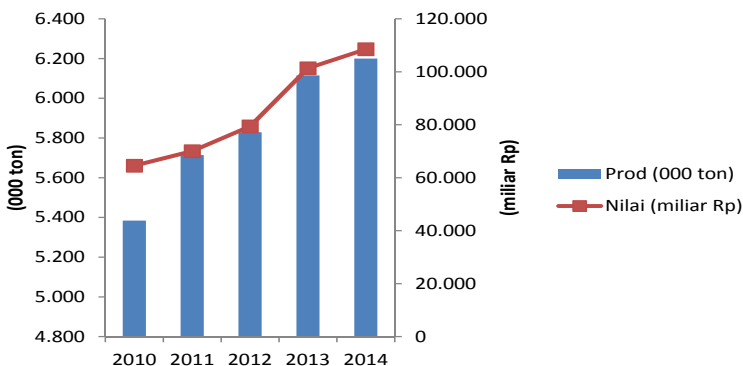
produksi cengkeh terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku. Komoditi utama yang dihasilkan subsektor perkebunan di Sulawesi yaitu kakao, sementara di Maluku terdiri dari tanaman kelapa, kakao, kopi, jarak, dan tanaman rempah-rempah (lada, cengkeh, pala). Wilayah Papua juga merupakan produsen kelapa sawit yang besar di Asia (Bappenas, 2014).

Pemanfaatan sumberdaya laut yang melimpah secara optimal merupakan modal strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berorientasi maritim. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berperan penting dalam keberhasilan pembangunan. SDM merupakan pelaku sekaligus pemanfaat pembangunan. Peningkatan ketrampilan SDM berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan individu untuk mandiri, mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi berikut solusinya. Sektor kelautan dan perikanan merupakan dua sektor yang berhubungan langsung dengan desa maritim. Melalui peningkatan mutu SDM, terutama penduduk di desa maritim, diharapkan dapat mengelola pemanfaatan laut sebagai aset pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Persentase desa maritim yang memanfaatkan laut untuk perikanan tangkap sebesar 92,29 persen. Perikanan tangkap merupakan mata pencaharian umum yang biasa dikerjakan oleh penduduk desa maritim. Penduduk desa maritim yang tinggal di daerah pantai atau dekat laut sudah terbiasa dengan kegiatan menangkap dan mengumpulkan ikan atau biota laut lain. Pekerjaan ini cenderung tidak membutuhkan keahlian khusus dan teknologi modern sehingga lebih mudah dipelajari dan diajarkan kepada masyarakat yang baru belajar.

Gambar 4.4 menggambarkan peningkatan produksi dan nilai perikanan tangkap berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014. Tren produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2003 dengan kenaikan rata-rata tahun 2003-2013 sebesar 12,77 persen (KKP, 2014).

Gambar 4.4 Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap, Tahun 2010 dan 2014



Catatan : * angka sementara

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP 2014

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya kelautan yang besar termasuk keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Potensi pengembangan perikanan tangkap di laut sebesar 6,5 juta ton dan di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun (KKP, 2014).

Selain perikanan tangkap sebagai pemanfaatan laut yang utama, laut juga dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, tambak garam, wisata bahari, dan transportasi umum. Persentase desa maritim yang memanfaatkan laut untuk transportasi umum sebesar 28,88 persen, untuk perikanan budidaya sebesar 28,55 persen, untuk wisata bahari sebesar 7,50 persen, dan untuk tambak garam sebesar 3,76 persen. Penduduk desa maritim menggunakan laut sebagai jalur transportasi untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, terutama bagi pulau-pulau kecil.

Pemanfaatan laut untuk wisata bahari masih cenderung rendah. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sesuai visi yang diusung pemerintah, sektor kemaritiman melalui pemanfaatan laut harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan konsep keberlanjutan. Sebagai contoh, Provinsi Bali dikenal sebagai surga dunia oleh wisatawan domestik dan mancanegara karena kekayaan wisata baharinya. Seiring pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan pariwisata, beberapa daerah di Indonesia menggema sebagai tujuan wisata bagi para pecinta laut seperti Wakatobi di Sulawesi Selatan, Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, dan Raja Ampat di Papua Barat.

Pembangunan wisata bahari pada dasarnya merupakan upaya mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam dan panorama pantai yang indah dengan gelombang pantai yang menantang di beberapa tempat serta keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dengan berbagai jenis ikan hias. Sumber daya hayati pesisir dan lautan Indonesia seperti ikan hias, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang alam pesisir atau coastal landscape yang unik memberikan pemandangan yang menakjubkan. Potensi wisata bahari yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi maritim.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kelautan 2014-2025 poin ketujuh yaitu meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Strategi yang disusun untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut; mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai; pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, dll (Bappenas, 2014). Peningkatan produksi dan produktivitas

dapat dicapai melalui diversifikasi mata pencaharian dan diversifikasi produk; mengembangkan kawasan potensial yang menunjang perekonomian, seperti kawasan pertanian dan agro wisata, kawasan perkebunan dan agro industri, kawasan perikanan dan pariwisata.

Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri. Meningkatnya kecenderungan minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara terhadap wisata alam harus dijadikan sebagai motor penggerak sektor pariwisata, terutama di pulau-pulau kecil. Pemerintah juga perlu berupaya untuk menjaga eksistensi desa pesisir dari bencana yang mungkin timbul dan merusak ekosistem, seperti kenaikan air laut/rob yang merusak tambak produktif milik nelayan budidaya, menghancurkan kawasan pemukiman nelayan di desa-desa pesisir, dan merusak kawasan wisata bahari yang telah dikembangkan. Sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta, investor, dan lembaga sosial diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat melalui pemberdayaan desa-desa maritim.

4.2 Keberadaan TKI dan Agen Pengerahan TKI

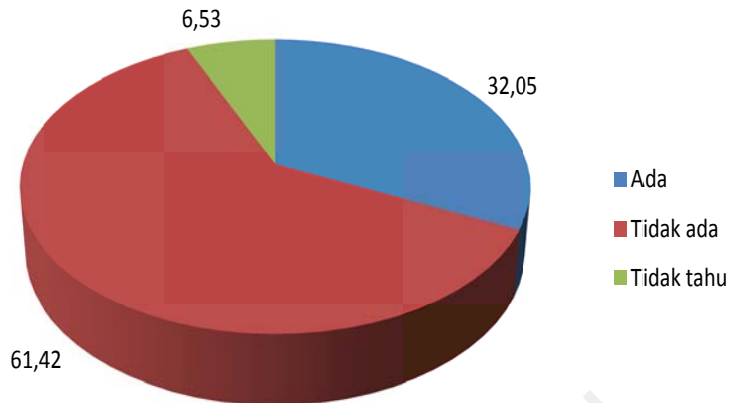
Saat ini, lapangan pekerjaan dalam negeri terbilang belum mengimbangi jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan sektor industri yang ada belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, sehingga masih banyak pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2015 sebesar 7,56 juta jiwa atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar 7,24 juta jiwa. Hal ini berarti dalam setahun terakhir, jumlah penganggur bertambah 320 ribu jiwa. Oleh sebab itu, akibat keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri menjadi hal yang diminati.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor Per.14/KA/VI/2010, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja di

Tabel 4.5 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2011 dan 2014

Karakteristik Desa		Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Keberadaan warga desa yang bekerja sebagai TKI di luar negeri	Ada	34,37	32,05	51,37	47,67
	Tidak ada	65,63	61,42	48,63	46,10
	Tidak tahu	-	6,53	-	6,23

Gambar 4.5 Persentase Desa Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2014



luar negeri merupakan suatu upaya untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran di dalam negeri (Kepala Balitfo, 2014). Secara ekonomi, TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilkan devisa bagi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan para TKI dan masyarakat sekitarnya.

Persentase desa maritim yang memiliki warga desa yang bekerja sebagai TKI di luar negeri tahun 2011 sebesar 34,37 persen desa dan menurun di tahun 2014 menjadi 32,05 persen desa. Sementara itu, persentase desa bukan maritim yang memiliki warga desa yang bekerja sebagai TKI di luar negeri menurun di tahun 2014 (47,67 persen desa) dibandingkan tahun 2011 (51,37 persen desa). Selama periode 2011-2014, terjadi penurunan persentase desa yang memiliki warga desa yang bekerja sebagai TKI, baik untuk desa maritim maupun bukan.

Hal ini sesuai penurunan jumlah TKI periode 2011-2014. Tahun 2011, jumlah penempatan TKI sebesar 586.802 orang dan tahun 2014 sebesar 429.872 orang. Kepala Puslitfo BNP2TKI (2015) menyebutkan ada tiga penyebab penurunan ini. Pertama, pembenahan penempatan TKI di beberapa Negara di kawasan Timur Tengah dengan diberlakukannya penundaan penempatan (*moratorium*) TKI informal yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di enam negara, yaitu Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Moratorium diberlakukan karena pemerintah di negara tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan. Kedua, diberlakukan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*) di daerah yang benar-benar berkurang.

Di lain pihak, faktor utama yang mendorong seseorang memutuskan bekerja di luar negeri sebagai TKI yaitu faktor ekonomi. Menjadi TKI dinilai merupakan jalan pintas untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dibandingkan menjadi petani di desa. Persepsi bahwa seorang yang menjadi TKI akan pulang membawa kesuksesan, dengan membangun rumah menjadi lebih

baik, membeli barang-barang mewah, dan perubahan gaya hidup membuat masyarakat sekitar berkeinginan menjadi TKI (Irawan, 2014).

Persentase desa maritim yang memiliki warga desa yang bekerja sebagai TKI lebih rendah dibandingkan desa bukan maritim. Tahun 2014, persentase desa maritim yang memiliki warga desa yang bekerja sebagai TKI sebesar 32,05 persen desa, yang tidak ada warga desa menjadi TKI 61,42 persen desa, dan 6,53 persen desa tidak tahu. Berdasarkan penelitian tahun 2006 di Desa Branta Pesisir, diperoleh informasi bahwa tidak banyak warga desa yang pergi meninggalkan desa (kurang dari 1 persen) dan tidak ada satupun warga desa yang bekerja sebagai TKI. Penduduk desa tidak ingin meninggalkan desa karena percaya bahwa mereka telah memiliki apa yang mereka butuhkan di desa tempat mereka berada. Penduduk Desa Branta Pesisir tidak tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI karena mereka merasa masih ada peluang ekonomi di wilayah mereka sendiri. Sumber kebahagiaan bagi mereka adalah : 1)hubungan suami istri yang baik; 2)anak yang berbudi luhur; 3)bekerja di desa sendiri; 4)lingkungan yang baik. Jika yang dikejar hanya uang, maka itu dapat ditemukan di Desa Branta Pesisir. Demikianlah slogan yang diusung oleh penduduk Desa Branta. Faktanya, hal itu lebih baik bagi penduduk desa untuk lebih dekat dengan keluarga dan tidak perlu pergi jauh bekerja.

Di lain pihak, penduduk desa maritim sebagian besar bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun nelayan. Kondisi petani dan nelayan di Indonesia sungguh memprihatinkan. Sebagian besar petani dan nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, tidak sedikit anggota rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI. Bekerja sebagai TKI dipilih dengan harapan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk keluarga yang ditinggalkan di Indonesia melalui pengiriman remitan.

Masyarakat desa pesisir dipandang sebagai masyarakat yang relatif terbuka terhadap perubahan. Letak desa yang berbatasan langsung dengan laut memungkinkan penduduk desa maritim untuk berinteraksi dengan pendatang baru, melalui proses interaksi sosial maka terciptalah pertukaran nilai dan informasi. Laut adakalanya memberikan hasil laut yang melimpah, namun terkadang juga hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari. Mobilitas penduduk desa maritim dipengaruhi oleh akses pesisir dan fasilitas umum yang memadai, seperti transportasi dan infrastruktur jalan yang baik. Faktor ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki beragam mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan dari subsektor perikanan. Rendahnya penyerapan tenaga kerja juga menyebabkan penduduk memilih bekerja di luar negeri.

Tabel 4.6 menggambarkan persentase desa maritim dan bukan maritim menurut keberadaan warga desa yang menjadi TKI. Jika dilihat menurut wilayah/pulau, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan pulau dengan persentase tertinggi desa yang memiliki warga desa yang bekerja menjadi TKI. Fenomena yang muncul yaitu daerah yang dahulunya memiliki lahan pertanian yang luas, lambat laun berubah menjadi kantong-kantong TKI. Data Puslitfo BNP2TKI menyebutkan lima provinsi terbesar dalam penempatan TKI tahun

Tabel 4.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan TKI, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/ Pulau	Karakteristik Desa		Status Desa			
			Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
			2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sumatera	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	30,88	31,97	36,44	35,49
		Tidak ada	69,12	59,59	63,56	57,24
		Tidak tahu	-	8,44	-	7,26
Jawa	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	84,63	81,33	82,64	79,07
		Tidak ada	15,37	14,32	17,36	16,80
		Tidak tahu	-	4,36	-	4,13
Bali dan Nusa Tenggara	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	70,69	69,27	75,82	72,86
		Tidak ada	29,31	24,08	24,18	21,37
		Tidak tahu	-	6,66	-	5,77
Kalimantan	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	21,79	20,50	23,87	18,86
		Tidak ada	78,21	68,33	76,13	72,43
		Tidak tahu	-	11,17	-	8,71
Sulawesi	Apakah ada warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	28,55	23,54	36,87	32,39
		Tidak ada	71,45	70,70	63,13	61,18
		Tidak tahu	-	5,75	-	6,43
Maluku dan Papua	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri?	Ada	3,25	2,96	0,45	0,37
		Tidak ada	96,75	91,16	99,55	91,55
		Tidak tahu	-	5,88	-	8,08

2011 yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Banten. Kelima provinsi ini berada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Semakin lemahnya sektor pertanian sebagai basis sumber ekonomi fundamental masyarakat perdesaan mendorong munculnya gelombang TKI yang bekerja di luar negeri dengan mengabaikan segala resiko.

Warga desa yang akan bekerja ke luar negeri sebagai TKI ada yang melapor ke Kepala Desa (Kades)/Lurah setempat, namun ada juga yang tidak melapor. Kondisi seperti ini yang membuat Kades/Lurah tidak mengetahui keberadaan warganya yang menjadi TKI. Salah satu pertanyaan dalam PODES 2014 menanyakan keberadaan warga desa yang diketahui oleh Kades/Lurah, apakah ada yang bekerja di luar negeri sebagai TKI atau tidak, dan juga mengakomodir jawaban tidak tahu. Sistem keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih seringkali bermasalah. Data TKI antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dengan data dari pihak luar, misal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkadang memberikan hasil yang berbeda. Kondisi ini akan berdampak pada beberapa aspek terkait perlindungan terhadap TKI. Sebagai contoh, permasalahan TKI di luar negeri tidak bisa

diselesaikan tanpa mengetahui identitas asal TKI. Banyak TKI yang mendaftar melalui calo, padahal seharusnya mereka mendaftar secara resmi melalui Dinsosnakertrans. Sehingga saat terjadi masalah dengan TKI di luar negeri, Kemenlu akan menelusuri data melalui Dinsosnakertrans, dan terkadang tidak ditemukan kecocokan data dengan data desa. Hal ini disebabkan masih kurang tertibnya sistem pendataan surat rekomendasi di desa-desa dan administrasi pengarsipan yang kurang baik.

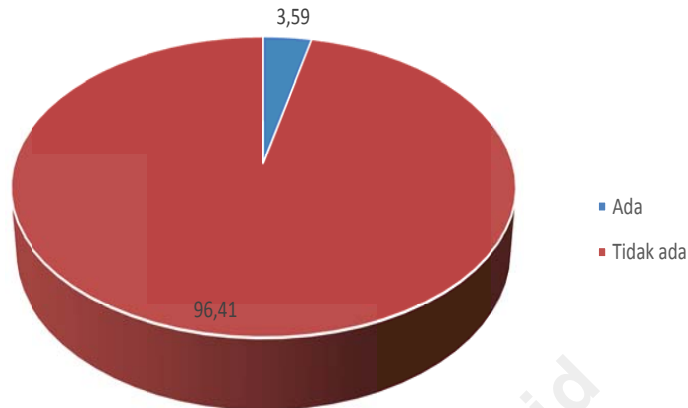
Sistem administrasi di banyak desa masih kurang baik. Salah satu sistem pencatatan yang buruk yaitu pengarsipan data warga desa yang menjadi TKI. Ada beberapa desa yang sudah memiliki pencatatan bagus, namun masih banyak yang tidak tahu informasi tentang warga desa tersebut yang menjadi TKI. Persentase desa maritim yang warga desanya ada yang bekerja sebagai TKI di luar negeri tahun 2014 sebesar 32,05 persen desa, sementara untuk desa bukan maritim sebesar 47,67 persen desa. Desa maritim umumnya terletak di tepi pantai, atau desa yang wilayahnya merupakan desa di pulau-pulau kecil. Untuk menjadi TKI, warga harus memperoleh surat rekomendasi dari kelurahan dan memiliki paspor. Paspor hanya bisa diterbitkan oleh Kantor Imigrasi yang terletak di ibukota. Untuk menjangkau ibukota, penduduk desa maritim harus menempuh perjalanan yang jauh, seringkali melewati lautan, dan biaya yang mahal. Sementara penduduk desa bukan maritim berdiam di wilayah daratan dengan akses ke ibukota tidak sejauh penduduk desa maritim. Kondisi ini yang menyebabkan lebih banyak desa bukan maritim yang diketahui ada warga desanya menjadi TKI di luar negeri.

Eksistensi TKI tidak lepas dari peran lembaga pendukung penempatan TKI, seperti balai pelatihan, bursa kerja, lembaga sertifikasi profesi, dan sarana kesehatan. Agen pengerahan TKI ke luar negeri adalah seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan TKI untuk bekerja di luar negeri. Tugas dan tanggungjawab agen perekrutan TKI antara lain menyiapkan dokumen TKI seperti paspor, kontrak kerja, visa kerja, pembebasan fiskal, dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); perekrutan TKI; program pendidikan dan pelatihan; dan biaya penempatan. Dalam proses perekrutan TKI, sesuai aturan, agen perekrutan hanya diijinkan untuk merekrut calon TKI yang terdaftar di kantor daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), tetapi agen perekrutan dan pekerja lapangan justru lebih sering merekrut langsung di desa-desa asal TKI tanpa sepengetahuan pemerintah daerah di wilayah

Tabel 4.7 Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Agen Pengerahan TKI, Tahun 2014

Karakteristik Desa		Status Desa	
		Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)
Keberadaan Agen Pengerahan TKI ke Luar Negeri di Desa/ Kelurahan	Ada	3,59	4,42
	Tidak ada	96,41	95,58

Gambar 4.5. Persentase Desa Maritim Menurut Keberadaan Agen Pengerahan TKI, Tahun 2014



tersebut. Hasilnya banyak pemerintah daerah tidak mengetahui berapa banyak TKI yang berasal dari daerah mereka.

Persentase desa maritim yang terdapat agen TKI tahun 2014 hanya sebesar 3,59 persen desa. Minimnya keberadaan agen TKI, terutama di desa maritim, sangat disayangkan mengingat agen TKI memiliki peran penting terkait penyalurn TKI. Menurut UU No.39/2004, agen perekrutan TKI bertanggungjawab melaporkan TKI yang sudah diberangkatkan ke luar negeri ke misi diplomatik Indonesia dan menyerahkan salinan kontrak kerja yang sudah ditandatangani ke agen perekrutan daerah. Namun agen perekrutan tidak selalu melakukannya sehingga mempersulit Konsulat Indonesia atau KBRI mengetahui jumlah, lokasi, dan majikan para TKI di negara tujuan (IOM, 2010).

Pada umumnya, tenaga kerja yang menjadi TKI di luar negeri adalah tenaga kerja yang berasal dari desa-desa dengan pendidikan rendah, tidak memiliki keahlian (*unskilled labour*), dan tidak terserap lapangan pekerjaan di perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi peningkatan lapangan usaha menyebabkan masih banyak penduduk yang menganggur. Table 4.8 menggambarkan persentase TKI menurut jenis kelamin dan status desa (maritim dan bukan maritim). Tahun 2011, persentase TKI laki-laki di desa maritim sebesar 46,88 persen, sementara persentase TKI perempuan 53,12 persen. Tahun 2014, persentase TKI laki-laki di desa maritim meningkat menjadi 49,93 persen, sementara persentase TKI perempuan menurun menjadi 50,07 persen. Di desa bukan maritim, persentase TKI laki-laki lebih rendah dibandingkan di desa maritim. Sebaliknya, persentase TKI perempuan lebih tinggi dibandingkan desa maritim.

Tuntutan kehidupan sosial ekonomi yang terjadi pada remaja perempuan di desa pesisir, dimana tingkat pendidikannya belum mampu memasuki lapangan pekerjaan yang mapan dan kurangnya skill, sehingga banyak dari masyarakat desa pesisir memilih pekerjaan ke luar negeri sebagai

Tabel 4.8. Persentase TKI di Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011 dan 2014

Jenis Kelamin TKI	Status Desa			
	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
	2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	46,88	49,93	40,16	44,75
Perempuan	53,12	50,07	59,84	55,25

TKI. Bagi perempuan pesisir, menjadi TKW adalah solusi karena pekerjaan yang ditawarkan tidak mengharuskan pendidikan tinggi, seperti pembantu rumah tangga dan buruh (Polem, 2013). Faktor ekonomi merupakan alasan utama sebagian besar penduduk yang memilih menjadi TKI di luar negeri. Pekerjaan sebagai TKI dipandang sebagai pekerjaan yang menjanjikan secara ekonomis dalam waktu cepat.

Pusdatin Ketenagakerjaan (2014) menyebutkan karakteristik pendidikan TKI selama 2011-2013 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA ke bawah dengan persentase lebih dari 93,00 persen. Ini berarti, hanya sekitar 7,00 persen TKI yang memiliki tingkat pendidikan Diploma/Sarjana ke atas. Pendidikan SMP dan SD masih didominasi oleh TKI informal dengan jenis kelamin perempuan dan jenis pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga. Salah satu penyebab peningkatan jumlah perempuan dalam mengisi kesempatan kerja di luar negeri yaitu kaum perempuan tidak hanya menjadi tenaga kerja informal, tetapi juga sudah mulai bekerja sebagai tenaga kerja formal seperti di perusahaan-perusahaan (Pusdatin Ketenagakerjaan, 2014).

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh gambaran persentase TKI laki-laki di desa maritim mengalami peningkatan, sementara persentase TKI perempuan mengalami penurunan selama periode 2011-2014 untuk seluruh pulau besar di Indonesia, kecuali Maluku dan Papua. Persentase TKI laki-laki lebih tinggi dibandingkan persentase TKI perempuan untuk desa maritim di Pulau Sumatera; Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan; dan Sulawesi. Sementara untuk desa bukan maritim, persentase TKI laki-laki lebih tinggi dibandingkan persentase TKI perempuan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Sulawesi. Variasi persentase TKI laki-laki dan TKI perempuan di setiap wilayah/pulau di Indonesia, baik untuk desa maritim maupun bukan maritim dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah setempat. Malini (2002) dalam Warsito (2010) menambahkan, ada beberapa pendorong Tenaga Kerja Wanita (TKW) ingin bekerja keluar negeri antara lain: (1) dorongan ekonomi, karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi, (2) semakin sempitnya lahan pertanian sebagai mata pencaharian mereka sebagai petani, (3) lapangan kerja dalam negeri sempit serta upah yang rendah, sedangkan di luar negeri upahnya tinggi hingga tujuh kali lipat, (4) karena alasan sosial berupa pendidikan yang rendah,

Tabel 4.9 Persentase TKI di Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Wilayah/ Pulau dan Jenis Kelamin, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	Jenis Kelamin	Status Desa			
		Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Laki-laki	54,80	58,24	41,49	50,09
	Perempuan	45,20	41,76	58,51	49,91
Jawa	Laki-laki	40,24	43,55	33,71	37,57
	Perempuan	59,76	56,45	66,29	62,43
Bali dan Nusa Tenggara	Laki-laki	56,84	59,41	68,57	71,56
	Perempuan	43,16	40,59	31,43	28,44
Kalimantan	Laki-laki	52,14	56,92	46,38	51,59
	Perempuan	47,86	43,08	53,62	48,41
Sulawesi	Laki-laki	60,66	62,07	57,49	59,57
	Perempuan	39,34	37,93	42,51	40,43
Maluku dan Papua	Laki-laki	24,44	17,78	46,23	45,65
	Perempuan	75,56	82,22	53,77	54,35

(5) *demonstration effect*, dimana mereka melihat tetangganya hidup enak dan mewah dari hasil bekerja di luar negeri, dan (6) faktor demografi usia muda membuat mereka ingin mempunyai uang yang banyak.

Laporan Nasional Bappenas (2015) menyebutkan salah satu isu terpilih yang perlu ditinjau yaitu penurunan angka penduduk miskin. Rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah antara lain perbaikan sistem tata kelola perekrutan dan pengiriman TKI ke luar negeri harus didukung oleh suprastruktur (perda, pergub, perpup, dan sebagainya). Hal ini dilakukan untuk mengurangi akses negatif migrasi internasional seperti human trafficking, dehumanisasi, komersialisasi manusia, degradasi moral, dan sebagainya. Penempatan dan perlindungan TKI berdampak pada kesejahteraan TKI dan keluarganya.

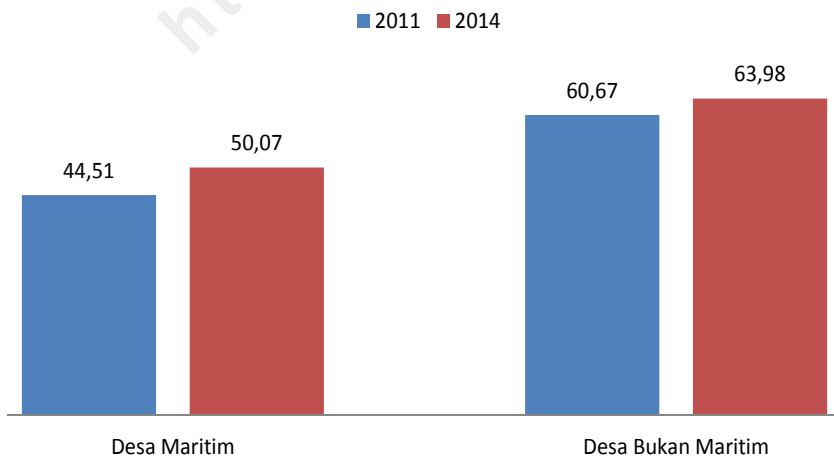
Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas menjadi semangat dan arah RPJMN 2015-2019 dan RPJPN 2005-2025. Kegagalan pembangunan desa seringkali disebabkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap potensi desa dan mentransformasikan sumberdaya yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan penduduk. Karena desa-desa yang ada di Indonesia ini sangat heterogen dari sisi penduduknya, SDA, dan kondisi wilayah/lingkungan. Oleh sebab itu, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman berikut program-program pemberdayaan desa yang dicanangkan, diharapkan penduduk desa maritim mampu mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran desa.

4.3 Fasilitas dan Kondisi Jalan di Desa Maritim

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki jumlah pulau sekitar 17.504 dengan panjang garis pantai kurang lebih 99.093 km (KKP, 2014). Dengan kelebihan dari sisi geografis yang dimiliki tersebut, Indonesia memiliki beragam potensi kelautan (maritim) yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan daerah sehingga mendorong kesejahteraan rakyat, terutama pada wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah perbatasan antara laut dan daratan, sehingga kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur dari wilayah ini sangat berbeda dengan daerah pedalaman. Perbedaan tersebut salah satunya terdapat pada kondisi infrastruktur. Kondisi infrastruktur pada wilayah pesisir umumnya mengalami kendala yaitu masih minimnya fasilitas jalan sebagai akses transportasi serta masih rentannya wilayah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim (Rosalina, 2012). Melalui permasalahan yang ada pembangunan wilayah pesisir menjadi penting untuk diperhatikan.

Agenda pembangunan wilayah telah diusung pada Rancangan Awal RPJMN tahun 2015-2019. Pada agenda tersebut disebutkan bahwa salah satu sasaran yang akan dicapai pada lima tahun mendatang adalah melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis maritim (kelautan). Salah satu cara untuk mencapai target pada sasaran ini yaitu dengan melakukan pembangunan dari wilayah administrasi terkecil, yaitu desa. Desa yang berada pada wilayah pesisir dalam hal ini dikatakan sebagai desa maritim. Upaya percepatan pembangunan yang dapat dilakukan pada desa maritim diantaranya adalah melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman (Bappenas, 2014). Upaya pemanfaatan ini dapat diterapkan dengan meningkatkan produksi perikanan; mengembangkan

Gambar 4.6. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Penerangan Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

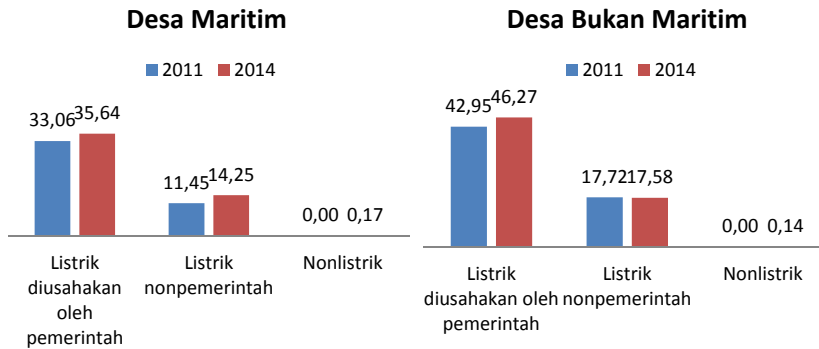
energi dan mineral kelautan; mengembangkan kawasan bahari dan industri maritim serta perkapalan. Untuk dapat merealisasikan upaya-upaya tersebut terutama pada wilayah desa diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan terkelola dengan baik, terutama infrastruktur transportasi dan fasilitas jalan sebagai akses dalam mewujudkan upaya percepatan tersebut.

Infrastruktur berupa fasilitas jalan sangat membantu masyarakat desa maritim untuk berkembang, karena dengan adanya jalan masyarakat dapat memiliki akses ke luar masuk wilayah dengan mudah terutama untuk melakukan aktivitas ekonomi. Fasilitas jalan yang dikelola dengan baik mengindikasikan gambaran keberhasilan pembangunan serta tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Pengelolaan jalan yang baik dapat dilihat melalui keberadaan penerangan jalan. Fungsi dari adanya penerangan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya pada malam hari. Selain itu, penerangan jalan juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan.

Gambar 4.6 memperlihatkan perkembangan persentase desa maritim dan desa bukan maritim yang memiliki penerangan di jalan utama desa/kelurahan tahun 2011 dan 2014. Data yang ada memperlihatkan bahwa selama tiga tahun telah terjadi peningkatan jumlah desa yang memiliki penerangan di jalan utama. Desa maritim memiliki penerangan di jalan utama yang masih minim dibandingkan desa bukan maritim. Hal ini terlihat dari masih ada sekitar 50,07 persen desa maritim yang tidak memiliki penerangan jalan pada tahun 2014. Sementara untuk desa bukan maritim, persentase desa yang tidak memiliki penerangan jalan ada sekitar 36,02 persen. Melihat masih tingginya desa tanpa penerangan jalan, terutama pada desa maritim menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan fasilitas penerangan jalan pada wilayah tersebut. Banyak faktor yang dapat menjadi kendala dalam penyediaan penerangan jalan umum (PJU) desa maritim, salah satunya seperti luasnya daerah cakupan yang akan dipasang lampu PJU atau masih tidak adanya aliran listrik (Rahman, 2015).

Apabila diteliti lebih jauh terkait jenis penerangan yang digunakan untuk penerangan jalan utama desa, baik desa maritim maupun desa bukan maritim hampir seluruhnya telah menggunakan listrik sebagai sumber energi penerangan jalan. Listrik yang diusahakan pemerintah masih dominan digunakan sebagai energi penerangan jalan dibandingkan listrik yang berasal dari non pemerintah. Gambar 4.7 memperlihatkan bahwa masih terdapat desa yang jenis penerangan jalannya menggunakan non listrik, walaupun proporsinya kecil dari jenis penerangan lain. Pada desa maritim, dari 50,70 persen desa yang memiliki penerangan di jalan utama, 35,64 persen diantaranya menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan 14,25 persen desa menggunakan listrik non pemerintah. Disamping itu, persentase desa disetiap sumber penerangan menunjukkan peningkatan selama 2011 hingga 2014. Hal ini sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada jumlah desa yang memiliki penerangan jalan.

Gambar 4.7. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Sebaran persentase desa yang memiliki penerangan di jalan utama desa berdasarkan 6 pulau besar di Indonesia diperlihatkan pada Tabel 4.10. Secara keseluruhan, persentase desa yang telah memiliki penerangan jalan terus meningkat selama tiga tahun terakhir pada tahun 2014. Bahkan Pulau Kalimantan memiliki peningkatan keberadaan penerangan jalan yang sangat tajam di desa maritim. Jumlah desa maritim yang memiliki penerangan di jalan utama desa masih sedikit. Jika dibandingkan dengan desa bukan maritim, persentase desa maritim dengan jalan yang diterangi lampu secara umum juga lebih kecil. Pulau Jawa merupakan pulau dengan persentase desa yang memiliki fasilitas penerangan jalan terbesar yaitu lebih dari 80 persen. Sementara untuk pulau pada wilayah Timur Indonesia, keberadaan desa dengan penerangan jalan masih sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 50 persen ke bawah. Perbedaan yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa masih ada ketimpangan keberhasilan pembangunan desa antar pulau di Indonesia.

Hal menarik lain yang menjadi perhatian adalah persentase desa yang memiliki penerangan jalan di Pulau Kalimantan dan Maluku dan Papua lebih besar terdapat di desa maritim pada tahun 2014. Pada kedua pulau ini, daerah pedalaman masih terkendala oleh krisis energi listrik dan kondisi jalan yang buruk, bahkan beberapa desa pedalaman masih belum dialiri listrik (Saragih, 2015). Kendala lainnya adalah luas pulau yang sangat besar sehingga beberapa desa pedalaman terpencil sulit untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang baik karena sulitnya akses. Maka dari itu, infrastruktur jalan berupa fasilitas penerangan lebih banyak dimiliki oleh desa maritim dibandingkan desa bukan maritim di Pulau Kalimantan serta Maluku dan Papua. Jika ditinjau dari segi jenis penerangan sebagian besar energi penerangan pada setiap pulau telah menggunakan listrik yang diusahakan oleh pemerintah, kecuali pada pulau Maluku Papua yang sumber energi penerangan masih banyak diperoleh dari listrik non pemerintah.

Selain fasilitas jalan, infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi antar desa juga sangat membantu masyarakat desa untuk

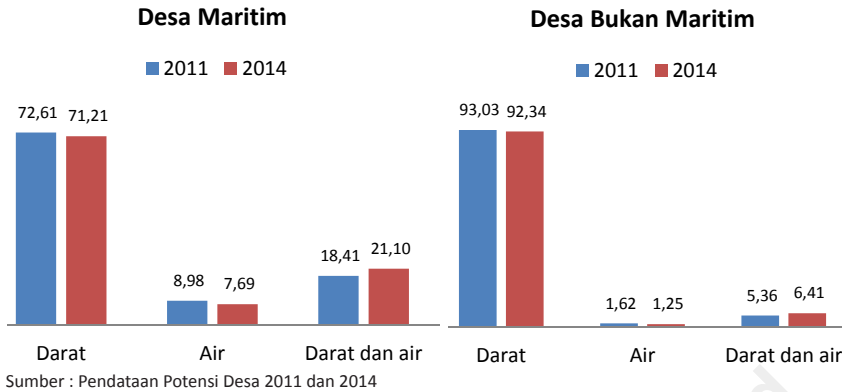
melakukan mobilisasi. Melalui ketersediaan infrastruktur transportasi, masyarakat di desa dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan komunikasi antar tempat/wilayah. Pada desa maritim kebutuhan akan modal transportasi menjadi sangat penting dikarenakan kondisi geografis desa yang berbatasan langsung dengan laut sehingga ketersediaan transportasi dan lalu lintas laut merupakan hal yang wajib untuk dimiliki oleh desa maritim. Berdasarkan

Tabel 4.10. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Penerangan Jalan Utama Desa Menurut Sumber Penerangan Jalan dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	Karakteristik	2011		2014	
		Desa Maritim	Desa Bukan Maritim	Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Keberadaan penerangan jalan	49,08	53,62	54,05	60,00
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	37,41	39,62	41,67	43,49
	Listrik nonpemerintah	11,67	13,99	12,15	16,39
	Nonlistrik	-	0,00	0,23	0,12
Jawa	Keberadaan penerangan jalan	82,77	87,17	87,97	91,48
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	63,55	58,50	65,49	65,87
	Listrik nonpemerintah	19,23	28,67	22,13	25,55
	Nonlistrik	-	-	0,35	0,05
Bali dan Nusa Tenggara	Keberadaan penerangan jalan	32,31	39,00	32,48	37,23
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	27,88	32,85	25,15	28,98
	Listrik nonpemerintah	4,43	6,15	7,26	8,24
	Nonlistrik	-	-	0,07	0,00
Kalimantan	Keberadaan penerangan jalan	35,64	42,51	59,67	42,68
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	26,01	30,72	46,83	30,18
	Listrik nonpemerintah	9,63	11,79	12,50	12,18
	Nonlistrik	-	-	0,33	0,32
Sulawesi	Keberadaan penerangan jalan	47,99	53,57	53,66	59,74
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	36,73	41,70	40,45	45,51
	Listrik nonpemerintah	11,26	11,86	13,16	14,15
	Nonlistrik	-	-	0,06	0,09
Maluku dan Papua	Keberadaan penerangan jalan	22,11	9,25	31,04	11,45
	Listrik diusahakan oleh pemerintah	10,24	5,09	13,47	5,69
	Listrik nonpemerintah	11,86	4,13	17,38	5,28
	Nonlistrik	-	0,02	0,20	0,48

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Gambar 4.8. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Penerangan Jalan Utama Desa, Tahun 2011 dan 2014



Gambar 4.8, terlihat bahwa jenis lalu lintas antar desa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama tahun 2011 hingga 2014. Jenis lalu lintas melalui air atau darat dan air lebih banyak dilakukan oleh desa maritim dibandingkan desa bukan maritim dengan persentase masing-masing sebesar 7,69 persen desa dan 21,10 persen desa pada tahun 2014. Meskipun demikian, lalu lintas antar desa pada desa maritim masih didominasi oleh lalu lintas melalui darat. Kondisi ini menjadi suatu ironi, karena letak desa maritim yang berbatasan dengan laut seharusnya dapat menjadi kelebihan dalam melakukan konektivitas antar wilayah (Adityawarman, 2012). Konektivitas masyarakat di desa maritim bahkan dapat lebih luas karena dengan adanya laut konektivitas tidak hanya sebatas antar desa tetapi juga dapat antar pulau di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan pemanfaatan laut sebagai modal lalu lintas utama diperlukan biaya awal pembangunan yang cukup besar.

Kembali kepada kondisi jalan, untuk mendukung lalu lintas transportasi darat atau darat dan air, persentase desa menurut jenis permukaan jalan terluas (Tabel 4.11) pada desa maritim tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap desa bukan maritim selama periode 2011-2014, meskipun persentasenya cenderung lebih rendah. Kondisi permukaan jalan terluas di desa maritim sebagian besar sudah berupa Aspal/Beton dan hampir seluruhnya telah dapat dilalui kendaraan beroda 4 atau lebih. Ada sebesar 65,42 persen desa maritim yang sudah memiliki permukaan jalan berupa Aspal/Beton dan 76,43 persen desa maritim yang memiliki jalan dapat dilalui sepanjang tahun pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi jalan untuk mendukung lalu lintas darat sudah cukup layak. Namun, peningkatan perbaikan dan pemeliharaan jalan tetap perlu dilakukan mengingat masih terdapatnya permukaan jalan yang terbuat dari tanah dan tidak dapat dilalui sepanjang tahun dengan persentase sekitar 9,00 persen desa dari seluruh desa maritim (Tabel 4.12). Fakta lainnya berdasarkan data Tabel 3 adalah pada tahun 2014 desa maritim memiliki jalan darat yang tidak dapat dilalui sepanjang tahun lebih banyak daripada desa bukan maritim dengan selisih persentase sebesar 2,66 persen.

Tabel 4.11. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Jenis Lalu Lintas Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas, Tahun 2011 dan 2014

Jenis Permukaan Jalan Terluas	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
	2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspal/beton	62,74	65,42	63,38	65,59
Diperkeras (kerikil, batu, dll.)	15,93	14,83	22,61	20,35
Tanah	11,32	10,69	11,99	10,94
Lainnya	1,04	1,37	0,41	1,88

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Keberadaan jalan utama desa yang telah memiliki penerangan, terbuat dari aspal, dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat tidak akan berarti tanpa adanya angkutan umum. Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, mudah, dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik meliputi pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Madeira, 2015). Pada daerah desa, keberadaan angkutan umum masih terkendala pada pelayanan lambat, tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan (Riadi, 2012). Gambar 4.9 memperlihatkan keadaan angkutan umum yang melewati desa baik desa maritim maupun desa bukan maritim.

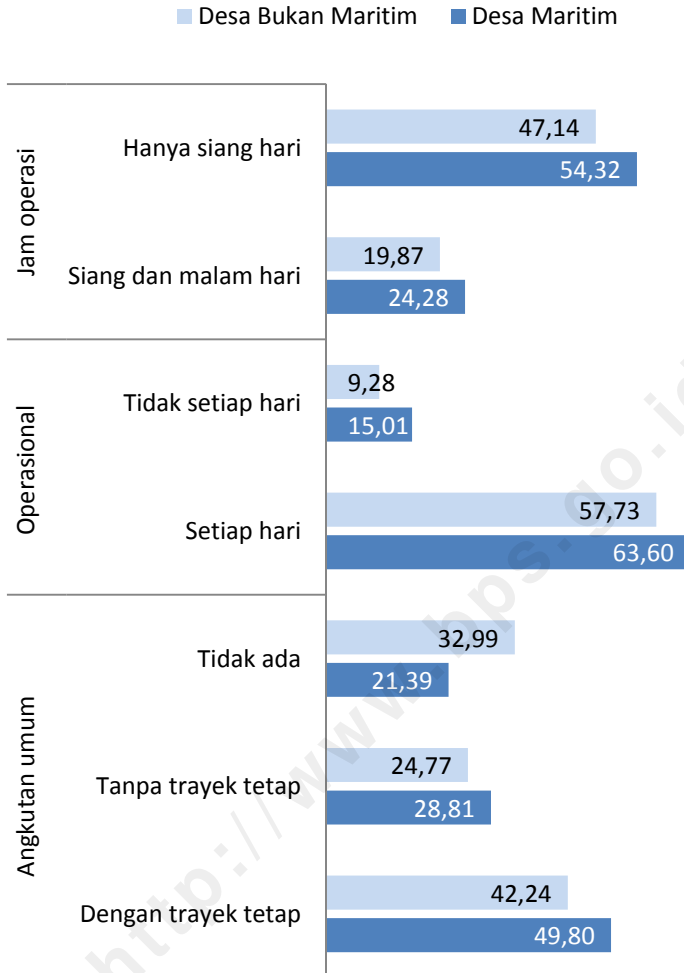
Secara nasional, pada tahun 2014 desa maritim memiliki jumlah desa yang banyak memiliki angkutan umum. Pernyataan ini tergambar dari persentase desa dengan angkutan umum dengan dan tanpa trayek pada desa

Tabel 4.12. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih, Tahun 2011 dan 2014

Jalan Dapat dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
	2011	2014
(1)	(4)	(5)
Sepanjang tahun	76,43	83,47
Sepanjang tahun kecuali saat tertentu	4,94	5,95
Sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan	1,93	2,99
Tidak dapat dilalui sepanjang tahun	9,00	6,34

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Gambar 4.9. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Angkutan Umum Yang Melewati Desa, Tahun 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

maritim yang lebih besar daripada desa bukan maritim, sedangkan persentase tidak ada angkutan umumnya lebih kecil. Selain itu, operasional dan jam operasi angkutan umum pada desa maritim terlihat lebih intens dengan operasional angkutan setiap hari, tetapi jam operasi hanya pada siang hari saja. Penyediaan transportasi umum perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui keseimbangan antara kebutuhan perjalanan, tingginya permintaan dengan sarana transportasi yang tersedia. Apabila tercapai keseimbangan antara ketiga faktor tersebut di atas, maka pelayanan kebutuhan transportasi akan terpenuhi dengan baik (Masida, Rustanto, & Setijowarno, 2012).

Persebaran desa menurut jenis lalu lintas transportasi antar desa di berbagai pulau di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 4.13. Secara umum, kondisi

lalu lintas transportasi pada masing-masing pulau memiliki kondisi yang sama dengan keadaan di level nasional. Tahun 2014 lalu lintas melalui air masih didominasi oleh desa maritim dengan persentase tertinggi berada pada pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,48 persen desa. Sedangkan terendah berada pada Pulau Jawa dengan persentase 0,48 persen desa. Perbedaan yang sangat besar antara kedua pulau ini sejalan dengan ketimpangan keadaan fasilitas jalan utama desa yang berupa sumber penerangan jalan pada kedua pulau tersebut seperti pada Tabel 4.10. Kemudian ditinjau dari perkembangan lalu lintas transportasi selama periode 2011 hingga 2014 menunjukkan penurunan persentase desa yang menggunakan lalu lintas darat dan lalu lintas air disetiap Pulau. Penurunan pada kedua jenis lalu lintas ini terjadi karena beralihnya masyarakat pada jenis lalu lintas darat dan air. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan persentase desa yang menggunakan lalu lintas darat dan air pada setiap Pulau Indonesia.

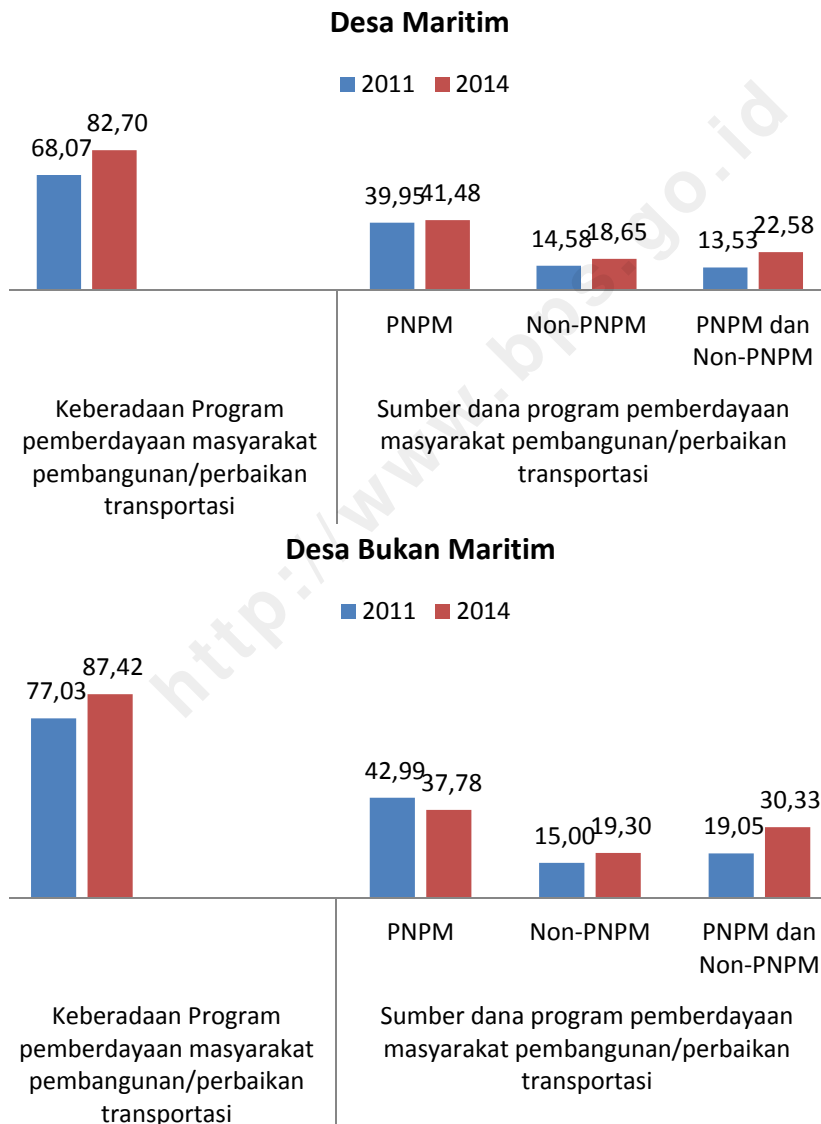
Tabel 4.13. Persentase Desa Maritim dan Bukan Menurut Jenis Lalu Lintas Transportasi dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	Jenis Lalu Lintas Transportasi Antar Desa	2011		2014	
		Desa Maritim	Desa Bukan Maritim	Desa Maritim	Desa Bukan Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Darat	76,42	94,83	74,68	93,99
	Air	6,10	0,56	4,74	0,37
	Darat dan air	17,48	4,61	20,59	5,64
Jawa	Darat	95,93	99,73	94,40	99,66
	Air	0,71	0,05	0,48	0,02
	Darat dan air	3,36	0,23	5,12	0,31
Bali dan Nusa Tenggara	Darat	93,21	99,85	90,65	99,73
	Air	0,79	0,09	1,75	0,08
	Darat dan air	6,00	0,06	7,60	0,19
Kalimantan	Darat	63,51	60,44	57,83	58,00
	Air	8,61	8,43	6,00	5,55
	Darat dan air	27,87	31,12	36,17	36,44
Sulawesi	Darat	79,13	97,76	79,27	97,89
	Air	4,91	0,10	4,43	0,04
	Darat dan air	15,95	2,13	16,30	2,07
Maluku dan Papua	Darat	1,33	83,19	40,74	83,39
	Air	24,70	8,52	20,80	7,13
	Darat dan air	33,97	8,29	38,47	9,48

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Melihat keadaan fasilitas sarana jalan dan transportasi yang ada pada desa maritim, terlepas dari masih minimnya sarana jalan atau sangat dibutuhkannya sarana transportasi, persoalan lebih vital adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu, berpartisipasi, dan mendukung pembangunan pada wilayah desa, khususnya dalam pemeliharaan dan menjaga fasilitas sarana jalan dan transportasi yang sudah ada. Tingginya peran serta masyarakat di desa terkait sangat mendorong terwujudnya

Gambar 4.10. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Transportasi dan Pulau, Tahun 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

pengembangan wilayah desa, terutama desa pesisir yang seyogyanya kaya akan potensi. Peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa terutama infrastruktur transportasi dapat terlihat pada keberadaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Gambar 4.10, persentase desa yang memiliki program pemberdayaan masyarakat sudah cukup tinggi dengan angka mencapai lebih dari 80 persen baik pada desa maritim maupun desa bukan maritim di tahun 2014. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2011. Pada tahun 2011, masih terjadi perbedaan pada keberadaan program pemberdayaan yang cukup signifikan antara desa maritim dan desa bukan maritim. Namun, tiga tahun setelahnya yaitu tahun 2014 persentase desa dengan keberadaan program pemberdayaan masyarakat mengalami perkembangan yang positif. Apabila diselidiki lebih mendalam, sumber dana untuk memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat paling banyak diperoleh dari PNPB, bahkan untuk desa maritim persentase sumber dana yang berasal lebih besar dibandingkan desa bukan maritim. Keberhasilan dari upaya keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang sudah cukup bagus menggerakkan pemerintah dalam pengembangan lebih lanjut dalam pembangunan desa maritim. Hal tersebut diwujudkan dengan mulai ditetapkannya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sejak tahun 2012. Program ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya. Selain itu, program ini berusaha melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik desa serta berupaya membentuk masyarakat pesisir yang tanggap bencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

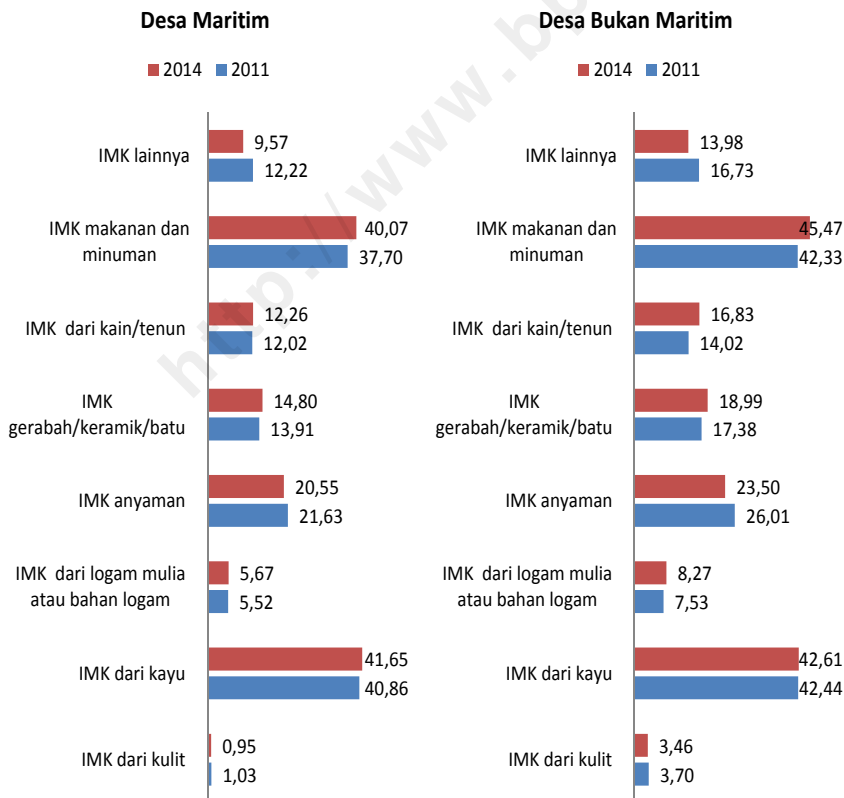
4.4 Sarana dan Prasarana Kegiatan Ekonomi di Desa Maritim

Pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang berimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut berbagai usaha dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi semakin digalakkan. Pemberdayaan dan percepatan tersebut umumnya dilakukan dengan berbasis potensi ekonomi wilayah, tujuannya agar ekonomi desa dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulannya di pasaran (Bappenas, 2014). Pada desa maritim, kondisi geografis-ekologisnya sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi pada desa ini dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi tersebut mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Persoalan ekonomi pada desa maritim terletak pada karakteristik ekonomi yang penuh ketidakpastian (Kusumastanto & Satria, 2015). Kegiatan ekonomi masih sangat tergantung pada alam, sehingga jika terjadi bencana dan perubahan iklim perekonomian akan merosot tajam. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perekonomian yang tangguh pada desa maritim agar saat terjadi bencana atau perubahan iklim masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan.

Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana ekonomi wilayah desa maritim yang mampu mengakomodasi pasar tradisional dan sektor informal termasuk kegiatan koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam pembangunan Nasional. Karenanya, keberadaan akan Industri Mikro dan Kecil (IMK), pasar, pertokoan, koperasi, fasilitas kredit dan bank pada desa maritim merupakan sesuatu yang menarik untuk diselidik lebih mendalam. Melalui informasi pada data yang ada dapat diketahui kondisi, karakteristik dan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi pada desa maritim.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) memegang peranan penting untuk berkontribusi dalam pengembangan wilayah desa, terutama desa maritim. Desa maritim yang kaya akan potensi Sumber Daya Laut dan jasa lingkungan pesisir yang melimpah menjadi ladang emas bagi masyarakat setempat untuk bergerak dalam bisnis usaha mikro dan kecil. Menurut Badan Pusat Statistik, sebuah industri dikatakan mikro kecil apabila jumlah tenaganya kurang dari 20 pekerja. Kebutuhan pekerja pada industri ini menghadirkan peluang

Gambar 4.11. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Yang Memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menurut Bahan Baku Utama, Tahun 2011 dan 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

kerja bagi masyarakat. Kehadiran dan banyaknya IMK pada desa maritim sangat bermanfaat dalam menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan hasil produksi (Annisa, 2014).

Gambar 4.11. memperlihatkan perkembangan persentase desa yang memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut bahan baku utama pada tahun 2011 dan 2014. Selama selang waktu tersebut tidak terdapat perkembangan yang signifikan pada persentase desa yang memiliki IMK pada kedua desa. Baik desa maritim maupun desa bukan maritim, industri yang berkembang adalah industri dengan bahan baku utama berupa makanan dan minuman serta kayu. Hal ini terlihat dari besarnya persentase industri IMK pada bahan baku tersebut di kedua desa. Jika dibandingkan antara kedua desa, persentase desa dengan keberadaan IMK di desa maritim umumnya lebih kecil daripada desa bukan maritim. Industri berbahan baku kayu banyak dimiliki oleh kedua desa, dikarenakan ekonomi pada daerah desa lebih banyak tergantung dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara, industri berbahan baku makanan dan minuman juga dominan umumnya disebabkan oleh faktor melimpahnya sumber daya alam, seperti perikanan, garam, dan rumput laut untuk desa maritim.

Berdasarkan enam pulau besar di Indonesia, menunjukkan bahwa persentase desa yang memiliki IMK menurut bahan baku utama berbeda-beda pada setiap pulau. Tabel 4.14 memperlihatkan persentase desa yang memiliki IMK menurut empat persentase terbesar bahan baku utama di setiap pulau Indonesia. Secara umum, kondisi persentase desa berdasarkan keberadaan IMK di setiap pulau sama dengan kondisi secara nasional. Bahan baku utama masih didominasi oleh bahan kayu, anyaman, gerabah/keramik/batu, serta makanan dan minuman, kecuali Pulau Sulawesi. Pada pulau Sulawesi persentase desa dengan IMK berbahan kain/tenun lebih mendominasi daripada anyaman. Ditinjau dari perkembangan desa dari tahun 2011, khusus desa dengan IMK berbahan baku makanan dan minuman pada tahun 2014 persentasenya meningkat di setiap pulau. Desa maritim lebih banyak memiliki IMK berbahan baku utama kayu, persentase desanya selalu lebih besar dibandingkan desa bukan maritim.

Di samping industri yang ada pada desa maritim, keberadaan akan tempat-tempat perbelanjaan merupakan hal penting lainnya dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa. Tempat perbelanjaan berperan sebagai tempat dilakukannya aktivitas ekonomi seperti transaksi ekonomi, kegiatan konsumsi, dan lain sebagainya. Kelompok pertokoan, pasar, dan toko/warung kelontong adalah tiga tempat perbelanjaan dasar masyarakat desa. Pada desa maritim, jumlah desa yang telah memiliki sarana kelompok pertokoan masih sedikit dengan persentase kurang dari 10 persen seperti diperlihatkan pada Gambar 4.12. Perbedaan terlihat cukup signifikan antara jumlah desa yang memiliki kelompok pertokoan di kedua status desa. Desa bukan maritim masih unggul dalam jumlah desa yang memiliki kelompok pertokoan. Secara tidak langsung hal ini dapat diasumsikan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan perekonomian antar kedua status desa. Meneliti

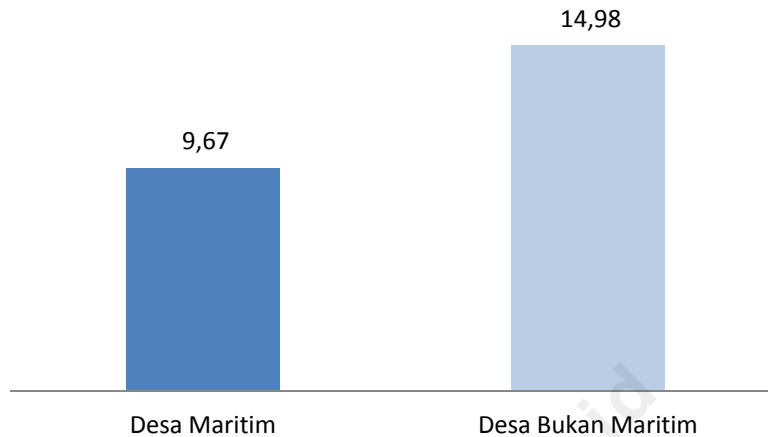
Tabel 4.14. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menurut Bahan Baku Utama dan Pulau, Tahun 2011 dan 2014

Wilayah/Pulau	Karakteristik	Desa Maritim		Desa Bukan Maritim	
		2011	2014	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Kayu	33,12	32,54	29,68	30,79
	Anyaman	21,86	19,14	15,65	14,96
	Gerabah/keramik/batu	14,49	14,44	12,48	12,62
	Makanan dan minuman	35,24	38,12	29,59	32,99
Jawa	Kayu	63,12	68,19	64,50	65,80
	Anyaman	27,16	24,55	40,84	36,17
	Gerabah/keramik/batu	19,44	21,85	26,64	30,26
	Makanan dan minuman	66,62	67,01	67,07	70,65
Bali dan Nusa Tenggara	Kayu	46,10	51,31	43,45	42,47
	Gerabah/keramik/batu	25,16	25,62	21,00	24,15
	Kain/tenun	34,81	36,79	30,26	32,88
	Makanan dan minuman	38,31	38,94	31,99	37,72
Kalimantan	Kayu	39,19	37,50	23,05	25,73
	Anyaman	16,39	20,00	20,19	17,92
	Gerabah/keramik/batu	15,54	22,00	8,75	10,68
	Makanan dan minuman	47,13	55,33	27,94	32,67
Sulawesi	Kayu	52,53	49,42	48,02	47,48
	Gerabah/keramik/batu	27,73	22,82	23,14	21,35
	Kain/tenun	12,78	14,37	16,99	19,18
	Makanan dan minuman	41,76	45,65	40,11	49,80
Maluku dan Papua	Kayu	20,38	23,69	7,29	6,25
	Anyaman	12,95	16,06	10,89	13,61
	Gerabah/keramik/batu	5,91	5,55	2,81	3,17
	Makanan dan minuman	18,14	19,84	5,90	4,23

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

lebih jauh, pasar dengan bangunan semi permanen lebih banyak dimiliki oleh desa maritim dengan persentase sebesar 14,52 persen desa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13. Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar yang memiliki atap dan lantai, namun tidak memiliki dinding. Ini berarti masyarakat pada desa maritim lebih condong untuk melakukan aktivitas jual beli pada tempat tanpa dinding, seperti tempat pelelangan ikan yang bermukim di suatu lokasi tertentu. Fakta menarik juga terlihat pada pasar tanpa bangunan seperti pasar kaget, pasar subuh, dan pasar terapung yang

Gambar 4.12. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Tahun 2014



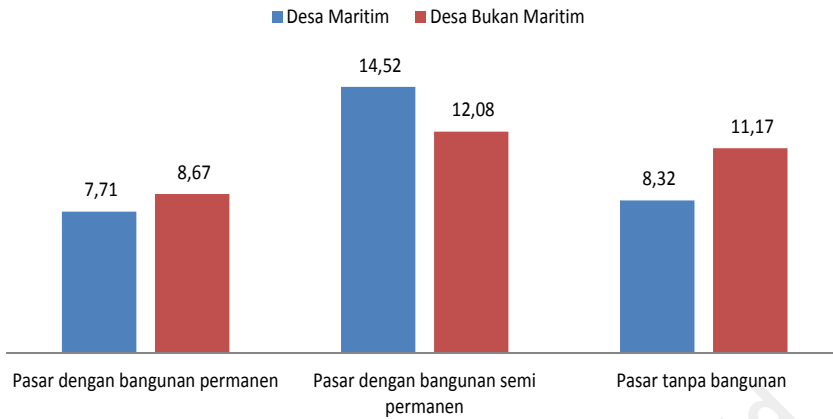
Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

sifatnya tidak tetap dan berpindah-pindah ternyata lebih banyak dimiliki oleh desa bukan maritim.

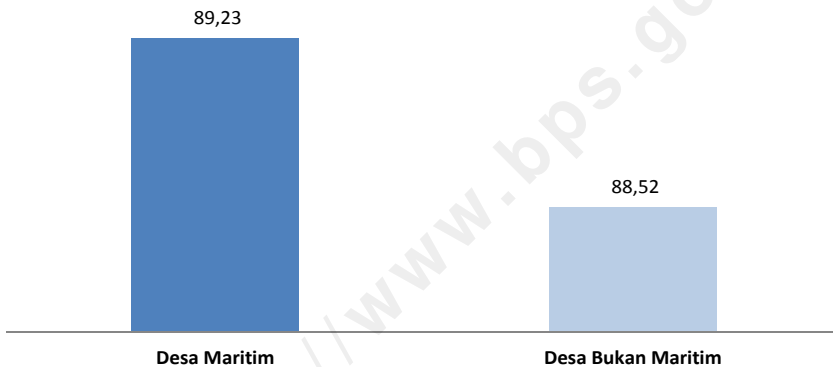
Kemudian, apabila dilihat dari sisi tempat belanja skala kecil seperti toko/warung kelontong pada tahun 2014, desa maritim memiliki lebih banyak toko/warung kelontong daripada desa bukan maritim. Persentase desa maritim yang memiliki toko/warung kelontong ada sebesar 89,23 persen, sedangkan persentase desa bukan maritim ada sebanyak 88,52 persen desa. Toko/warung kelontong merupakan tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran tanpa ada sistem pelayanan mandiri. Tersedianya tempat belanja skala kecil ini sangat membantu masyarakat di desa untuk memenuhi keperluan rumah tangga atau pribadi yang umumnya jaraknya terdekat pada pemukiman.

Persebaran keberadaan tempat-tempat perbelanjaan di seluruh pulau Indonesia diperlihatkan pada Tabel 4.15. Berdasarkan data, jumlah desa dengan keberadaan kelompok pertokoan pada wilayah Indonesia bagian barat rata-rata sudah cukup banyak baik pada desa maritim maupun desa bukan maritim dengan persentase diatas 13 persen. Sedangkan untuk wilayah Indonesia timur jumlah desa yang memiliki kelompok pertokoan masih minim dengan persentase kurang dari 8 persen. Jika ditinjau dari status desa, secara umum persentase desa dengan keberadaan kelompok pertokoan pada desa bukan maritim lebih besar daripada desa maritim. Namun, untuk pulau Kalimantan dan Maluku Papua menggambarkan kondisi sebaliknya, keberadaan desa dengan kelompok pertokoan pada kedua pulau ini lebih dominan berada pada desa maritim. Kondisi ini sejalan dengan persentase desa yang memiliki fasilitas penerangan jalan menurut jenis penerangan, status desa, dan pulau seperti pada Tabel 4.10 pada subbab 4.3. Jika saling dikaitkan banyaknya desa dengan kelompok pertokoan pada desa maritim terjadi karena daerah

Gambar 4.13. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim yang Memiliki Pasar Menurut Jenis Bangunan, Tahun 2014



Gambar 4.14. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Toko/Warung Kelontong, Tahun 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2014

pedalaman pada kedua pulau tersebut sulit untuk dijangkau. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi pada kedua pulau ini.

Tabel 4.15 juga memperlihatkan keberadaan fasilitas pasar di desa berdasarkan pulau. Secara umum, desa maritim di setiap pulau kebanyakan memiliki pasar dengan bangunan semi permanen dengan persentase diatas 11 persen desa. Khusus pulau Jawa dan Kalimantan memiliki keadaan fasilitas pasar yang berbeda diantara pulau lainnya. Pada pulau Jawa jumlah pasar dengan bangunan permanen hampir sama dengan bangunan semi permanen dengan persentase sebesar 18,26 persen desa. Hal ini wajar jika mengingat bahwa pembangunan pada pulau ini yang sudah baik dibandingkan pulau lainnya. Di sisi lain, jumlah pasar tanpa bangunan hampir mendominasi di pulau Kalimantan. Salah satu faktor penyebab dominasi pasar tanpa bangunan ini adalah karena kegiatan ekonomi masyarakat yang banyak memanfaatkan lalu lintas air, sehingga pasar apung banyak terlihat pada pulau ini.

Tabel 4.15. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, Toko/Warung Kelontong dan Pulau, Tahun 2014

Wilayah/Pulau	Keberadaan Sarana Belanja	Status Desa	
		Desa Maritim	Bukan Desa Maritim
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	Kelompok pertokoan	13,48	13,47
	Pasar dengan bangunan permanen	7,22	6,34
	Pasar dengan bangunan semi permanen	11,08	14,12
	Pasar tanpa bangunan	8,40	9,68
	Toko/Warung Kelontong	89,57	89,23
Jawa	Kelompok pertokoan	23,10	23,92
	Pasar dengan bangunan permanen	18,26	14,29
	Pasar dengan bangunan semi permanen	19,50	11,13
	Pasar tanpa bangunan	17,57	13,49
	Toko/Warung Kelontong	97,51	98,58
Bali dan Nusa Tenggara	Kelompok pertokoan	7,40	8,02
	Pasar dengan bangunan permanen	9,55	7,99
	Pasar dengan bangunan semi permanen	16,68	11,37
	Pasar tanpa bangunan	9,55	10,25
	Toko/Warung Kelontong	84,13	85,49
Kalimantan	Kelompok pertokoan	20,33	10,58
	Pasar dengan bangunan permanen	12,33	6,36
	Pasar dengan bangunan semi permanen	21,17	13,03
	Pasar tanpa bangunan	20,83	19,62
	Toko/Warung Kelontong	97,33	92,41
Sulawesi	Kelompok pertokoan	4,96	7,16
	Pasar dengan bangunan permanen	5,84	5,54
	Pasar dengan bangunan semi permanen	18,83	14,02
	Pasar tanpa bangunan	5,26	4,29
	Toko/Warung Kelontong	93,97	94,04
Maluku dan Papua	Kelompok pertokoan	4,63	2,59
	Pasar dengan bangunan permanen	3,55	1,34
	Pasar dengan bangunan semi permanen	7,62	4,86
	Pasar tanpa bangunan	4,43	6,52
	Toko/Warung Kelontong	80,22	34,13

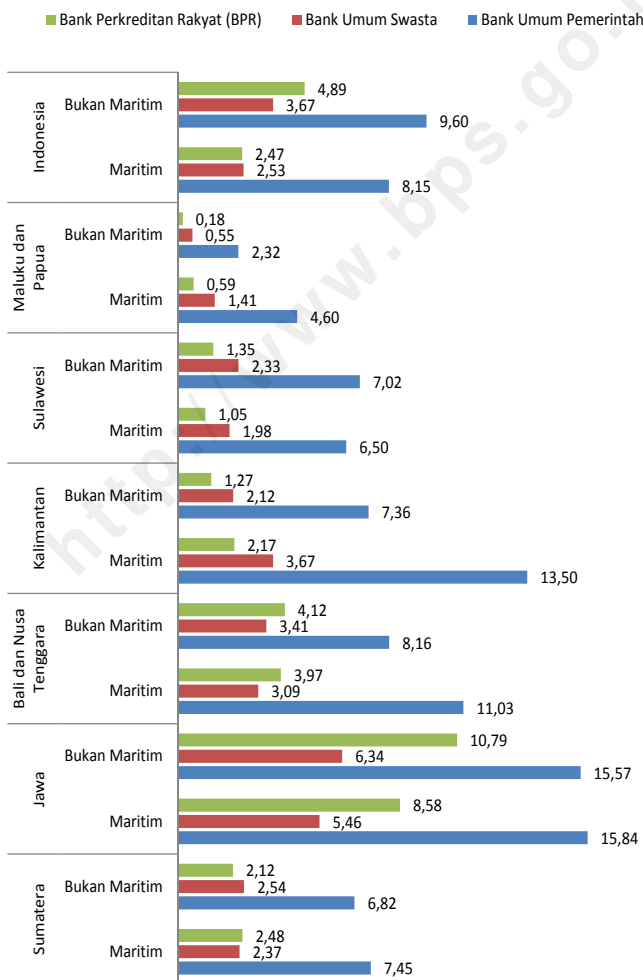
Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

Kemudian, untuk toko/warung kelontong pada desa maritim di masing-masing pulau memiliki kecenderungan keadaan yang hampir sama dengan keberadaan kelompok pertokoan. Rata-rata persentase desa yang memiliki toko/warung kelontong di masing-masing pulau ada sebanyak 80 persen lebih.

Penyimpangan data terjadi pada pulau Jawa dan Maluku Papua, dimana kedua pulau tersebut masing-masing merupakan pulau dengan persentase keberadaan desa dengan fasilitas toko/warung kelontong terbesar dan terkecil.

Sarana dan prasarana kegiatan ekonomi lain yang turut menjadi perhatian pada desa maritim adalah keberadaan bank. Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Peran bank sebagai lembaga keuangan pada desa maritim lebih kepada penyediaan pinjaman untuk pengembangan usaha mikro dan sarana penyimpanan yang aman untuk masyarakat. Lebih jauh lagi bank di desa berfungsi untuk

Gambar 4.15. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Bank, Tahun 2014



Sumber : Pendataan Potensi Desa 2014

Tabel 4.16. Persentase Desa Maritim dan Desa Bukan Maritim Menurut Keberadaan Koperasi, Tahun 2014

Wilayah/Pulau	Status Desa	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi		
			Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	Maritim	7,94	0,99	13,94	11,04
	Bukan Maritim	8,69	0,78	14,31	8,75
Jawa	Maritim	10,51	2,07	29,74	33,82
	Bukan Maritim	7,43	1,44	32,35	27,89
Bali dan Nusa Tenggara	Maritim	5,78	0,61	29,52	9,01
	Bukan Maritim	5,00	0,91	27,88	10,00
Kalimantan	Maritim	15,83	2,17	15,67	15,67
	Bukan Maritim	14,99	0,80	13,18	9,94
Sulawesi	Maritim	5,29	0,39	12,31	7,02
	Bukan Maritim	5,56	0,42	13,10	8,96
Maluku dan Papua	Maritim	4,89	0,69	6,77	2,92
	Bukan Maritim	3,01	0,39	2,68	1,13
Indonesia	Maritim	6,88	0,88	15,44	10,52
	Bukan Maritim	7,89	0,95	20,04	14,91

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau mencegah kemerosotan kesejahteraan serta meningkatkan daya tahan masyarakat, terutama petani terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka akan pinjaman agar mereka tidak terjerat oleh pelepasan uang atau rentenir dan pengijon (Karsidi, 2015).

Gambar 4.15 menunjukkan persentase desa menurut keberadaan bank pada tahun 2014. Secara nasional, Bank Umum Pemerintah (BUP) masih menjadi primadona. Pada tahun 2014 persentase desa maritim yang memiliki BUP paling tinggi diantara Bank Umum Swasta (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Meskipun secara nasional persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan desa bukan maritim, sebagian besar pulau memiliki persentase desa maritim dengan keberadaan bank yang lebih tinggi dibandingkan desa bukan maritim. Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada persentase BUP di pulau Kalimantan. Persentase desa maritim di Pulau Kalimantan yang memiliki BUP hampir dua kali dari persentase yang dimiliki desa bukan maritim, yaitu sebesar 13,50 persen desa. Sedangkan, pada desa bukan maritim persentasenya sebesar 7,36 persen desa. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pada Pulau Kalimantan pemukiman dan kegiatan ekonomi banyak berada pada wilayah pesisir.

Selain Bank, lembaga keuangan lainnya yang lebih merakyat dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan adalah koperasi. Keberadaan koperasi pada desa maritim ditampilkan pada Tabel 4.17. Secara umum, koperasi yang

Tabel 4.17. Persentase Desa Maritim dan Bukan Maritim Menurut Keberadaan Kredit Usaha, Tahun 2014

Wilayah/Pulau	Status Desa	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP - E)	Kredit Usaha Kecil (KUK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	Maritim	23,49	1,99	13,45
	Bukan Maritim	33,92	2,77	12,98
Jawa	Maritim	55,05	9,89	30,50
	Bukan Maritim	66,85	13,02	36,10
Bali dan Nusa Tenggara	Maritim	32,55	3,97	22,73
	Bukan Maritim	33,93	7,17	23,76
Kalimantan	Maritim	42,67	4,33	24,33
	Bukan Maritim	32,10	4,82	13,88
Sulawesi	Maritim	51,84	3,00	16,69
	Bukan Maritim	56,88	5,61	23,69
Maluku dan Papua	Maritim	15,51	0,53	9,00
	Bukan Maritim	5,86	0,67	3,49
Indonesia	Maritim	35,13	3,16	16,82
	Bukan Maritim	45,05	6,83	21,87

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011 dan 2014

paling diminati di desa adalah koperasi simpan pinjam (kospin). Persentase desa yang memiliki kospin baik secara nasional maupun di enam pulau besar paling tinggi diantara Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra), dan Koperasi Lainnya. Pada desa maritim ada sebesar 15,44 persen desa yang telah memiliki kospin, angka tidak jauh berbeda dengan keberadaan kospin pada desa bukan maritim, yaitu sebesar 20,04 persen desa. Pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Maluku dan Papua keberadaan koperasi terlihat lebih banyak berada di desa maritim dibanding desa bukan maritim.

Adanya Bank dan Koperasi tidak berarti tanpa adanya fasilitas kredit usaha. Kredit usaha di desa terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dan Kredit Usaha Kecil (KUK). Persentase desa menurut keberadaan kredit usaha tercermin pada Tabel 8. Secara Nasional, fasilitas kredit yang banyak dimiliki oleh desa adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persentase desa tertinggi diantara kredit usaha lain, yaitu sebesar 35,13 persen di desa maritim dan 45,05 persen di desa bukan maritim. Hal yang sama juga terjadi pada enam besar Pulau di Indonesia, KUR paling banyak dimiliki oleh setiap Pulau. Secara umum, keberadaan KUR di desa maritim lebih kecil dibanding desa maritim. Namun, untuk Pulau Kalimantan dan Maluku dan Papua memperlihatkan keadaan sebaliknya. Pada kedua pulau ini persentase desa yang memiliki fasilitas kredit usaha banyak

berada di desa maritim daripada desa bukan maritim. Hal ini sesuai dengan keadaan fasilitas bank dan koperasi yang memang banyak dimiliki oleh desa maritim pada kedua pulau tersebut.

Sarana dan Prasarana kegiatan ekonomi pada desa maritim dapat dikatakan sudah cukup baik walaupun masih minim jika dibandingkan dengan desa bukan maritim. Dari sisi industri, keberadaan IMK dengan bahan baku kayu serta makanan dan minuman sudah cukup banyak pada desa maritim. Namun, keberadaan pasar dan kelompok pertokoan masih minim. Minimnya pasar dan kelompok pertokoan membuat keberadaan toko/warung kelontong sebagai sarana belanja kebutuhan masyarakat menjadi lebih banyak. Kemudian untuk fasilitas lembaga keuangan, keberadaan bank dan koperasi di desa maritim sudah ada dengan persentase yang masih kecil yaitu sekitar 15 persen ke bawah. Meskipun keberadaan lembaga keuangan dapat dikatakan masih minim, keberadaan fasilitas kredit usaha sudah cukup banyak, yaitu sudah mencapai setengah dari proporsi desa maritim.

<http://www.bps.go.id>

Penutup

5



Pemerintahan terpilih di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memprioritaskan pembangunan di bidang maritim, pangan, dan energi. Salah satu misi yang tertuang dalam agenda kerja pemerintah baru yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Letak maritim Indonesia memberi dampak positif, seperti adanya kegiatan atau usaha di bidang pelayaran, perikanan serta pelabuhan.

Desa maritim adalah desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Gambaran tentang kondisi sosial ekonomi di desa maritim dan program pembangunan Indonesia untuk desa maritim menjadi sangat penting bagi perumusan kebijakan di bidang maritim. Kondisi geografis desa maritim tidak terlalu berbeda jauh dengan desa bukan maritim. Ditinjau dari topografi wilayah, sebagian besar desa maritim terletak di dataran, begitu pula dengan desa bukan maritim. Jika ditinjau menurut lokasi wilayah terhadap hutan, sebagian besar desa maritim terletak di luar hutan dan di tepi/sekitar hutan. Sementara desa maritim lebih banyak berada di luar hutan.

Pada tahun 2014, sebagian besar desa maritim sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar. Sumber air minum yang banyak diandalkan oleh penduduk di desa maritim adalah air yang bersumber dari sumur. Penggunaan listrik PLN mulai meningkat baik di desa maritim maupun desa bukan maritim. Sebaliknya, penggunaan listrik non PLN menurun tajam, baik di desa maritim maupun desa bukan maritim. Sebagian besar desa maritim di Indonesia masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak sedangkan desa bukan maritim sebagian besar sudah menggunakan elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak.

Sebagian besar desa maritim dan desa bukan maritim sudah memiliki fasilitas TK dan SD/ sederajat. Namun, fasilitas SMP/ sederajat, SMU/ sederajat, dan SMK masih sangat terbatas. Selama tahun 2011-2014, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan/ perbaikan infrastruktur di bidang pendidikan di desa maritim mengalami peningkatan. Fasilitas kesehatan di desa maritim yang mengalami peningkatan terbesar adalah pos kesehatan desa (poskesdes). Akan tetapi, masih banyak desa maritim yang tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, tempat praktek dokter, dan polindes. Di desa-desa maritim lebih cenderung untuk menggunakan tenaga non medis, seperti dukun bayi untuk menolong proses persalinan.

Di bidang perekonomian, sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa maritim dan bukan maritim berasal dari sektor pertanian dengan komoditas utama tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap menjadi komoditi unggulan di hampir seperlima jumlah seluruh desa maritim di Indonesia. Sebagian besar desa maritim memanfaatkan laut untuk perikanan tangkap dengan persentase di atas 90 persen, untuk transportasi umum dan perikanan budidaya sebesar 28 persen.

Untuk mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan, sebagian penduduk memilih untuk menjadi TKI. Persentase desa maritim yang ada warganya yang menjadi TKI sekitar 30 persen, sementara desa bukan maritim sekitar 50 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah TKI perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan TKI laki-laki, dengan rasio lebih tinggi di desa maritim dibandingkan desa bukan maritim.

Sarana dan prasarana kegiatan ekonomi pada desa maritim dapat dikatakan sudah cukup baik walaupun masih tertinggal jika dibandingkan dengan desa bukan maritim. Dari sisi industri, keberadaan IMK dengan bahan baku kayu serta makanan dan minuman sudah cukup banyak pada desa maritim. Namun, keberadaan pasar dan kelompok pertokoan masih minim. Minimnya pasar dan kelompok pertokoan membuat keberadaan toko/warung kelontong yang jumlahnya cukup banyak sebagai sarana utama belanja kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk fasilitas lembaga keuangan, keberadaan bank dan koperasi di desa maritim sudah ada dengan persentase yang masih kecil yaitu kurang dari 15 persen. Meskipun keberadaan lembaga keuangan dapat dikatakan masih minim, keberadaan fasilitas kredit usaha sudah cukup banyak, yaitu sudah mencapai setengah dari proporsi desa maritim.

Pembangunan desa pesisir pada dasarnya merupakan proses transformasi dan modernisasi perdesaan, yang melibatkan seluruh aspek dan masyarakat perdesaan. Strategi pengembangan yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam proses pembangunan wilayah pesisir, pengembangan sektor-sektor terkait seperti pertanian, perikanan laut dan tambak, pariwisata, dan industri yang mendukung sektor pertanian/perikanan. Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 membahas tentang Pengembangan Kawasan Strategis. Upaya yang ditempuh antara lain percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan; menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan; rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta, investor, dan lembaga sosial diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat melalui pemberdayaan desa-desa maritim.

- Adityawarman. (2012, Maret 7). Transportasi Laut Miliki Peran Penting dalam Pembangunan Nasional. Dikutip pada 8 Desember 2015, from Antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/300200/transportasi-laut-miliki-peran-penting-dalam-pembangunan-nasional>
- Amri, N., & Idawarni. (2014). Laporan Penulisan Buku Ajar 'Perumahan Pesisir'. Makassar: Prodi Arsitektur Jurusan Arsitektur Fakultas Teknis Universitas Hasanuddin.
- Anggraini, Y., Domai, T., & Said, A. (2015). Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt) Dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1862-1867.
- Andry. (2105, September 25). Beguwai Jejama: Tenaga Medis-Fasilitas Kesehatan Masih Minim. Dikutip dari Radar Lampung Barat: <http://radarlampungbarat.com/index.php/beguawai-jejama/2031-tenaga-medis-fasilitas-kesehatan-masih-minim>
- Anggorodi, R. (2009). Dukun bayi dalam persalinan . *Makara kesehatan*, 9-14.
- Annisa, F. (2014). Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pembinaan Dan Pelatihan Usaha Mikro Kecil. Lampung: Universitas Lampung.
- Arif, S. (2012, Oktober 20). Jatim: DPRD desak Puskesmas dilengkapi fasilitas Opname. Dikutip dari SINDONEWS.com: <http://daerah.sindonews.com/read/681432/23/dprd-desak-puskesmas-dilengkapi-fasilitas-opname-1350674476>
- Aonullah, A. A. (2015, September 24). *Jurnal Maritim Indonesia Maritime Cognition*. Dikutip dari Revolusi Mental Harus Berorientasi Karakter Maritim: <http://jurnalmaritim.com/2015/09/revolusi-mental-harus-berorientasi-karakter-maritim/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP). (2008). *STUDI EVALUASI. Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance)*.
- Bappenas. *Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana Pembangunan Nasional*. 2014.
- Bappenas. *Rancangan Awal : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku III Agenda Pembangunan Wilayah*. 2014.
- Bappeda Lampung. *Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan*. Bandar Lampung: 2001.
- Bappenas. 2013. *Studi Pendahuluan RPJMN Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019*.
- Bappenas. 2014. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015*.
- Bappenas. 2015. *Laporan Nasional : Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi Tahun 2014*.
- Bappenas. (2014). *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- BPS. 2014. Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta : CV Dharmaputra.
- Deril, M., & H., N. (2014). Uji Parameter Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 55-60.
- etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S2-2015-338460-abstract.pdf
- Fauzi, I. (2015, Oktober 7). Pemkab Diharapkan Perbaiki Jalan Puskesmas Pesisir Pantai. Dikutip dari ANTARA SUMUT: <http://sumut.antaranews.com/berita/152571/pemkab-diharapkan-perbaiki-jalan-puskesmas-pesisir-pantai>
- Fisoma, Y. (2015, September 11). Puskesmas Krui Kekurangan Tenaga Medis. Dikutip dari LAMPOST.CO: <http://lampost.co/berita/puskesmas-krui-kekurangan-tenaga-medis>
- H. Mardjoeki, D. M. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi*, 52-57.
- Harahap, R. H. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- <http://jokowid.blogspot.co.id/2015/06/kondisi-geografis-dan-penduduk.html> (diakses 7 Desember 2015)
- <http://www.dephut.go.id/uploads/files/7b20484ec7cbad97be05d2ba5da08c60.pdf>
- <https://sidicq.wordpress.com/2012/03/21/geografi-pulau-jawa-geomorfologi/>
- <http://core.ac.uk/download/pdf/11704707.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16216/4/Chapter%20I.pdf>
- <http://sumbar.antaranews.com/berita/130924/pesisir-selatan-perluas-areal-kebun-kelapa-lokal.html>
- <http://hallo-indonesia.blogspot.co.id/2012/09/potensi-perekomian-maritim-indonesia.html>
- http://www.plengdut.com/2014/11/komposisi-penduduk-indonesia-menurut_15.html
- <http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/files/06-LAHAN.pdf>
- <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113245-4176.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/45438?show=full> (Skripsi NR Polem, 201)
- <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang>
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/05/171744726/BPS.Tingkat.Pengangguran.Terbuka.Meningkat.dari.Tahun.Sebelumnya>
- International Organization for Migration (IOM). 2010. Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf)
- Irawan, Rudi. 2014. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Kehidupan Sosial Ekonomi [Skripsi].

- Imbiri, J. K., Suhartono, & Nurjazuli. (2012). Analisa Faktor Risiko Malaria Di Wilayah Kerja Puskesmas Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 130-137.
- Keman, S. (2005). Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 29-42.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014, Feb 18). Program Kerja: SD-SMP Satu Atap. Dikutip dari Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <http://www.psmtp.web.id/progdirektorat/pdirektorat/35-satap>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir. 2011.
- KKP. 2014. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015, Februari 13). Berita: Sekretariat: Peran Nakes Dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer. Dikutip dari Kementerian Kesehatan RI: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan: <http://www.buk.kemkes.go.id/read-menkes-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-penentu-keberhasilan-program-572.html>
- Karsidi, R. (2015, Desember 15). Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Sebelas Maret.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2012, Desember 10). Membangun Ketangguhan Bangsa melalui Ketangguhan Pesisir Kita. Dikutip pada 9 Desember 2015 dari Pengembangan Desa Pesisir Tangguh: <http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/lesson-learned-pelaksanaan-pdpt/15-membangun-dari-desa-mewujudkan-pesisir-tangguh>
- KKP & BPS. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Kusumastanto, T., & Satria, A. (2015). Strategi Pembangunan Desa Pesisir. Jakarta: Researchgate.
- Marwasta, D., & Priyono, K. D. (2007). Analisis Karakteristik Permukiman Desa-Desa Pesisir di Kabupaten Kulonprogo. *Forum Geografi*, 57-68.
- Marianti R., Munawar W. 2006. Moving Out of Poverty : The Case of Desa Branta Pesisir, Kabupaten Pamekasan. SMERU Research Institute : Jakarta.
- Muin, F. (2015, Juni 26). Kompasiana. Dikutip dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di Pedesaan Perlu Pembinaan Berkelanjutan: http://www.kompasiana.com/ardans/pendidikan-taman-kanak-kanak-di-pedesaan-perlu-pembinaan-berkelanjutan_54fd7385a33311c82150fdd4
- Madeira, F. F. (2015). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Yogyakarta: Doctoral Dissertation UAJY.
- Masida, A., Rustanto, Y., & Setijowarno, D. (2012). Kajian Kinerja Angkutan Pedesaan Wilayah Pesisir. Simposium III FSTPT (pp. 1-11). Jakarta: Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi.
- Nainggolan, P. P. (2012). Ancaman Keamanan yang Dihadapi Wilayah Pesisir. In S. J. (DPRRI), *Buku Lintas Tim 7* (pp. 153-186). Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

- Nawir, N. A., & Darwis, D. (2015, September 28). Warga Pesisir di Bontang Kesulitan Mendapatkan Fasilitas Kesehatan? Dikutip dari KLIK BONTANG: <http://www.klikbontang.com/berita-3033-warga-pesisir-di-bontang-kesulitan-mendapatkan-fasilitas-kesehatan.html>
- Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. E Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1-8.
- Nurhemi, Shinta, Guruh R. 2014. Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia : Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan.
- Pambudhi, P.Agung. Pembangunan Pertanian-Pangan, Energi, dan Maritim Sudut Pndng APINDO : Disampaikan pada RAKORNAS IPTEK. 2015.
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Kesehatan di Pesisir. (2014, November 16). Dikutip dari jpnn.com Jaringan Berita Terluas di Indonesia: <http://www.jpnn.com/read/2014/11/16/270135/Pemerintah-Diminta-Tingkatkan-Fasilitas-Kesehatan-di-Pesisir>
- Prasetyo, Agus P (Deputi Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas IPTEK Kemenristek). 2014. Artikel : Momentum Bangun 1000 Desa Inovasi Nelayan.
- Pusdatin KKP. 2014. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2014.
- Polem, Niska Ramadani.2013. Skripsi : Motivasi Remaja Perempuan Daerah Pesisir Menjadi TKW ke Malaysia.
- Purnama, B. E. (2015, Februari 14). HUMANIORA: 8 Juta Metrik Ton Sampah Berakhir di Laut. Dikutip dari Media Indonesia: <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/8301/8-Juta-Metrik-Ton-Sampah-Berakhir-di-Laut/2015/02/14>
- Pusdatin Ketenagakerjaan Balitfo Kemenakertrans. 2014. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Jakarta.PUSAKA. (2012, April 9). Kualitas Air di Papua Merosot karena Limbah. Dikutip dari PUSAKA: <http://pusaka.or.id/kualitas-air-di-papua-merosot-karena-limbah/>
- Pusat Data dan Informasi PERSI. (2015, September 25). Kapal Klinik Untuk Masyarakat Pesisir Segera Tiba di Papua. Dikutip dari pdpersi.co.id: <http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?catid=23&mid=5&nid=2067>
- Quaile, I. (2013, Desember 22). Rubrik: Iptek: Hutan Bakau Lindungi Pesisir dari Badai dan Tsunami. Dikutip dari DW: <http://www.dw.com/id/hutan-bakau-lindungi-pesisir-dari-badai-dan-tsunami/a-17313967>
- Rahman, A. (2015, 10 1). Kendala Pemasangan PJU di Pelosok Desa dan Solusinya. Dikutip pada 7 Desember 2015 dari Informasi PJU: <http://www.info-pju.com/2015/10/kendala-pemasangan-pju-di-pelosok-des-dan-solusinya.html>
- Riadi, M. (2012, Oktober 24). Pengertian lalu lintas dan angkutan. Dikutip pada 9 Desember 2015 dari Kajian Pustaka: <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html>

- Rosalina. (2012, Desember 13). *Bisnis : Masyarakat Pesisir Hadapi Empat Masalah*. Dikutip pada 7 Desember 2015 dari Tempo.co: <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>
- Roy. (2014, Januari 12). *Pendidikan: Minim Fasilitas, Anak KAT Tak Tamat SMP di Meranti*. Dikutip dari riauheadline.com Media Online News Leader: <http://riauheadline.com/view/Pendidikan/4098/Minim-Fasilitas--Anak-KAT-Tak-Tamat-SMP-di-Meranti.html>
- Safei, Mhd Dian. 2011. *Dampak Industrialisasi Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara)*.
- Saragih, S. O. (2015, April 20). *Nasional : Banyak Desa di Kalbar Belum Menikmati Listrik*. Dikutip pada 8 Desember 2015 dari BeritaSatu.com: <http://www.beritasatu.com/nasional/266874-banyak-desa-di-kalbar-belum-menikmati-listrik.html>
- Samantha, G. (2012, Mei 20). *Berita: Alam: Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang*. Dikutip dari National Geographic Indonesia: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/hutan-mangrove-indonesia-terus-berkurang>
- Sektor Kelautan: *Masyarakat Pesisir Harus Optimalkan Potensi Kelautan*. (2014, Mei 16). Dikutip dari Koran Jakarta: <http://www.koran-jakarta.com/?12116-masyarakat%20pesisir%20harus%20optimalkan%20potensi%20kelautan>
- Setyorini, Tatik. 2014. *Skripsi : Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Peningkatan Usaha Pertanian Masyarakat Di Pesisir Selatan Kulon Progo*.
- Setyandito, O. (2005). *Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Nusa Tenggara Barat*. Teknik Dipil, 136-152.
- Soselisa et al. 2011. *Masyarakat Pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*.
- Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (n.d.). *Tanya Jawab TNP2K: Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Dikutip dari TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri/>
- Warsito, R. 2010. *Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Peran dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Rakyat di Wilayah Pedesaan di Propinsi Jawa Tengah [Laporan Akhir]*. Salatiga [ID]: Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Wasak, M. (2012). *Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat*. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pacific Journal, 1339-1342.
- Yosephus, S. (2014). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik*. Jurnal Politico.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Ext. 7330 Fax : (021) 3857046,

E-mail : bpsdq@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>